



IJSED

Indonesian Journal
of Sociology, Education,
and Development



Volume 2
Issue No. 1 (Januari-Juni)
Tahun Terbit 2020



Dewan Redaksi

Editor-In-Chief

Anggaunitakiranantika, S.Sos., M.Sosio.
(Universitas Negeri Malang)

Associate Editors

Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si.

(Universitas Pendidikan Indonesia)

Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si.

(Universitas Negeri Manado)

Prof. Dr. Warsono

(Universitas Negeri Surabaya)

Dr. Thriwaty Arsal, M.Si.

(Universitas Negeri Semarang)

Rakhmat Hidayat, Ph.D.

(Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Nursalam, M.Si.

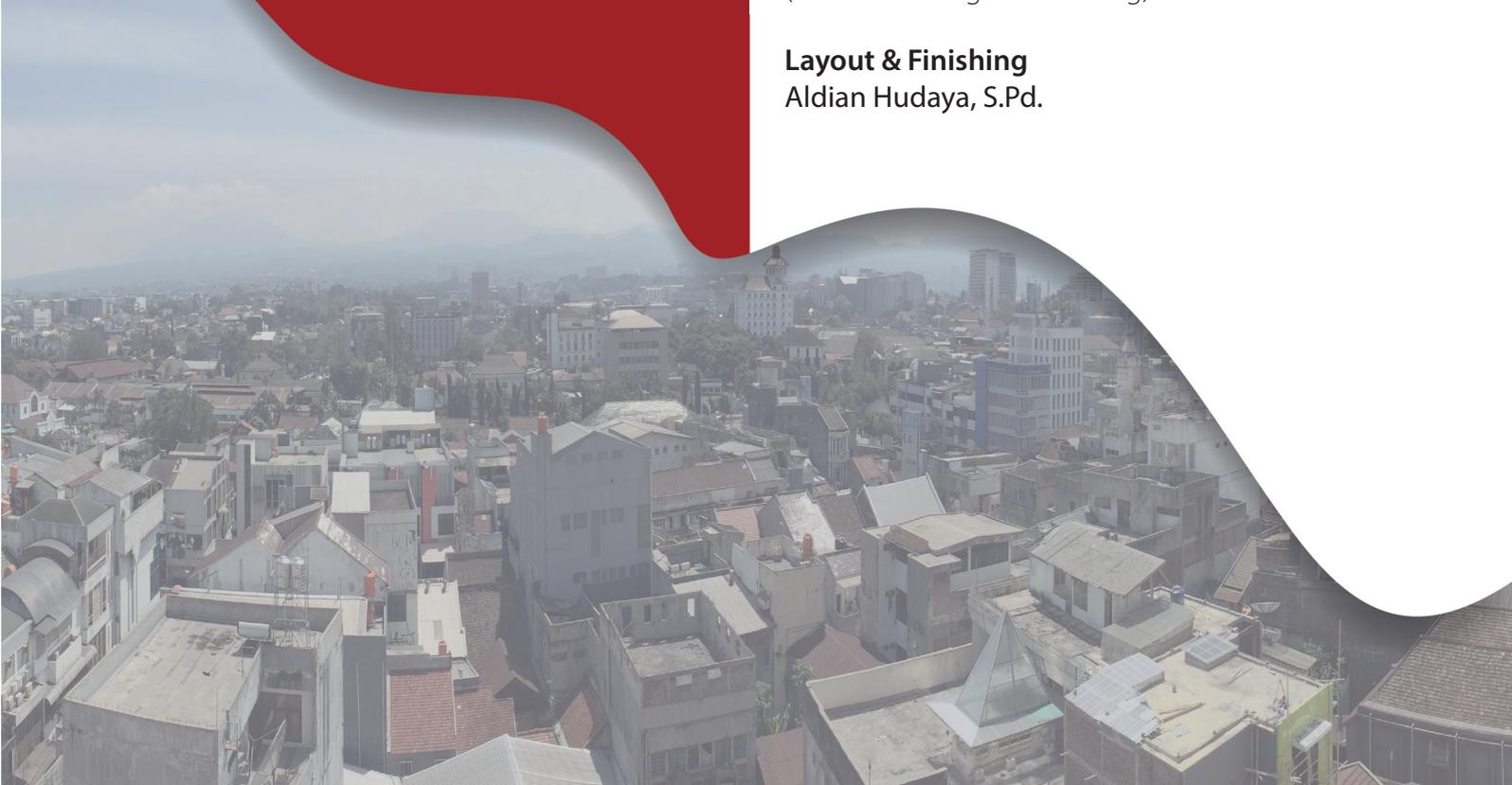
(Universitas Muhammadiyah Makassar)

Dr.scient.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si.

(Universitas Negeri Semarang)

Layout & Finishing

Aldian Hudaya, S.Pd.





ISSN 2685-483X

Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020



Daftar Isi

| | Hal. |
|---|-------|
| Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Limas di Sumatera Selatan Reta Luciani, Elly Malihah | 1-9 |
| Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah) Siti Fathimah, Ferdinand Kerebungu | 10-17 |
| Pembentukan Keterampilan Sosial di Rumah Pemberdayaan Aulia Qolbu Cilegon Rizki Setiawan, Eti Komalasari | 18-27 |
| Penyesuaian Diri Peserta Didik pasca Penerapan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura Nana Tri Sutisna, Nurhadi | 28-41 |
| Segregasi Sosial Mahasiswa Perantau di Yogyakarta Amelia Susanto Putri, Anggaunitakiranantika | 42-51 |
| Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas untuk Muslim Milenial di Era Digital Mila Nabila Zahara, Dadan Wildan, Siti Komariah | 52-65 |
| Hubungan antara Negara dan Masyarakat Sipil: Kajian Teoretis Abdou Barrow | 66-74 |



ISSN 2685-483X

Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020



Table of Contents

pp.

Local Wisdom Analysis of Rumah Limas in Sumatera Selatan

1-9

Reta Luciani, Elly Malihah

PLTA Palu-3 Construction (Sociology-Anthropology Study of the PLTA Palu-3 Construction Failure in Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah)

10-17

Siti Fathimah, Ferdinand Kerebungu

Social Skills Development at Rumah Pemberdayaan Aulia Qolbu Cilegon

18-27

Rizki Setiawan, Eti Komalasari

Students Adaptation Post-Zonation System Application at SMA Negeri 1 Kartasura

28-41

Nana Tri Sutisna, Nurhadi

Migrant Student Social Segregation in Yogyakarta

42-51

Amelia Susanto Putri, Anggaunitakiranantika

Hijrah Movement: Millenial Muslim Identity Seeking in the Digital Era

52-65

Mila Nabila Zahara, Dadan Wildan, Siti Komariah

Relationship between State and Civil Society: Theoretical Review

66-74

Abdou Barrow



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Halaman 1-9



Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Limas di Sumatera Selatan

Reta Luciani
Universitas Pendidikan Indonesia

Elly Malihah
Universitas Pendidikan Indonesia

| | |
|--|--|
| Kata Kunci | Abstrak |
| Nilai Kearifan Lokal Rumah Limas | Perkembangan zaman saat ini tentu kita tidak boleh melupakan kebudayaan yang telah ada karena budaya itu mengandung nilai-nilai luhur yang sangat perlu dilestarikan, sehingga nilai-nilai tersebut tidak terkikis oleh perkembangan globalisasi. Rumah Limas merupakan salah satu rumah adat yang ada di Sumatera Selatan, terdapat nilai-nilai kearifan lokal di Rumah Limas. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di "Rumah Limas". Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik <i>purposive</i> dengan jumlah informan sebanyak tiga orang yang terdiri dari masyarakat Palembang, Turgait Museum Bala Putra Dewa, dan salah satu orang penulis buku Rumah Limas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini terdapat nilai-nilai kearifan lokal Rumah Limas yaitu: nilai religius, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik. |
| Diterima | 11 Januari 2020 |
| Review | 25 Januari 2020 |
| Revisi | 4 Februari 2020 |
| Penerimaan | 1 Maret 2020 |
| Copyedit | 15-26 Juni 2020 |
| Publikasi | 30 Juni 2020 |

Ucapan Terima Kasih/Pengakuan

Penulis mengucapkan terimakasih kepada penulis buku Rumah Limas dan kepada *tour guide* museum bala putra dewa di Sumatera Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang penulis perlukan dalam proses penelitian ini.



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Pages 1-9



Local Wisdom Analysis of Rumah Limas in Sumatera Selatan

Reta Luciani
Universitas Pendidikan Indonesia
Elly Malihah
Universitas Pendidikan Indonesia

| Keywords | Abstract |
|--------------------------------------|--|
| Value Local Wisdom Rumah Limas | The development of the current era certainly we must not forget the culture that already exists because that culture contains noble values that really need to be preserved, so that these values are not eroded by the development of globalization. Rumah Limas is one of the traditional houses in South Sumatra, there are local wisdom values in Rumah Limas. So that researchers are interested in analyzing the values of local wisdom contained in the "Rumah Limas ". In this study using qualitative methods. Subjects in this study were obtained by using purposive techniques with a total of three informants consisting of the Palembang community, the Bala Putra Dewa Turgait Museum, and one of the authors of the Rumah Limas book. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of this study are the local wisdom values of Rumah Limas, namely: religious values, aesthetic values, social values, political values. |
| Submission | 11 Januari 2020 |
| Review | 25 Januari 2020 |
| Revision | 4 Februari 2020 |
| Acceptance | 1 Maret 2020 |
| Copyediting | 15-26 Juni 2020 |
| Publication | 30 Juni 2020 |

Acknowledgement

The authors hereby express their gratitude toward the writer of The Book of Rumah Limas and the tour guide of Bala Putra Dewa Museum in Sumatera Selatan for ensuring their availability to provide information and data needed in the research process.

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki berbagai macam suku, etnis, bahasa, agama, dan adat istiadat yang semuanya itu merupakan cerminan dari suatu kemajemukan bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 300 lebih suku dan 500 bahasa daerah, jadi wajar bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan sehingga setiap sukunya memiliki hukum adatnya sendiri. Keberadaan masyarakat adat di tengah globalisasi dan arus modernisasi dipandang sebagai sesuatu hal yang unik. Di tengah arus globalisasi, di mana orang sibuk dengan konsep-konsep dan pemikiran modern, masyarakat adat berusaha untuk tetap melaksanakan dan memelihara tradisinya, sehingga kebudayaan tidak akan luntur seiring dengan perkembangan globalisasi. Kebudayaan atau yang merupakan bagian dari sebuah “Peradaban” mengandung pengertian yang sangat luas dan mengandung pemahaman perasaan suatu bangsa yang sangat kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, kebiasaan dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat.

Pada hakikatnya tiga wujud kebudayaan menurut J.J Hoenigman, diantaranya (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 2015: 150). Salah satu wujud kebudayaan yang berupa benda-benda hasil karya manusia ini adalah berupa bangunan tradisional atau rumah adat yang ada di Sumatera Selatan yakni Rumah Limas Sumatera Selatan. Rumah Limas adalah salah satu warisan budaya yang ada di Sumatera Selatan yang memiliki kearifan lokal, yang mana kearifan lokal itu adalah suatu nilai-nilai yang telah melekat pada masyarakat dan telah menjadi suatu ciri khas di daerah-daerah tertentu secara turun temurun yang telah diakui oleh masyarakat setempat. Rumah Limas dikatakan sebagai Rumah Limas karena bentuk atapnya yang menyerupai piramida terpenggal. Dilihat dari samping Rumah Limas terdiri dari atas tiga atau lima bagian.

Rumah tradisional limas adalah salah satu rumah yang sangat terkenal di antara Rumah tradisional yang dijumpai di Palembang yang terkenal akan corak, bentuk dan kepadatan seni ukir didalamnya disertai kemilaunya warna cat perado emas yang berarti kejayaan dan penataan rungan yang mencerminkan tingginya tingkatan budaya suku bangsa. Rumah Limas memiliki keanekaragaman yang terdiri dari berbagai bentuk, jenis, dan corak seni budaya yang merupakan pencerminan identitas rumah Limas tersebut. Untuk mengetahui apa itu kearifan lokal yang terdapat pada Rumah Limas, penulis telah melakukan studi pendahuluan pada Rumah Limas yang terdapat di Museum Balaputra Dewa Palembang.

Kemudian, Rumah Limas lainnya merupakan milik Pangeran Syarif Ali, sehingga oleh “*Gemeenstebestuur van Palembang*” rumah tersebut dibeli pada tahun 1936 dan pada akhirnya kedua rumah tersebut digabungkan menjadi satu, dengan cara menghubungkan bagian belakang. Rumah limas setelah diuraikan diatas mengandung nilai kerifan lokal dan historis. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk arsitektur dan ragam hiasan yang sangat erat kaitannya dengan sistem kepercayaan, keperluan sosial, lingkungan hidup dan masyarakatnya. Kearifan lokal pada umumnya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Beragam bentuk kearifan lokal dalam masyarakat, diantaranya berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, dan adat istiadat. Menurut Sartini (2004: 11), kearifan lokal adalah Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan (*local*). *Wisdom* (kearifan) memiliki arti yang sama dengan kebijaksanaan, sedangkan *local* (*local*) memiliki arti sempit. Secara umum maka *local wisdom* (Kearifan lokal) adalah gagasan dari suatu daerah (*local*) yang bersifat penuh kearifan dan bernilai baik, yang sudah tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Selanjutnya, Soebadio dalam Wibowo (2015:16), mengemukakan bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas yang telah menjadi khas atau kepribadian bangsa agar mampu memanfaatkan budaya dari luar sebagai memperkaya pengetahuan dan mengasah keterampilan.

Mengacu pada kearifan lokal yang terdapat dalam rumah tradisional, dala penelitian ini memfokuskan pada rumah limas yang memiliki kearifan lokal lebih luas daripada sekedar suatu tempat untuk bernaung dan berlindung dari panas dan hujan. Hampir semua kegiatan

sosial kemasyarakatan dilakukan di dalam rumah mulai dari menerima tamu, berkumpul dan musyawarah antar keluarga, sampai pada upacara hajatan seperti mencukurkan anak, menikahkan anak serta pada saat kematian. Tujuan dari penelitian ini yakni (1) untuk mengetahui dan menganalisis nilai religius dari Rumah Limas, (2) untuk mengetahui dan menganalisis nilai estetika dari Rumah Limas, (3) untuk mengetahui dan menganalisis nilai sosial dari Rumah Limas, dan (4) untuk mengetahui dan menganalisis nilai politik dari Rumah Limas.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dalam bukunya Cresswell (2010: 245) mengemukakan:

Qualitative research is “interpretive” research, in which you make a personal assessment as to a description that fits the situation or themes that capture the major categories of information. The interpretation that you make a transcript, for example, differs from the interpretation that someone else makes. This does not mean that your interpretation is better or more accurate; it simply means that you bring your own perspective to your interpretation”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif khususnya kualitatif deskriptif. Alasannya adalah karena penelitian ingin lebih memfokuskan pada makna dari data yang didapat dengan secara alamiah, sehingga pendekatan dan metode ini cocok dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan berbagai tahap dalam penelitian ini yaitu instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi (gabungan), pengambilan sumber data dilakukan dengan *purposive teknik*, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif. Lokasi yang tepat untuk melakukan pengambilan sumber data adalah Rumah Limas yang terdapat di Museum Balaputra Dewa dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penulis buku Rumah Limas ibu S, Ibu M sebagai *Tour guide* dan Bapak P sebagai *Tour Guide* di Museum Negeri Bala Putra Dewa Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah **dokumentasi** diperoleh dari buku-buku tentang Rumah Limas dan berupa arsip foto-foto Rumah Limas. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum sejarah dari Rumah Adat Sumatera Selatan yaitu Rumah Limas koleksi Museum Negeri Balaputa Dewa yang berisikan tentang corak ukir Rumah Limas. **Wawancara** dilakukan kepada orang yang mengetahui tentang Rumah Limas didapatkan data bahwa adanya penyembelihan hewan untuk selamatan acara pembangunan rumah, adanya acara upacara pemasangan *alang* pada atap Limas agar membawa kemakmuran, setelah rumah selesai dibangun adanya kegiatan selamatan pindahan rumah yang dilakukan pada hari senin dengan maksud agar mengingat Nabi Muhammad SAW. **Observasi** dilakukan secara partisipatoris dengan melihat secara langsung Rumah Limas, didapatkan bahwa pada Rumah Limas terdapat dua buah tangga pada samping kiri dan kanan rumah. Kemudian setelah naik tangga terdapat *garang* yang digunakan sebagai tempat untuk menjemur pakaian, diatas atap rumah terdapat lima tanduk kerbau yang berartikan lima rukun islam.

Temuan dan Pembahasan

Nilai-nilai kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang sudah lama melekat pada diri masyarakat dan menjadi ciri khas suatu daerah tertentu kemudian diwariskan secara turun temurun yang telah diakui oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan nilai yang melekat pada diri seseorang dan sudah diakui oleh masyarakat setempat, sesuai Teori Alport (dalam Syarbaini, 2014:44) diantaranya adalah:

- (1) Nilai teori, apabila tujuan penelitian itu untuk mengetahui identitas benda serta kejadian yang terdapat di sekitarnya, maka terlihat proses penilaian teori yang menghasilkan pengetahuan.

- (2) Nilai ekonomi, jika tujuannya untuk menggunakan benda atau kejadian, yang mengikuti nalar efisiensi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- (3) Nilai religius, apabila manusia menilai alam sekitar sebagai wujud rahasia kehidupan dan alam semesta. Yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang suci.
- (4) Nilai estetika, apabila mempunyai kedudukan yang khusus karena nilai itu bukan hanya menyangkut keindahan yang dapat memperkaya batin, tetapi juga berfungsi sebagai media yang memperhalus budi pekerti.
- (5) Nilai sosial, berorientasi kepada hubungan antar manusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur.
- (6) Nilai politik, berpusat kepada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik.

Berdasarkan teori tersebut, nilai-nilai kearifan lokal menunjukkan keterkaitan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada kearifan lokal terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga nilai tersebut dapat diwariskan secara turun-temurun, nilai-nilai tersebut terdiri dari nilai teori, nilai ekonomi, nilai religius, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik.

Rumah tradisional Limas adalah salah satu rumah yang terkenal dari berbagai bentuk rumah tradisional lainnya yang terdapat di Sumatera Selatan, diantaranya Rumah Rakit, Rumah adat OKU dan Rumah Gudang. Rumah Limas terkenal karena corak, bentuk, dan kepadatan seni ukir disertai juga dengan kemilaunnya warna cat parado emas yang didatangkan dari Negeri Siam, serta penataan ruang yang mencerminkan akan tingginya tingkatan budaya suku bangsa yang dimilikinya. Menurut Maryetti (2010:9) Rumah Limas adalah tipe rumah panggung, karena didirikan di atas tiang-tiang. Bentuk bangunannya berupa empat persegi panjang dengan lantai yang bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan tersebut berbentuk persegi panjang dan berjumlah dua atau tiga tingkatan. Rumah tersebut disebut Rumah Limas, dikarenakan atapnya berbentuk yang menyerupai piramida terpenggal. Jika dilihat dari sisi samping, rumah tersebut terdiri dari tiga atau lima bagian, masing-masing adalah bagian depan, tengah dan belakang (Heryani, 1994:25-27). Kearifan lokal pada Rumah Limas ini bisa dilihat dari setiap bagian ruangan rumah yang memiliki fungsinya masing-masing dan setiap corak yang ada pada Rumah Limas dalam karya seni ukir banyak dijumpai pada Rumah Limas. Adanya ukiran dengan motif tumbuh-tumbuhan yang memperlihatkan kepada kita bentuk keindahan, kemewahan dan kekuasaan yang memilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu pegawai di Museum Balaputra Dewa yang berinisial "M" dan "P" pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 12:00 WIB, menjelaskan bahwa Rumah Limas ini merupakan peninggalan dari Pangeran Syarif Abdurachman Alhabsi yang dibeli oleh "Gemeenstebestuur van Palembang" yang diletakkan di Jalan Bari Kotamadia Palembang pada tahun 1930. Sebagaimana yang telah dijelaskan Heryani (1994,:25-27) sebagai berikut:

- 1) Ragam hias pada dasarnya mengandung unsur pokok, yaitu ragam hias nongeometris yang berwujud seperti tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, manusia dan sebagainya. Sedangkan yang bercorak geometris berupa unsur-unsur ilmu yang terdiri dari garis-garis segiempat, ceplok, tumpul dan sebagainya.
- 2) Dalam pola atau bentuk ukir kayu terdapat dua elemen yang tidak dapat dipisahkan, yakni motif dan teknik penyusunannya. Motif-motif itu dibuat menjadi suatu pola atau corak tertentu yang berfungsi sebagai menambah nilai estetika dan mempunyai maknanya.
- 3) Pada teknik pengerjaannya, ada dua jenis ukiran yaitu ukiran timbul dan terawang. Hasil ukiran ini membuat Rumah Limas menarik karena kedua jenis ukiran tersebut dibuat dalam posisi simetris, artinya kiri dan kanan selalu sama.

- 4) Selanjutnya pada teknik pewarnaan, warna-warna yang digunakan pada ukiran diantaranya warna keemasan, merah hati, kuning, hitam dan coklat. Serta dilengkapi juga dengan warna yang terang yaitu warna merah dan Prado (emas). Warna-warna tersebut diartikan untuk melambangkan akan kehidupan yang kaya dan makmur.
- 5) Motif dalam ukiran ini sebagian besar mengambil dari rumbuh-tumbuhan, yakni ada motif matahari, motif buah srikaya, motif daun pakis dan motif melati.

Rumah limas juga memiliki tiga bagian, setiap bagian ruangan rumah limas memiliki manfaat dan kegunaannya tersendiri. Menurut Alimansyur,dkk (1985: 17-22) menjelaskan bahwa kegunaan dari ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bagian Depan

Rumah Limas dilengkapi dengan dua tangga yang dipasang pada kiri kanan depan rumah. Tangga langsung masuk menuju pintu rumah. Pada tangga ini jumlah anak tangga dipasang selalu dalam hitungan ganjil, karena keterangan yang saya peroleh bahwa dengan hitungan ganjil akan memberikan keberkahan bagi mereka yang menempati rumah. Sebaliknya apabila hitungan anak tangga berjumlah genap maka orang yang menempati rumah tersebut akan mendapatkan kesulitan mungkin berupa kesusahan mendapat rezeki dan berupa malapetaka. Jarak anak tangga dengan pipi adalah 25 sampai 30 cm dan kayu yang digunakan adalah kayu yang memang bermutu tinggi. Ada juga Rumah Limas yang memakai *jogan*, yaitu sejenis beranda, maka disini tangga rumah tidak langsung masuk menuju pintu rumah tetapi langsung ke *jogan*. Kegunaan dari *jogan* ini adalah sebagai tempat untuk beristirahat pada sore atau malam hari, dari *jogan* inilah orang dapat masuk melalui pintu rumah. Selanjutnya pada bagian depan Rumah Limas tidak ada jendela, yang mana diantara kedua pintu dibuat dinding dari ruji-ruji kayu yang berukiran tembus.

Pada *kekijing* pertama terdapat dua buah jendela pada kiri kanannya, dimana jendela itu ada yang mempunyai satu dan ada yang terdiri dari dua jendela dan biasanya juga dipasang ruji-ruji yang berukiran. Dari *kekijing* pertama ke *kekijing* kedua terdapat suatu penyekat mirip seperti dinding, yang terdiri dari dua penyekat yang masing-masing penyekat dapat diangkat ke atas yang sering disebut dengan *kiyam*. Dari *kekijing* kedua ke *kekijing* yang selanjutnya tidak dibuat *kiyam* lagi, karena *kiyam* ini hanya dibuat antara *kekijing* pertama dan kedua saja. Setiap *kekijing* mempunyai jendela pada kirikanannya, jadi jika rumah tersebut mempunyai tiga *kekijing* berarti mempunyai jendela enam juga.

2) Bagian Tengah

Tinggi lantai pada tiap-tiap *kekijing* lebih kurang 30 sampai 40 cm. Yang digunakan sebagai pembatasnya adalah sekeping papan. Pada bagian tengah ini terdapat lemari dinding yang tingginya sampai loteng dan pada bagian bawahnya lebih kurang 60 cm dibuat ruangan yang tertutup seperti kotak yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan alat perabot rumah tangga. Pada bagian atas lemari diberi kaca yang tingginya lebih kurang 180 cm digunakan untuk memajang barang-barang rumah tangga terutama yang terbuat dari porselin. Kamar atau *amben*, luasnya sekitar 9 sampai 12 meter dan dengan tinggi lantainya lebih kurang 40 sampai 60 cm dari lantai rumah, sehingga untuk keperluan itu maka dibuatlah tangga.

3) Bagian Belakang

Bagian belakang dari Rumah Limas ini adalah dapur, panjang dan lebar dapur ini berukuran sama dan untuk lantainya lebih rendah daripada lantai rumah yakni sekitar 30 sampai 40 cm. Pada bagian kanan kiri dapur biasanya terdapat garang yang berbentuk persegi panjang. Dari garang inilah kita bisa masuk dan pada kedua sisi garang ini dibuat pagar sebagai dindingnya. Ruangan dapur ini terdapat tiga bagian utama yang mempunyai kegunaannya masing-masing. Yang pertama, ada tempat untuk menyiapkan segala sesuatu yang akan dimasak, mulai dari memotong sayuran, ikan ataupun daging, menyiapkan bumbu masak dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat untuk memasak. Pada tempat ini dilengkapi dengan alat-alat untuk memasak, yaitu dibuat meja atau sejenis kota berkaki yang diisi tanah secara padat dan di atasnya diletakkan batu-batu sebagai tempat untuk meletakkan tungku. Pada bagian bawah

kotak atau meja tadi dipergunakan untuk meletakkan kayu api. Selanjutnya pada bagian atas meja atau kotak berkaki tadi dibuatlah *pago* yang tingginya sekitar 80 cm. *Pago* ini diberi alas yang terbuat dari bambu atau papan, kegunaannya adalah sebagai alat untuk pengeringan atau penyimpanan. Yang cocok diletakkan diatas *pago* ini bisa seperti ikan salai, ikan asin atau yang lainnya yang cocok untuk diawetkan diatas udara yang panas. Pada dinding dapur dibuat tempat untuk melataknkan botol-botol seperti botol kecap, botol saos dan sebagainya, yang bisa memudahkan apabila diperlukan pada saat memasak. Yang ketiga, ada tempat untuk mencuci peralatan makan dan minum. Luasnya 2 meter bujur sangkar dan lantainya terbuat dari bambu dan kayu yang tahan air.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Rumah Limas, sesuai dengan teori Alport menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai kearifan lokal pada Rumah Limas, diantaranya Nilai Religius dari Rumah Limas tersebut, Nilai Estetika, Nilai Sosial dan Nilai Politik dari Rumah Limas tersebut sebagai berikut:

1. Nilai Religius, Pada saat pembangunan rumah ada acara penyembelihan hewan untuk selamatan pembangunan rumah, pada saat pemasangan *alang* pada atap rumah ada acara juga yang berarti agar membawa kemakmuran pada saat rumah dihuni, pindahan rumah dilakukan pada hari senin dengan maksud mengingat hari kelahiran nabi Muhammad SAW, hiasan simbar yang ada di dalam Rumah Limas dipercaya dengan jumlahnya dua, artinya mengingat akan kejadian manusia di bumi yaitu adam dan hawa. yaitu (a) adanya penyembelihan hewan untuk selamatan acara pembangunan rumah, (b) adanya acara upacara pemasangan *alang* pada atap Limas agar membawa kemakmuran, (c) adanya kegiatan selamatan pindahan rumah yang dilakukan pada hari senin dengan maksud agar mengingat Nabi Muhammad SAW., (d) adanya kepercayaan bahwa hiasan simbar dengan jumlahnya dua, artinya bahwa mengiatkan kita akan kejadian manusia di bumi yaitu tentang adam dan hawa.
2. Nilai Estetika, Didalam Rumah Limas terdapat ukiran yang bermotifkan tumbuhan-tumbuhan yang berarti memperlihatkan keagungan, kemewahan dan kekuasaan pemilik rumah tersebut, ukiran dengan motif matahari di Rumah Limas, ukiran motif buah srikaya di Rumah Limas, ukiran motif bunga melati di Rumah Limas, Adanya ukiran motif daun pakis di Rumah Limas. Estetika yang terdapat pada Rumah Limas yaitu (1) adanya ukiran dengan motif tumbuhan-tumbuhan memperlihatkan keagungan, kemewahan, dan kekuasaan pemiliknya, (2) adanya ukiran motif matahari pada hiasan Rumah Limas, (3) adanya ukiran motif buah srikaya pada Rumah Limas, (4) adanya ukiran motif bunga melati pada Rumah Limas (5) adanya ukiran motif daun pakis pada Rumah Limas.
3. Nilai Sosial, Di Rumah Limas pada saat mengadakan acara sedekahan dan musyawarah, seseorang akan ditentukan berdasarkan status sosialnya yaitu: Untuk *kekejeng* pertama sebagai empat berkumpul golongan pemuda, Untuk *kekejeng* kedua tempat berkumpulnya golongan setengah baya, Untuk *kekejeng* ketiga tempat golongan yang dituakan atau golongan tua. yang terdapat pada Rumah Limas yaitu (1) adanya acara sedekahan tempat para undangan ditentukan oleh status sosial, (2) untuk *kekejeng* pertama sebagai empat berkumpul golongan pemuda, (3) untuk *kekejeng* kedua tempat berkumpulnya golongan setengah baya, (4) untuk *kekejeng* ketiga tempat golongan yang dituakan atau golongan tua.
4. Nilai Politik, Rumah Limas terdapat *kekijing*, Setiap *kekijing* menjadi simbol perbedaan garis keturunan asli masyarakat Palembang, *kekijing* pertama merupakan teras paling rendah, tempat berkumpulnya golongan kemas (kms), *kekijing* kedua lebih merupakan tempat berkumpulnya para kiagus (kgs) dan massagus (mgs), *kekijing* ketiga merupakan tempat golongan untuk raden dan keluarganya. Nilai politis yang terdapat pada Rumah Limas yaitu (1) Rumah Limas terdapat *kekijing*, Setiap *kekijing* menjadi simbol perbedaan garis keturunan asli masyarakat Palembang (2) Untuk *kekijing* pertama merupakan teras paling rendah, tempat berkumpulnya golongan kemas (kms). (3) Untuk *kekijing* kedua lebih merupakan tempat berkumpulnya para kiagus (kgs) dan massagus (mgs). (4) Untuk *kekijing* ketiga merupakan tempat golongan untuk raden

dan keluarganya.

Pendapat lain menurut Alimansyur, et.al (1985:16) Rumah Limas merupakan bangunan yang berbentuk empat persegi panjang yang didirikan di atas tiang kayu mempunyai lantai yang berundak. Setiap undakan atau kekijing tersebut berbentuk empat persegi panjang pula". Rumah Limas merupakan salah satu Rumah Tradisional yang ada di Palembang yang berbentuk panggung dan atapnya yang menyerupai piramida terpenggal. Rumah Limas ini terkenal akan corak dan bentuk serta kepadatan seni ukir di dalam rumah disertai kemegahan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, rumah limas layak dikatakan sebagai tempat tinggal yang multi fungsi. Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam Rumah Limas di Sumatera Selatan diantaranya: 1) Nilai Religius; 2) Nilai Estetika; 3) Nilai Sosial dan 4) Nilai Politik. Rumah ini selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga mempunyai fungsi sebagai tempat untuk berkumpul dan bermusyawarah antar sesama manusia baik itu keluarga, tetangga maupun teman sebaya. Sehingga apabila diikuti perjalannya dapat dikategorikan sebagai rumah yang mengandung nilai historis.

Referensi/Daftar Pustaka

- Alimansyur,dkk (1986). *Arsitektur Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Kemdikbud.
- Alwasilah. A. C., Suryadi (2006). *Etnopedagogik, Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell,J.W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London. Sage Publications.
- Creswell, Jhon w. 2015. *Riset pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Emzir, 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif & Kulaitatif*. Jakarta : Raja
- Fraenkel, J. R (1977). *How To Teach About Values An Analytic Approach*. New Jersey: Prentic Hall Inc.
- Giddens, A., (2003). *The Constituon of Society (Terjemahan Adi Loka Sujono)*. *Teori Struturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- Heryani, Yenny. (1994). *Gelar kebangsawanan kaitannya dengan Rumah Limas Palembang*. Palembang:Kemdikbud.
- Keraf, A.S., (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat.(2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maryetti, dkk. (2010). *Bunga Rampai Budaya: Rumah Tradisional, Sistem Pewarisan, Songket Palembang, dan Adat Minangkabau*. Padang: BPSNT PadangPress.
- Sanusi, A. (2016). *Pendidikan untuk Kearifan: Mempertimbangkan Kembali Sistem Nilai, Belajar dan Kecerdasan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sartini. (2004). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati*. Jurnal Filsafat. Yogyakarta : UGM. 37(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarbaini, Syahrial. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wibowo, Agus & Gunawan. (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.

Wikantiyoso, Respati& Tutuko, Pindo. (2009). *Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Mewujudkan Arsitektur Kota yang Berkelanjutan*. Malang: Group Konseravsi Arsitektur dan Kota.



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Halaman 10-17



Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah)

Siti Fathimah

Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

Ferdinand Kerebungu

Guru Besar Sosiologi pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

| | |
|-------------------|--|
| Kata Kunci | Abstrak |
| Sikap Politik | Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis perlawanan masyarakat adat Lindu dalam rencana pembangunan PLTA Palu-3 dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, perlawanan masyarakat dipicu oleh kurang sosialisasi dari pemerintah tentang pembangunan PLTA Palu-3. Dalam proses perlawanan masyarakat Adat Lindu menggunakan pemimpinan spiritual Maradindo sebagai simbol dalam melawan pemerintah |
| Masyarakat Adat | |
| PLTA | |
| Diterima | 29 April 2020 |
| Review | 5 Mei 2020 |
| Revisi | 12 Mei 2020 |
| Penerimaan | 24 Mei 2020 |
| Copyedit | 15-26 Juni 2020 |
| Publikasi | 30 Juni 2020 |

Pengakuan

Artikel ini merupakan bagian hasil penelitian disertasi dari Ferdinand Kerebungu di PPs Universitas Airlangga (2003), dengan memperhatikan pelaksanaan pembangunan saat ini, maka perlu dikemukakan kembali kelemahan pembangunan khususnya bagi masyarakat adat seringkali diabaikan oleh pemerintah. Melihat realita tersebut, saya bersama Siti Fatimah kembali mengkaji isi disertasi saya dan menghasilkan artikel ini dengan bersumber dari Disertasi Ferdinand Kerebungu.



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Pages 10-17



PLTA Palu-3 Construction (Sociology-Anthropology Study of the PLTA Palu-3 Construction Failure in Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah)

Siti Fathimah

Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

Ferdinand Kerebungu

Guru Besar Sosiologi pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

| Keywords | Abstract |
|---|---|
| Political Stance Tribal Ethnic Water Power Electric Generator | This research will describe and analyze the resistance of Lindu Tribal ethnic toward the building of water electric generator Palu-3 and the government Central Sulawesi Province. Base on the field study, the resistance is triggered by low level of disclosure from the government regarding the building of Palu-3. In the resistance stance, Lindu tribal ethnic bring into play the spiritual leader of Maradindo as a symbol to resist at government. |
| Submission | 29 April 2020 |
| Review | 5 Mei 2020 |
| Revision | 12 Mei 2020 |
| Acceptance | 24 Mei 2020 |
| Copyediting | 15-26 Juni 2020 |
| Publication | 30 Juni 2020 |

Acknowledgement

This article is a part of the dissertation research by Ferdinand Kerebungu at PPs Universitas Airlangga (2003). By examining the construction process as it is today, it is deemed required to restate the flaws of the construction especially from the perspective of the indigenous community—often neglected by the government. As such, Siti Fathimah and I studied my dissertation and wrote this article, citing Ferdinand Kerebungu's dissertation as a major source.

Pendahuluan

Pada era Pemerintahan Orde Baru banyak mengalami kegagalan dalam proses pembangunan di Indonesia akan tetapi selalu mendapat klaim bahwa pembangunan itu berhasil. Kegagalan dimaksud nanti dirasakan pada masyarakat setelah memasuki era reformasi. Kegagalan tersebut banyak disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang bersifat dari atas ke bawah (kebikalan politik satu arah), dimana peran pemimpin lokal selalu diabaikan dan terjadi upaya pemaksaan agar para pemimpin lokal melegitimasi kebijaksanaan dari pusat (ingat moto pembangunan orde baru: pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Slogan pemerintah orde baru tersebut bahwa pembangunan diartikan sebagai perubahan yang dikehendaki dan dibutuhkan, oleh sebab itu, kebudayaan lokal seringkali dianggap sebagai penghalang besar bagi pembangunan sosial-ekonomi. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Colleta (1987:5) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan, pemerintah sering mempertentangkan antara pembangunan dan kebudayaan atau kebudayaan digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tujuan.

Dove (1985: XV) juga menjelaskan bahwa suatu hal yang disadari atau tidak oleh pemerintah bahwa kebudayaan (tradisional) selalu bersifat dinamis, dan selalu mengalami perubahan, oleh karena itu tidak bertentangan dengan proses pembangunan. Kekeliruan dalam memahami kebudayaan lokal merupakan kesalahan yang sangat fatal pada masa orde baru, karena mereka sering menerjemahkan kebudayaan tradisional secara keliru. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya perencanaan pembangunan yang didasarkan pada data empiris terhadap kebutuhan masyarakat di pedesaan.

Suatu realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah sering mengabaikan sistem kepercayaan masyarakat kepada kebudayaannya. Kepercayaan atau keyakinan masyarakat pada kebudayaannya merupakan sesuatu yang dapat memberikan semangat dalam membangun sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah reformasi (sesuai UU Otda). Kebudayaan yang senantiasa diperbarui hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat monolitik yang menentukan perilaku masyarakat tetapi sebagai pemahaman dan harapan sebagai variasi dari kegiatan yang mereka lakukan yang menuntun perilaku dan interpretasi mereka. (Kurnia Noviati, 2013: 11)

Salah satu contoh sebagaimana dikemukakan oleh Haviland (1988: 198) bahwa dimana ada kepercayaan tentang arwah leluhur, maka makhluk-makhluk tersebut sering dianggap masih tetap secara aktif menaruh perhatian kepada masyarakat dan bahkan menjadi anggotanya. Kepercayaan yang mendalam tentang arwah leluhur seperti itu khususnya cocok dengan masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok kekerabatan yang mempunyai orientasi kepada leluhur. Akan tetapi, lebih dari itu, kepercayaan seperti itu memberi rasa kesinambungan yang kuat, dimasa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang semuanya saling berkaitan. Ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam penyatuan persepsi kehidupan masyarakat. Kehadiran agama secara fungsional sebagai "perekat sosial", memupuk rasa solidaritas, menciptakan perdamaian, kontrol sosial... (Boty, 2015: 35).

Dalam perencanaan proyek PLTA Palu-3, pemerintah mengabaikan keberadaan dari kebudayaan tradisional (asli) dari masyarakat adat Lindu. Tidak disadari oleh pemerintah bahwa kebudayaan tradisional (asli) dapat digunakan sebagai media atau alat bagi pembangunan. Kebudayaan dapat digunakan sebagai media dalam proses pembangunan sehingga dapat berlangsung sukses, dengan tiga alasan berikut. *Pertama*, unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional di mata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan. *Kedua*, unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi paling berharga dari penduduk setempat. *Ketiga*, unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi yang dapat dijadikan sarana yang bermanfaat untuk perubahan (Colleta, 1987:5).

Gagalnya pembangunan PLTA-Palu3 disebabkan oleh karena perlawanan yang diberikan oleh masyarakat adat Lindu sejak awal perencanaan, sampai dengan banyak cara dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan rencana tersebut, namun semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat terwujud karena adanya kekuatan moral yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempertahankan eksistensi budayanya. Oleh sebab itu,

perlawanan dari masyarakat adat Lindu ini merupakan suatu perlawanan yang menggunakan budaya sebagai alat (*cultural resistance*), selain itu, persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah persoalan perijinan dari kementerian kehutanan.

Menurut Foster (1973:82-104), bahwa dalam masyarakat ada hambatan dalam perubahan budaya, social dan psikologi. Lebih lanjut Foster mengemukakan bahwa nilai dan sikap serta struktur budaya yang menghambat perubahan budaya, dan yang termasuk dalam nilai dan sikap adalah tradisi, fatalism, etnosentrisme budaya, harga diri dan martabat. Pada umumnya orang sering beranggapan bahwa tradisi, fatalism dan etnosentrime budaya merupakan sesuatu yang menghambat pembangunan. Disini kembali dipertanyakan, apakah memang benar tradisi, fatalism, dan etnosentrisme budaya menghambat pembangunan?

Secara singkat pertanyaan ini dapat dijawab bahwa hal itu sangat relatif, orang melihatnya pada kondisi dan sudut pandang mana, sehingga hal tersebut menjadi suatu hambatan dalam suatu proses pembangunan. Jelasnya bahwa tidak semua tradisi, fatalism dan etnosentrisme dapat menghambat pembangunan. Kelemahan pembangunan di pedesaan di era pemerintahan orde baru terletak pada penyeragaman atas desa-desa di Indonesia yang bervariasi sistem dan bentuk pemerintahannya. Itulah sebabnya, pada pemerintahan orde baru membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebelum mengalami perubahan di era pemerintah reformasi), tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan desa. Undang-undang tersebut adalah upaya pemerintah orde baru untuk menyeragamkan sistem pemerintahan di daerah dan desa.

Di awal pemerintahan yang disebut reformasi dikeluarkan kebijakan dalam pembangunan pedesaan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (undang-undang ini sudah beberapa kali mengalami revisi dan perubahan), dengan terbitnya undang-undang tersebut perlu kembali dipertanyakan apakah implementasi kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam artian bahwa segala kebijakan pembangunan di pedesaan secara keseluruhan diatur oleh desa sendiri dan pemerintah daerah tinggal mensupport baik material maupun moral sehingga desa benar-benar mandiri dalam menentukan apa yang hendak dicapai untuk kemajuan masyarakatnya sendiri. Jika demikian implementasinya, secara langsung pemerintah pusat dan daerah kembali membangun sistem adat dan budaya yang ada di desa, artinya pemerintah tidak semena-mena campur tangan dalam pembangunan pedesaan.

Sehubungan dengan kenyataan yang ada bahwa kelompok subordinat semakin tertekan sehingga mereka tidak dapat lagi mengekspresikan keinginannya di hadapan kelompok dominan, maka mereka yang tersubordinatkan akan melakukan kegiatan tersembunyi di luar panggung agar tidak terpantau atau tidak teramati secara langsung oleh pemegang kekuasaan, kegiatan ini oleh Scott, disebutnya dengan catatan tersembunyi (*hidden transcript*). Menurut Scott (1990: 4-5) *hidden transcript* demikian adalah derivative dalam artian bahwa ia terdiri atas pembicaraan, isyarat, dan praktik di luar panggung yang memperkuat, mempertentangkan, atau mengubah apa yang kelihatan dalam catatan publik. Kuatnya pengaruh penguasa (*hegemoni*) terhadap kelompok subordinat dapat menyebabkan semakin kuatnya solidaritas kelompok subordinat (etnisitas).

Sejalan dengan pernyataan Scott, Wahyudi (2013:185) juga melihat bahwa dalam radikalisasi demokrasi, beragam kelompok minoritas atau yang lemah, terpinggirkan dan tak berdaya dalam setiap masyarakat, seringkali mengalami nasib paling sial dalam struktur masyarakat itu. Efeknya mereka semua juga tidak beruntung (*worse off*) dari segi ekonomi dan politik. Karena itu semua kelompok minoritas, yang terpinggirkan dan seringkali tertindas dalam semua masyarakat itu... dapat mendorong konstruksi bentuk-bentuk solidaritas khusus di antara berbagai kelompok perjuangan demokratik yang berbeda ini. Penyatuan kaum pluralist demokratik radikal kemungkinan akan membawa kepada gerakan bersama melalui artikulasi sambil tetap mempertahankan otonominya masing-masing.

Gagalnya pelaksanaan pembangunan PLTA Palu-3 tidak terlepas dari adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lindu terhadap pemerintah (kelompok dominan). Perlawanan tersebut merupakan bentuk perlawanan ideologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Scott

di atas, dimana masyarakat adat Lindu melakukan perlawanan dengan membangkitkan kembali semangat dan kebesaran kepemimpinan leluhur mereka Maradindo (memitoskan kembali Maradindo), sebagai simbol perlawanan, dengan adanya perlawanan masyarakat yang menggunakan symbol-simbol, itu berarti bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan kuatnya kuatnya akar budaya yang ada dalam masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teoretik yang telah dikemukakan, maka permasalahannya adalah "Apakah Kebijakan Politik dapat memengaruhi kebudayaan masyarakat lokal?". Untuk itu tujuan dalam penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa tidak selamanya kebijakan politik akan searah dengan kebudayaan lokal.

Metode Penelitian

Perlu dikemukakan bahwa tulisan ini merupakan bagian kecil dari hasil penelitian disertasi saya, oleh sebab itu dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi. Sebab dengan metode etnografi dipandang mampu untuk melakukan sinkronisasi antara kepentingan dan kebutuhan manusia dengan proses akumulasi pengetahuan local dan pemgetahuan ilmiah (Spradley, 1997:19).

Dalam pelaksanaan penelitian data lapangan dikumpulkan dengan menggunakan teknik; pengamatan dalam kancah (observasi partisipasi), wawancara mendalam dan terbuka serta penelitian dokumen-dokumen yang tersedia yang bagaimana kisah perlawanan masyarakat adat Lindu sejak awal perencanaan pembangunan PLTA Palu-3 yang telah direncanakan sejak tahun 1983 hingga saat ini belum dapat direalisasikan pelaksanaannya.

Hasil dan Pembahasan

Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah terkait dengan persoalan lingkungan (kerusakan dan koservasi), sehingga persoalan ini banyak dijadikan isu sentral para penggiat lingkungan seperti Walhi, LSM Rosotapura dan LSM lainnya. Persoalan lingkungan bukan hanya menjadi isu domestic tetapi juga menjadi isu global, apalagi lokasi yang akan dijadikan lokasi rencana pembangunan PLTA Palu3 adalah merupakan kawasan yang masuk dalam Taman Nasional Lore-Lindu yang berada dalam pengawasan WWF. Mengglobalnya isu lingkungan hidup telah menempatkan isu ini pada sebuah posisi yang sangat strategis. Hal ini disebabkan karena di dalam setiap isu lingkungan akan selalu terdapat keterkaitan dengan berbagai macam kepentingan, mulai dari kepentingan ekonomi, politik, ekologi, bahkan juga etika. Maka tidak mengherankan apabila dalam sebuah persoalan lingkungan hidup selalu muncul keruwetan-keruwetan sebagai akibat dari tumpang tindih berbagai kepentingan yang muncul dan ingin diadopsi. (Lailiy, Muthmainnah Dkk, 2020: 43).

Demikian halnya dengan rencana pembangunan proyek PLTA Palu-3 di Danau Lindu, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 1983 telah merencakannya. Kegiatan perencanaannya diawali dengan survei yang dilaksanakan oleh Nippon Koei, sebuah perusahaan konsultasi Jepang yang banyak dipakai oleh Pemerintah Indonesia dalam pembangunan PLTA, (Sangaji, 2000:36). Berdasarkan hasil survey ini menghasilkan Amdal 1 dan 2, akan tetapi perencanaan pembangunannya terhenti oleh karena adanya faktor teknis yaitu perizinan dari pihak Departemen Kehutanan (wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan proyek PLTA Palu-3, masuk dalam areal Taman Nasional Lore-Lindu), kemudian perencanaan tersebut mulai dilanjutkan kembali pada awal tahun 1990-an, pada masa itu dibawah kepemimpinan Gubernur Abdullah Aziz Lamadjido.

Pada periode jabatan Gubernur Abdul Aziz Lamadjido, telah diterbitkan Amdal 3, sebagai pengganti Amdal 1 dan 2 yang sudah lewat masa berlakunya. Keluarnya Amdal 3 merupakan hasil kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan PT Pratama Widya, yang menyusun dokumen Amdal 3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan *Resettlement Plan* di wilayah Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi

Tengah. Amdal ini termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-14, MENLH/3/1994, tertanggal 19 Maret 1994 (PT PLN Persero, 1996: i).

Keluarnya Amdal 3 inilah yang merupakan awal dari perdebatan sengit antara pemerintah daerah dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Rosotapura dan eksekutif Walhi Sulawesi Tengah. Lembaga swadaya ini mulai mempertanyakan keterbukaan pemerintah daerah dalam proses penyusunan Amdal dan bagaimana pemerintah daerah melibatkan masyarakat adat Lindu yang terkena imbas dari rencana proyek PLTA Palu-3. LSM Rosotapura ke dataran Lindu untuk menjelaskan (dapat juga dikatakan sebagai upaya provokasi) pada masyarakat adat Lindu tentang dampak negatif terhadap masyarakat adat Lindu jika proyek PLTA Palu-3 akan dibangun di Danau Lindu. Namun sebelum adanya penjelasan dari pihak LSM Rosotapura tentang dampak negatif bagi masyarakat dari rencana pembangunan PLTA Palu-3 ini, masyarakat di dataran Lindu menerima atau tidak menolak akan kegiatan pembangunan PLTA Palu-3.

Alasan LSM Rosotapura menjelaskan isi Amdal PLTA Palu-3 ini karena mereka melihat bahwa sejak perencanaan proyek PLTA Palu-3 ini (Studi Amdal), pihak pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat Lindu, apalagi melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan PLTA Palu-3 tersebut. Akibat tidak dilibatkannya masyarakat setempat, secara adat sepakat untuk menolak proyek tersebut. Penolakan ini lebih kuat lagi setelah mereka mengetahui isi Amdal PLTA Palu-3 melalui LSM Rosotapura, bahwa masyarakat yang ada disekitar danau Lindu akan direlokasi ke Lalundu (perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan).

Setelah masyarakat mengetahui tentang proses penerbitan Amdal 3 dari rencana pembangunan PLTA Palu-3 tersebut, masyarakat adat Lindu mulai bersepakat untuk menolak pembangunan PLTA Palu-3 dan difasilitasi oleh LSM. Sejak adanya kesepakatan menolak, masyarakat di dataran Lindu selalu menunjukkan sikap apatisme terhadap setiap usaha pembangunan proyek ini, yaitu dalam bentuk tidak adanya kerjasama atau masyarakat tidak mau mendukung pelaksanaan proyek ini.

Lobi-lobi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lindu bersama LSM adalah menghubungi semua pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Untuk menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat dipresentasikan melalui ketua-ketua lembaga adat dari ketiga desa (Desa Anca, Langko dan Domato) bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada didataran Lindu termasuk diantaranya generasi muda yang terhimpun dalam generasi muda *lewuto*.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa perencanaan pembangunan PLTA Palu-3 ini, tidak terlepas dari adanya masalah kebutuhan primer dan sekunder masyarakat tentang tenaga listrik dan keterbatasan dari ketersediaan daya listrik yang ada di Kota Palu dan sebagian wilayah Kabupaten Donggala. Kota Palu dan sekitarnya saat itu memperoleh suplai tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga disel (PLTD) Silae.

Kekurangan daya listrik dari PLTD Silae tersebut yang menyebabkan banyaknya investeor yang mengeluh, khususnya investor yang bergerak dibidang industri yang tersebar di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, sehingga banyak juga investor yang mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah. Akibatnya pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan daerah. Selain itu, akibat tidak tersedianya tenaga listrik yang memadai, banyak investor yang meninggalkan wilayah Sulawesi Tengah (Kompas, 20 April 1995). Untuk itu, pemerintah daerah tetap berupaya membangun PLTA Palu-3 ini, karena adanya keinginan pemerintah untuk memacu investasi dan pembangunan dalam bidang industri besar, menengah, dan rumah tangga. Selain itu, tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai target program listrik masuk desa dan program pengentasan kemiskinan. Namun upaya pemerintah ini hingga saat ini belum terealisasikan untuk membngunnya.

Sektor industri merupakan salah satu faktor yang dapat memicu percepatan pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena dengan masuknya sektor industri dalam suatu masyarakat akan membawa dampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal yang sangat mudah dilihat dari masuknya industri adalah katerciptanya lapangan pekerjaan, namun selain

memberikan dampak yang positif bagi masyarakat masuknya sektor industri dalam suatu masyarakat pastinya juga akan membawa dampak yang negatif pula (Sidiq Baehaqi, 2014: 49). Pengembangan daerah tidak akan nampak jika tidak di tunjang oleh industrialisasi, dan industrialisasi tidak berjalan dengan optimal jika tidak ditunjang oleh energi listrik yang memadai.

Belum terealisasinya pembangunan PLTA Palu-3 di Danau Lindu hingga saat ini merupakan suatu polemik yang sangat menarik dan tajam antara berbagai pihak. Polemik tersebut berkembang antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat Lindu dan Lembaga Swadaya Masyarakat, antara PT PLN (Persero) dengan masyarakat secara umum karena peningkatan kebutuhan listrik, antara investor dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan Departemen Kehutanan dalam hal ini Taman Nasional Lore Lindu.

Sebenarnya hambatan paling besar datang dari Departemen Kehutanan, sebab jika proyek PLTA Palu-3 terlaksana, hambatan dari kehutanan ini disebabkan karena hanya memberikan sistem pinjam pakai kepada PT PLN. Oleh karena pemasangan pipa untuk turbin pembangkit akan berakibat besar pada rusaknya ekosistem di dalam Taman Nasional, yang pada saat ini pemerintah daerah belum mendapatkan izin tertulis dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk kegiatan pembangunan PLTA Palu-3.

Menurut Dirjen Perhubungan Hutan dan Pelestarian Alam, menilai proyek PLTA Lindu di Sulawesi tengah senilai Rp. 200 miliar tidak layak didirikan, karena bertentangan dengan fungsi zona pemanfaatan Taman Nasional, karena tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1990, yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lainnya dari taman nasional, serta belum adanya permohonan resmi dari Menteri Pertambangan dan Energi kepada Menteri Kehutanan untuk pembangunan PLTA Palu-3. Lebih lanjut Dirjen HPA mengemukakan bahwa pembangunan PLTA itu selain menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 terdapat sedikitnya empat dampak negative jika PLTA tetap dibangun antara lain tergenangnya lahan budidaya pertanian dan pemukiman penduduk yang akan menimbulkan dampak social-ekonomi. Penduduk yang terdesak akibat perluasan genangan air akan merambah masuk ke kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang berdampak pada rusaknya ekosistem Danau Lindu dan sekitarnya (*Bisnis Indonesia*, 30 November 1993).

Pada setiap kesempatan Gubernur Sulawesi Tengah pada waktu itu selalu mengemukakan bahwa masyarakat Lindu tidak akan dipindahkan dan mereka tetap mendiami wilayahnya. Akan tetapi, pernyataan gubernur tersebut sangat mustahil untuk terealisasi, sebab berdasarkan Amdal 3 titik batas air naik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh turbin pembangkit listrik adalah 100 sampai dengan 200 meter, selain itu ada lagi yang disebut dengan sabuk hijau, dan dalam wilayah sabuk hijau ini tidak boleh ada kegiatan apapun dari masyarakat dan apalagi hunian masyarakat. Pemerintah daerah tidak mempunyai konsistensi janji yang diucapkan pada masyarakat, karena tidak melakukan perubahan atas Amdal 3.

Simpulan

Karena Masyarakat adat Lindu diabaikan dalam perencanaan pembangunan PLTA Palu-3, dimana masyarakat sama sekali tidak dilibatkan sejak perencanaan, studi kelayakan hingga keluarnya Amdal 1 dan 2 hingga Amdal 3, terlebih Amdal 3 yang menjadi polemik antara masyarakat adat Lindu dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan eksistensi budaya dan wilayahnya dengan cara menolak pembangunan PLTA Palu-3 di Danau Lindu, dimana Danau ini diyakini masyarakat adat Lindu sebagai warisan dari leluhur mereka yaitu Mardindo yang menjadi simbol perlawanan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah mengabaikan pengetahuan masyarakat (*local knowledge*).

Bentuk perlawanan masyarakat adat Lindu terhadap rencana pembangunan PLTA Palu-3 jika dikaji dari teori resistensi oleh Scott (1990), adalah resistensi terhadap kelompok dominan dalam bentuk petisi dan pemboikotan. Selain itu, resistensinya yang dilakukan oleh masyarakat

adat Lindu adalah bentuk resistensi terhadap dominasi ideologi dengan membentuk ideologi tandingan (*counter ideology*), dan yang menjadi ideologi tandingan yang digunakan oleh masyarakat adat Lindu adalah mitologi kepemimpinan Maradindo (yang dianggap sebagai leluhur masyarakat). Selain perlawanan ideologi yang menyebabkan gagalnya pembangunan PLTA Palu-3 adalah persoalan administrasi yang tidak dapat disanggupi oleh pemerintah daerah (dalam hal ini PT PLN yaitu sistem pinjam pakai hutan Taman Nasional Lore-Lindu).

Saran

Disarankan kepada berbagai pihak: *pertama*, dalam setiap perencanaan pembangunan seyogyanya dimusyawarahkan secara terbuka dengan masyarakat yang menjadi objek pembangunan. *Kedua*, dalam perencanaan pembangunan perlu mempelajari secara mendalam dan saksama tentang kehidupan sosial budaya masyarakat bersangkutan. *Ketiga*, dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada masyarakat pedesaan seyogyanya memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, terutama pada kelompok masyarakat yang masih menjalankan adat istiadatnya secara ketat dan baik dan mempunyai tokoh simbolik yang masih kuat.

Referensi/Daftar Pustaka

- Baehaqi, Sidiq. 2014. Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit pada Perubahan Sosial Masyarakat Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. *eJournal Sosiologi*, 2014, 2 (4): 39-50.
- Bisnis Indonesia*, 30 Nopember 1993.
- Boty, Middy. 2015. Agama dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama). *Istinbath/No.15/Th. XIV/Juni/2015/35-50*.
- Colleta, N.J., dan Kayam, U. (penyunting). 1987. *Kebudayaan dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dove, M.R, (penyunting). 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Foster, GM. 1973. *Traditional Societies and Technological Change*, second edition. New York, Evantos, San Fransisco, London: Harper dan Row, Publishers.
- Haviland, W.A. 1998. *Antropologi*, edisi keempat, Jilid 2, alih bahasa R.G. Soekadijo. Jakarta: Erlangga.
- Kompas*, 20 April 1995.
- Kurnia, Novianti. 2013. Kebudayaan, Perubahan Sosial, dan Agama dalam Perspektif Antropologi. *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 12 (2). 8-20.
- Lailiy, Muthmainnah Dkk. 2020. Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*. Vol. 30 (1), 23-45.
- PT PLN Persero, 1996, Dokumen Amdal-3, RKL dan RPL Pembangunan PLTA Palu-3.
- Scott, J.C. 1990. *Domination and the Arts of Resistance, Hidden Transcripts*. New Hahen and London: Yale University Press.
- Spradley, J.P. 1997. *Metodologi Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wahyudi, Agus. 2013. Dari Moral ke Ekonomi: Memahami Akar dari Bentuk Penundukan dan Penindasan. *Jurnal Filsafat*. Vol. 23 (3), 175-185.



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Halaman 18-27



Pembentukan Keterampilan Sosial di Rumah Pemberdayaan Aulia Qolbu Cilegon

Rizki Setiawan

Jurusan Pendidikan Sosiologi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Eti Komalasari

Jurusan Pendidikan Sosiologi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

| Kata Kunci | Abstrak |
|---------------------|---|
| Keterampilan Sosial | Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan keterampilan sosial yang didapatkan di Rumah Pemberdayaan Aulia Qolbu. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan sesuai fakta di lapangan. Penelitian berlokasi di Rumah Pemberdayaan Yayasan Aulia Qolbu Kota Cilegon, Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori kapital sosial : (1) jaringan sosial terbentuk dengan adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh yayasan (2) nilai dan norma berkaitan erat dengan proses keagamaan (3) kepercayaan lahir lantaran adanya rasa saling memiliki dan menghargai. Konklusi temuan penelitian ialah bahwa keterampilan sosial berkembang ketika anak mampu beradaptasi di lingkungan sosial yang baru. |
| Kapital Sosial | |
| Rumah Pemberdayaan | |
| Diterima | 25 Maret 2020 |
| Review | 4 April 2020 |
| Revisi | 24 April 2020 |
| Penerimaan | 30 April 2020 |
| Copyedit | 15-26 Juni 2020 |
| Publikasi | 30 Juni 2020 |



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Pages 18-27



Social Skills Development at Rumah Pemberdayaan Aulia Qolbu Cilegon

Rizki Setiawan

Jurusan Pendidikan Sosiologi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Eti Komalasari

Jurusan Pendidikan Sosiologi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

| Keywords | Abstract |
|--------------------|--|
| Social Skills | This study intends to describe the social skills acquired at the Aulia Qolbu Empowerment House. The research method used is descriptive qualitative describing according to facts in the field. The research is located at the Aulia Qolbu Foundation Empowerment House Cilegon City, Banten. The results showed that based on social capital theory: (1) social networks are formed by routine activities carried out by foundations (2) values and norms are closely related to religious processes (3) beliefs are born because of a sense of belonging and respect. The conclusion of the research findings is that social skills develop when children are able to adapt in the new social environment. |
| Social Capital | |
| Empowerment House | |
| Submission | 25 Maret 2020 |
| Review | 4 April 2020 |
| Revision | 24 April 2020 |
| Acceptance | 30 April 2020 |
| Copyediting | 15-26 Juni 2020 |
| Publication | 30 Juni 2020 |

Pendahuluan

Anak merupakan hadiah Tuhan yang lahir berdasarkan ketentuan nasib yang sudah digariskan. Mereka akan tumbuh beragam sesuai dengan kemampuan keluarga dalam menyediakan fasilitas dan kebutuhan hidup. Hal ini seiring dengan konsideran Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memaknai anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat yang melekat dalam diri anak sebagai manusia seutuhnya. Sementara KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mendefinisikan anak sebagai keturunan kedua.

Untuk itu, keluarga sebagai institusi dasar berusaha memberikan proses terbaik di setiap fase perkembangannya. Proses tersebut tidak terlepas dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, di mana anak yang lahir dari keluarga menengah atas memiliki faktor keberuntungan sendiri. Kondisi di Provinsi Banten sendiri masih terdapat 654.46 ribu keluarga miskin dari total 12.9 juta populasi di tahun 2019 (BPS Provinsi Banten, 2020). Hal itu mengindikasikan masih terdapatnya ketimpangan sosial dalam tatanan masyarakat. Kondisi demikian merupakan permasalahan sosial yang akan melahirkan permasalahan-permasalahan baru seperti pengangguran, anak terlantar dan ketidaksejahteraan anggota keluarga. Anak-anak menjadi korban dari adanya kemiskinan. Meski dalam UU RI 1945 pasal 34 ayat (1) telah menyatakan bahwa anak terlantar dan fakir miskin dilindungi negara, secara empiris negara belum sepenuhnya mampu mengatasinya (Syahra, A., & Mulati, 2018:4). Sebagaimana ditunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 12.000 anak jalanan yang tersebar di Indonesia (BPS Provinsi Banten, 2019) dan 1.60 persen diantaranya adalah anak usia 5-17 tahun (Profil Anak Indonesia, 2019).

Lembaga sosial yang mendukung perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat hadir memberikan sumbangsih sukarela sebagai wujud kepekaan sosial. Berdasarkan prinsip kemanusiaan dan menjadikan anak-anak kurang beruntung menjadi berdaya sejalan dengan visi dan misi organisasi. Rumah pemberdayaan Yayasan Aulia Qolbu, menjadi salah satu lembaga yang memelopori kepedulian terhadap anak-anak yatim. Kesadaran sosial mengenai betapa pentingnya anak sebagai penerus bangsa menjadi landasan utama yayasan ini bergerak. Untuk itu, pelayanan diberikan secara maksimal agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Proses pemahaman nilai dan norma menjadi sosialisasi pertama anak di lingkungan tersebut. Mereka akan belajar perihal bagaimana bertahan dengan unsur-unsur sosial yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Saffer (dalam Nainggolan, 2002) menemukan bahwa anak-anak panti asuhan memiliki ketidakmatangan sosial dan umumnya mereka mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Anak-anak panti asuhan cenderung kaku dalam menjalin relasi sosial dengan orang lain. Selanjutnya, Hurriyati (2014) mengungkapkan bahwa dalam proses sosial anak di panti asuhan terdapat permasalahan yang berkaitan dengan proses adaptasi dan interaksi di lingkungan baik itu penilaian dari masyarakat yang menimbulkan ketidaknyamanan sehingga proses sosial menjadi terganggu. Pendapat anak itu tidak terbatas di dalam rumah tangga, tetapi juga di dalam masyarakat. Tentu saja hak partisipasi ini disesuaikan dengan usia dan tingkat kematangan anak (Kiranantika, A., Natalia, R., & Kumala, M. R, 2018).

Sejalan dengan itu, posisi penelitian ini mendukung argumentasi bahwa keterampilan sosial dibutuhkan anak sebagai bagian dari kapital sosial dalam melakukan aktivitas di yayasan maupun lingkungan sosial lainnya. Sementara tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan proses terbentuknya keterampilan sosial individu di Rumah Pemberdayaan Aulia Qolbu Cilegon melalui proses sosialisasi dalam keseharian.

Kajian Literatur

Keterampilan sosial merupakan seperangkat kemampuan yang diharapkan dapat membantu individu dalam berinteraksi dengan orang lain di dalam masyarakat. Kapabilitas ini bersandar pada norma sosial dan dengannya menginformasikan bagaimana individu bersikap dan berperilaku "normal" sebagaimana harapan masyarakat di lingkungan dan setting sosial tertentu. Singkatnya, keterampilan sosial ini penting bagi individu karena dengannya ia dapat

memprediksi apa yang diharapkan oleh masyarakat ataupun individu yang menjadi rekan dalam jalinan relasi sosial dan interaksi sosial tertentu dengan harapan terjadi interaksi yang harmonis. Individu yang memiliki keterampilan sosial yang berkembang baik pada umumnya dipandang oleh orang lain dalam masyarakat mereka sebagai orang yang kompeten dan sukses. Mereka juga cenderung disukai oleh orang lain, sementara mereka yang berjuang untuk menguasai keterampilan sosial sering dipandang oleh masyarakat sebagai individu yang tidak kompeten. Kegagalan untuk belajar keterampilan sosial yang memadai dapat menyebabkan isolasi, perasaan kesepian, frustrasi, penolakan, dan harga diri yang buruk (Patrick, N. J. 2008:42).

Keterampilan sosial juga berperan penting di tempat kerja. Seperti pada profesi guru, pewartawara, dokter dan perawat, manajer dan penyelia, polisi, dan untuk banyak pekerjaan lain yang berkaitan dengan interaksi dengan individu lain ataupun komunitas secara langsung. Individu dengan keterampilan sosial yang efektif lebih mungkin berhasil di tempat kerja, murid yang diajar belajar lebih banyak, pasien yang ditangani dapat pulih lebih cepat, bawahan dalam pekerjaan lebih bahagia dan bekerja lebih keras, pidato atau ceramah mereka lebih diterima masyarakat dengan baik, dan secara umum mereka lebih sukses. Sebaliknya, orang-orang dengan keterampilan sosial sehari-hari yang tidak memadai menjadi gelisah dan tertekan, mungkin menjadi pasien, merasa lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau lebih sulit untuk bekerja sama dengan sukses dengan orang lain di tempat kerja, dan mungkin kehilangan pekerjaan mereka Hutchings, S., Comins, J. and Offiler, J. (1999: v).

Hutchings, dkk (1999:5) juga mengutarakan bahwa meskipun terdapat berbagai definisi keterampilan sosial, parameter kompetensi sosial tetap sulit dipahami. Inti kompetensi sosial ialah sintesis keterampilan, pengetahuan dan sikap, yang memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan kinerja sosial dengan konteks yang berbeda. Fakta bahwa konsep ini tetap sulit untuk digaribawahi menyoroti keunikan keterampilan dan pengalaman sosial individu itu sendiri. Karena tidak realistis dan tidak diperlukan bagi individu untuk senantiasa kompeten secara sosial dalam setiap situasi sosial. Variabel seperti pengaturan, waktu hari dan orang lain dapat secara signifikan mempengaruhi cara individu dalam merespons interaksi sosial di sekitar.

Secara sosiologis, studi mengenai keterampilan sosial ini lebih sering terkait dengan kapital sosial. Karena keterampilan sosial menjadi basis individu dalam memahami: (i) bagaimana nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat dapat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya; (ii) bagaimana individu dalam membangun trust dari anggota masyarakat lain ataupun komunitas, yang bergantung pada kemampuan individu menyikapi nilai dan norma dalam tindakan sosial, dan; (iii) bagaimana individu kemudian menjalin relasi sosial dengan membangun jejaring sosial.

Dalam lingkup komunitas, kapital sosial memiliki fungsi positif. Sebagaimana Rohimah, I. S., Hufad, A., & Wilodati (2019:19) yang menemukan bahwa kapital sosial dalam tradisi Rarangkén memudahkan masyarakat desa dalam aktivitas pembangunan maupun secara komunal menyelesaikan masalah yang muncul. Kapital sosial yang terbangun dalam tradisi melalui intensitas aktivitas komunal telah menjadi pelumas terjalannya kerjasama dan ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat. Sementara mengenai relasi antara manusia dengan alam, Setiawan (2019: 98) mengungkapkan bahwa pembelajaran sosial atas kearifan lokal berpotensi mempererat relasi individu dan sosial dengan lingkungan dengan peningkatan pemahaman individu yang lebih dalam atas aktivitas dan gejala alamiah lingkungannya.

Penelitian mengenai ketrampilan sosial banyak dilakukan terhadap individu dengan kebutuhan khusus, namun jarang dilakukan terhadap individu dengan kondisi sosial keluarga tidak lengkap maupun pada individu yang berada dalam lapisan bawah stratifikasi sosial. Dengan demikian penelitian ini penting, karena akan melihat proses bagaimana lembaga sosial membangun keterampilan sosial pada individu, dimana individu tersebut memiliki anggota keluarga yang tidak lengkap (yatim, piatu ataupun yatim piatu), maupun individu yang rentan di masyarakat karena posisi ekonominya berada di lapis bawah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini yang paling sederhana karena hanya memaparkan hasil penelitian tanpa melakukan apa pun terhadap objek yang diteliti (Arikunto, 2010:114). Metode ini bertujuan membuat deskripsi tulisan yang sistematis berdasarkan fakta (Darmadi, 2014:185). Beberapa sumber buku, jurnal dan yang lainnya dijadikan sebagai data pelengkap untuk menyusun tulisan ini. Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan tiga informan yang merupakan pengurus rumah pemberdayaan yayasan Aulia Qolbu. Hasil yang didapatkan berupa data primer sebagai data pertama yang diperoleh langsung melalui proses wawancara. Berikutnya data sekunder yang didapatkan melalui proses wawancara tidak langsung yakni melalui media WhatsApp namun mendukung hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (Bungin, 2003:69) yang meliputi tiga unsur; (1) reduksi data; (2) penyajian data, dan; (3) penarikan kesimpulan. Penelitian ini menanyakan serangkaian hal terkait dengan keterampilan sosial di rumah pemberdayaan Aulia Qolbu kepada informan. Pada tahap reduksi data, dilakukan kategorisasi data maupun merangkum data hasil penelitian mengenai keterampilan sosial di rumah pemberdayaan Aulia Qolbu berdasarkan data yang diperoleh melalui proses wawancara baik yang dilakukan secara langsung ke rumah pemberdayaan Aulia Qolbu, maupun menggunakan media sosial WhatsApp. Pertanyaan tersebut terbagi menjadi tiga bagian yakni; (1) pertanyaan awal yaitu yang berkaitan dengan latar belakang pembentukan yayasan, (2) pertanyaan inti yaitu, yang berkaitan dengan keterampilan sosial dan proses sosial yang terjadi di lingkungan rumah pemberdayaan, (3) pertanyaan penutup, yang berisi mengenai harapan maupun kesimpulan dari informan terkait dengan adanya rumah pemberdayaan ini dalam membentuk keterampilan sosial anak. Selanjutnya dilakukan rekonstruksi data agar temuan dapat disajikan dengan sistematis, sehingga dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan pada langkah terakhir penulisan artikel ini.

Temuan dan Pembahasan

Pemberdayaan Anak sebagai Proses Pendidikan

Anak merupakan bagian dari anggota keluarga yang memiliki tahapan perkembangan khusus. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi baik dari faktor intrinsik (biologis, keturunan) maupun faktor ekstrinsik (psikis sosial, ekonomi dan lingkungan) mereka membutuhkan peran orang tua dalam mengajarkan kemandirian, motivasi dan memberi kesempatan agar dapat berkembang dengan sempurna (Winarno, 2012).

Hubungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan psikis maupun sosial anak. Prosesnya, anak dengan sendirinya mempelajari proses penyesuaian diri di lingkungan sosialnya (Mohammad, A., & Asrori, M. 2014:93). Seperti yang diungkapkan informan A melalui wawancara langsung:

“setiap anak memang memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada yang mudah diatur, tapi ada juga yang susah. Mereka menyesuaikan diri dengan kegiatan yang ada di rumah pemberdayaan ini juga membagi waktu dengan kegiatannya di rumah.” (Hasil wawancara, 25 Februari 2020).

Pendidikan sangat penting dalam menunjang keberhasilannya. Peran pendidikan itu yang memungkinkan bertambahnya potensi manusia (Tirtarahardja, U., & La Sulo, S. L. 2012:303). Untuk itu, pemberian pelatihan keterampilan bagi anak haruslah dilakukan sebagai upaya pemberdayaan anak agar memiliki bekal di masa depan.

Namun sulit sekali status ini didapatkan lantaran tingkat kemiskinan keluarga mengalami ketimpangan sosial. Hingga masih ditemukan anak di bawah umur menjadi buruh dan tenaga

kasar tanpa skill dan pengetahuan yang memadai sebagai usaha diri untuk mempertahankan hidup. Mereka terdehumanisasi oleh keadaan sosial yang mengharuskannya hidup tidak sebagaimana mestinya anak-anak (Tjandraningsih dkk, 1996). Lahirnya lembaga sosial membantu dalam mengatasi masalah di atas. Anak memiliki perlindungan khusus seperti komnas anak, lembaga perlindungan anak, panti asuhan, rumah singgah dan lembaga pemberdayaan lainnya.

Pemberdayaan mengharuskan setiap komponen meningkatkan kepedulian, sehingga konsep pemberdayaan yang tepat adalah *community based* (Martono, 2012:263). Lembaga harus mampu memberdayakan masyarakat miskin melalui pendekatan lapangan. Proses ini dijadikan strategi pembangunan sosial yang menjadikan manusia sebagai subjek (Hatu, 2010:241).

Konsep pembangunan harus partisipatif. Dengan mempertimbangkan berbagai unsur yaitu meningkatkan peran masyarakat, orientasi pemahaman masyarakat dan peran pemerintah (Hadi, 2010). Secara tidak langsung menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai inti demokrasi di mana masyarakat sebagai subjek yang otonom aktif dan berpartisipasi (Setiawan, 2017). Pemberdayaan yang layak untuk anak-anak adalah pemberian pelatihan keterampilan. Bagi anak yang tumbuh di lembaga sosial mereka memiliki kesempatan untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan bakatnya. Hal itu seperti yang diungkapkan informan A bahwa :

“Rumah pemberdayaan ini memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak binaan, pelatihan itu untuk memberikan keterampilan yang insya Allah berguna di masa depan.” (Hasil wawancara, 25 Februari 2020).

Rumah pemberdayaan anak yatim piatu dan dhuafa Aulia Qolbu menampung minat dan bakat anak-anak binaannya. Lembaga ini lahir dari kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bentuk pemberdayaan sosio budaya, yang bertujuan mendayakan kemampuan masyarakat (Jamaludin, 2016:148). Pendidikan non formal di lembaga ini dapat membantu meningkatkan kesadaran kritis (Khalifatullah dkk, 2017:242).

Yayasan Aulia Qolbu merupakan yayasan non panti, sehingga aktivitas sehari-hari mereka masih di lingkungan keluarga maupun wali. Anak-anak binaan yayasan merupakan hasil pendataan dan seleksi yang dilakukan di empat titik desa berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Mulai dari anak yang tidak mempunyai orang tua utuh (yatim-piatu, yatim, piatu) serta anak dari golongan keluarga tidak mampu.

Kendati demikian, kehadirannya dapat mengantisipasi terjadinya anak-anak terlantar dan dehumanisasi anak bekerja di bawah umur. Yayasan Aulia Qolbu lahir sebagai usaha pemberdayaan kepada anak-anak yatim dan dhuafa. Awalnya, kegiatan ini bermula dari kepedulian komunitas yatim yang melakukan kegiatan sosial berbagi nasi kotak di jalanan setiap hari Jumat. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan B dalam wawancara melalui Whatsapp:

“latar belakang adanya yayasan ini karena adanya kepedulian terhadap anak yatim. Jadi, dulu sebelum yayasan ini berdiri setiap hari Jumat itu pengurus turun ke jalanan untuk berbagi nasi box. Alhamdulillah sekarang jumlah anak binaan sudah 108 anak (74 perempuan dan 34 laki-laki).” (Hasil wawancara, 2 Maret 2020).

Keberadaan yayasan ini membantu anak-anak dalam mengembangkan bakatnya dengan menyediakan ruang sosial bagi anak untuk berekspresi sehingga rasa percaya diri mereka meningkat. Hal tersebut membuat anak memahami tentang pentingnya keterampilan diri untuk menunjang hidup mereka di kemudian hari. Sehingga dapat dikatakan, kapital sosial sangat diperlukan bagi mereka.

Proses pembelajaran menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap akhir pekan. Tujuannya adalah membentuk bakat dan kreativitas anak binaan sesuai dengan yang diharapkan. Pengembangan kreatifitas perlu dikembangkan sejak dini karena dengan ini

anak dapat mengaktualisasikan dirinya, membantu anak untuk menyelesaikan masalah dan menjadi penghargaan diri seorang anak (Munandar, 2012). Hal ini selaras dengan tanggapan dari informan C melalui WhatsApp:

“iya, mbak. Karena ini non panti jadi anak-anak nggak nginep. Kegiatan rutin biasanya malam sabtu dan full hari Minggu. Itu, pun kadang hari Minggu ada kegiatan lain seperti kunjungan para donatur.” (Hasil wawancara, 2 Maret 2020).

Pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Untuk itu, proses yang membutuhkan penalaran dan menuntaskan keingintahuan tidak dapat dipisahkan dari anak. Sedang sosiolog fungsional Durkheim menyatakan seluruh pendidikan adalah pendidikan moral (Hidayat, 2016:119).

Dalam yayasan ini moral atau akhlak menjadi salah satu tujuan pemberdayaan anak, moral diklaim sebagai posisi paling luhur yang harus dimiliki setiap manusia. Moral akan menjadi panduan bagi anak binaan dalam menentukan baik buruknya tindakan, yang pada akhirnya akan mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma di lingkungan mereka berada. Secara praktis, pembentukan moral ini dilakukan dalam aktivitas rutin seperti istighosah, doa bersama dan marawis setiap Sabtu malam.

Keterampilan Sosial pada Rumah Pemberdayaan Aulia Qolbu

Keterampilan sosial merupakan perilaku sosial yang diperoleh individu melalui sebuah proses belajar yang berlangsung dalam lingkungan sosialnya. Kemampuan tersebut akan terlihat dalam tindakan baik itu berupa mampu mempelajari hal baru dan menyelesaikan masalah serta memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dan beradaptasi di lingkungan masyarakat (Maryani, E., & Syamsudin, H., 2009 : 6). Keterampilan sosial yang dibentuk dalam rumah pemberdayaan Aulia Qolbu dapat dirumuskan melalui teori kapital sosial.

Kapital sosial muncul dari pemikiran bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka membutuhkan suatu kegiatan bersama yang membentuk hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Bourdieu mendefinisikan kapital sosial sumberdaya yang terkait dengan jaringan sosial. Sedang bagi Putnam membagi kapital sosial dalam tiga kriteria yaitu, jaringan (*network*), nilai dan norma (*value and norm*) dan kepercayaan (*trust*). Kapital sosial pada akhirnya memperkuat kesepakatan tentang urgensi pemberdayaan masyarakat (Syahra, 2003:3).

Kapital sosial juga dipahami sebagai pengetahuan komunitas yang melakukan pola hubungan kegiatan yang produktif (Maryani, E., & Syamsudin, H., 2009:6), kapital sosial mengakodinin nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk menyelaraskan kegiatan berdasarkan kepercayaan, jaringan norma dan kerja sama antar masyarakat (Anwar, 2013:59). Kontribusi penting kapital sosial yaitu terciptanya masyarakat yang mandiri dan terciptanya pemerintahan yang baik (Fathy, 2019:10).

Kapital sosial dapat terbentuk di lembaga maupun struktur masyarakat. Yang didasarkan atas kegiatan bersama yang memberikan nilai positif. Dari kapital sosial juga dapat terlihat jelas bagaimana bentuk pemberdayaan yang ada di dalamnya. Komponen dalam kapital sosial yaitu jaringan sosial, nilai dan norma, kepercayaan. Keterampilan sosial yang ada di yayasan Aulia Qolbu dengan teori kapital sosial di bawah ini :

a. Jaringan Sosial (*social network*)

Jaringan ini terbentuk melalui proses sosial anak, baik dengan teman maupun dengan pengasuh. Jaringan sosial sangat penting karena sebagai pusat koordinasi yang mengatur aktivitas maupun kegiatan sehari-hari di yayasan. Bagi anak binaan, jaringan sosial terbentuk dengan adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh yayasan. Kegiatan tersebut yaitu istighosah dan doa bersama, olahraga pagi, bersih-bersih, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan

komputer, pelatihan pencak silat dan pelatihan qori marawis. Secara tidak langsung proses tersebut melahirkan keterampilan sosial bagi anak binaan serta menguatkan jaringan sosial antara pengurus dan anak binaan. Dimulai dari hari Sabtu sampai hari Minggu yang merupakan jadwal intens mereka dalam berinteraksi.

Selain itu, terdapat kegiatan lain seperti pentas seni, *event* lomba, kunjungan dontur, cek kesehatan, penyaluran sembako bulanan kepada wali yatim dan penyaluran bantuan kepada korban bencana alam. Kegiatan ini diikuti dengan antusias baik oleh anak binaan maupun warga sekitar, yang pada gilirannya dapat mempererat jaringan sosial yayasan dengan masyarakat sehingga terdapat pemberdayaan yang partisipatif yang meningkatkan peran masyarakat serta peran pemerintah (Hadi, 2010).

b. Nilai dan norma (*value and norm*)

Nilai dan norma yang terdapat di lingkungan yayasan secara implisit tercermin dalam kegiatan sehari-harinya. Beberapa diantaranya berkaitan erat dengan proses keagamaan seperti kegiatan qori dan marawis, tadarus Quran serta kegiatan rutin di malam Minggu yaitu istighosah dan doa bersama. Hal itu tersirat namun sesuai dengan visi dan misi yayasan untuk membentuk anak binaan yang berakhlak sesuai dengan agama yang dianut. Dengan kata lain, nilai dan norma yang dibangun dalam yayasan ialah nilai dan norma yang berbasiskan ajaran agama, yang dalam hal ini secara khusus ialah agama Islam. Sementara nilai dan norma lokal dibangun melalui aktivitas bersama yang rutin dan berkelanjutan antara anggota yayasan dengan masyarakat sekitar. Dengan aktivitas ini mereka secara tidak langsung menjalankan pembelajaran sosial dalam memahami nilai dan norma secara alamiah melalui interaksi sosial langsung.

Namun begitu secara teknis, lantaran proses pembangunan belum selesai sepenuhnya maka muncul kesulitan ketika mereka menginap di yayasan. Fasilitas yang tersedia sekarang ini belum mampu menampung anak binaan. Guna menjaga nilai dan norma, pengasuh dengan beragam cara dan upaya berusaha mengatur posisi anak binaan agar antara laki-laki dan perempuan tetap terpisah.

c. Kepercayaan (*trust*)

Anak-anak binaan dihadapkan dengan proses sosialisasi di lingkungannya, dimana mereka beradaptasi dalam setiap aktivitas di luar rumah masing-masing. Dalam prosesnya, mereka dapat menerima dengan baik dan mengikuti kegiatan yang ada. Beberapa kendala biasanya muncul apabila sesama anak berkonflik kecil mengingat usia mereka tidak begitu jauh. Hal ini yang membentuk kepercayaan anak-anak binaan antar sesamanya.

Kesulitan lainnya yang dihadapi adalah mengenai karakter dan sikap anak binaan. Lantaran berasal dari kondisi keluarga yang beragam, anak binaan terkadang sulit untuk dikoordinasikan. Untuk usia 9 tahun ketas anak biasanya sudah melekat keseharian sosialnya dari rumah sehingga anak binaan tersebut harus menyesuaikan diri lagi di yayasan.

Mereka beradaptasi untuk saling percaya di lingkungan tersebut sehingga yang mereka dapatkan adalah rasa saling memiliki dan menghargai. proses penyesuaian sebagai bentuk keterampilan sosial anak dalam menumbuhkan kepercayaan diri sehingga mereka dapat bertahan di yayasan. Selain itu, anak-anak juga memberikan kepercayaannya kepada pengasuh seperti dalam mengerjakan tugas sekolah mereka. Di lain hal, kepercayaan juga terbentuk dari wali anak binaan, mereka menitipkan saudara maupun anaknya untuk diasuh yayasan tersebut.

Beberapa unsur dari kapital sosial di atas merupakan bagian dari keterampilan sosial yang dimiliki anak dalam menjani aktivitas diluar kesehariannya. Mereka memiliki kemampuan dalam membagi waktu antara kegiatan dari yayasan, rumah maupun tugas sekolah. Keterampilan sosial ini membawa anak-anak pada kemandirian belajar sehingga anak hanya perlu berinteraksi dan berkomunikasi lebih baik lagi agar keterampilan sosial yang dimiliki dapat seirama dengan kebutuhan yang ada. Sosiologi mendefinisikan komunikasi sebagai proses memaknai (Bungin, 2017:57). Dalam pemaknaan ini, anak menjadikan lingkungan

sekitar sebagai sumber belajar yang secara fungsional dapat membantu optimalisasi keterampilan dan hasil belajar (Sanjaya, 2017: 228).

Simpulan

Keterampilan sosial di rumah pemberdayaan Aulia Qolbu dapat terbentuk melalui proses sosialisasi di dalamnya. Berdasarkan teori kapital sosial keterampilan sosial dapat dibentuk dari jaringan sosial, nilai dan norma dan kepercayaan; (1) jaringan sosial terbentuk dengan adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh yayasan (2) nilai dan norma berkaitan erat dengan proses keagamaan (3) kepercayaan lahir lantaran adanya rasa saling memiliki dan menghargai. Berdasarkan kajian dengan teori tersebut maka dapat disimpulkan, keterampilan sosial tumbuh ketika anak mampu menyesuaikan unsur-unsur baru di lingkungan mereka hal ini juga tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti nilai dan norma, hubungan sosial dan rasa kepercayaan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (BPS Provinsi Banten). (2019). *Provinsi Banten dalam Angka 2018 Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan*. Retrieved 04/03/2020 from <https://banten.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (BPS Provinsi Banten). (2020). *Provinsi Banten dalam Angka 2020 Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan*. Retrieved 04/03/2020 from [Banten.bps.go.id](https://banten.bps.go.id).
- Bungin, Burhan. (2017). *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigm Dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. (2003). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja.
- Darmadi, H.. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17.
- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Retrived 1/06/2020 from <http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>.
- Hatu, Rauf A. (2010). *Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Studi Teoritis)*. Inovasi. Vol 7 No 4. Pp 240-254
- Hurriyati, B. D. (2014). Proses adaptasi dan interaksi sosial anak panti asuhan Putri Sinar Melati (IV) Berbah dengan lingkungan sekitar. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Hutchings, S. , Comins, J. and Offiler, J. (1999). *The Social Skills Handbook: Practical Activities for Social Communication*. Bicester: Winslow Press. Bicester: Winslow Press.
- Jamaludin, Nasrullah Adon. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. Retrieved 1/06/2020 from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2019). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: KPPPA.

- Khalifatullah, M., Setiawan, R., & Musahwi, M. (2017, May). Media Edukasi Kritis: Pendidikan Komunitas Rumah Dunia di Kota Serang. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 1, No. 2).
- Kiranantika, A., Natalia, R., & Kumala, M. R. (2018). Sosialisasi 3-Ends Pada Anak Dan Remaja Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 1(1), 1-9.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohammad, A., & Asrori, M. (2014). *Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Maryani, E. (2011). *Pengembangan Program Pembelajaran IPS untuk Peningkatan Keterampilan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Munandar, Utami. (2012). *Mengembangkan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nainggolan, T., & Koentjoro, M. (2002). Kompetensi Interpersonal Remaja Panti Asuhan Ditinjau dari Konsep Diri, Peran Jenis dan Jenis Kelamin (Doctoral dissertation, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada).
- Patrick, N. J. (2008). *Social Skills for Teenagers and Adults with Asperger Syndrome: A Practical Guide to Day-to-Day Life*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Rohimah, I. S., Hufad, A., & Wilodati. (2019). The analysis of the loss of Rarangén tradition: (a phenomenology study of the society of Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 15-23. Retrieved from <https://ap3si.org/ojs/index.php/ijsted/article/view/10>
- Sanjaya, Wina. (2017). *Perencanaan dan Desain System Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, R. (2017). Menjadikan Kesejahteraan sebagai Isu Inti Demokrasi. *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*, 2(1), 110-115.
- Setiawan, R. (2019, November). Membangun Kembali Pembelajaran Sosial Kearifan Lokal sebagai Upaya Preventif Bencana. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 94-101). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.624>
- Syakra, A., & Mulati (2018). Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 97-119.
- Syakra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1-22.
- Tirtarahardja, U., & La Sulo, S. L. (2012). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjandraningsih, dkk.(1996). *Dehumanisasi Anak Marjinal. Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Winarno. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak*. Bandung: Platinum.



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Halaman 28-41



Penyesuaian Diri Peserta Didik pasca Penerapan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura

Nana Tri Sutisna
Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Nurhadi
Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

| Kata Kunci | Abstrak |
|-------------------|---|
| Liminalitas | Sistem zonasi yang menerima peserta didik berdasarkan radius tempat tinggal dengan sekolah, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang berbeda dengan sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan ketidaksesuaian peserta didik dengan lingkungan SMA Negeri 1 Kartasura pasca diterapkannya sistem zonasi sehingga mendorong peserta didik untuk melakukan penyesuaian diri dalam sebuah ritus peralihan dengan lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk menemukan data berdasarkan sudut pandang informan, yang mendalam, spesifik serta bersifat alamiah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap peserta didik yang dipilih secara <i>purposive sampling</i> dan diolah melalui alur penelitian maju bertahap serta triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan, dengan beragamnya karakter peserta didik yang diterima melalui PPDB zonasi menunjukkan ketidaksesuaian antar peserta didik dengan kultur sekolah mendorong terjadinya proses penyesuaian diri dalam sebuah ritus peralihan. Adapun proses ritus peralihan yang dilalui peserta didik terdiri dari: <i>Pertama</i> , tahap pemisahan dimana peserta didik mulai melepaskan kebiasaan lama ketika masih di SMP. <i>Kedua</i> , tahap liminalitas yaitu tahap ketika peserta didik mulai dikenalkan dengan kebudayaan baru dan berada di situasi yang ambigu dimana peserta didik belum terbiasa dengan kebiasaan baru, namun peserta didik juga sudah tidak melakukan kebiasaan lama. <i>Ketiga</i> , tahap penggabungan, dimana peserta didik mampu menerapkan kehidupan sesuai dengan kultur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. |
| Penyesuaian Diri | |
| Peserta Didik | |
| Ritus Peralihan | |
| Sistem Zonasi | |
| Diterima | 12 Mei 2020 |
| Review | 25 Mei 2020 |
| Revisi | 4 Juni 2020 |
| Penerimaan | 14 Juni 2020 |
| Copyedit | 15-26 Juni 2020 |
| Publikasi | 30 Juni 2020 |



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Pages 28-41



Students Adaptation Post-Zonation System Application at SMA Negeri 1 Kartasura

Nana Tri Sutisna
Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Nurhadi
Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

| Keywords | Abstract |
|--------------------|--|
| Adjusment | The zonation system that filters students' school registration based on the distance of the students' addresses to the school, it creates a different atmosphere of the school environment that is different from before. This research was explain the discrepancy of students' in adjusting to the new school environment in SMA Negeri 1 Kartasura after the zonation system was implemented. This research used a qualitative research method with an ethnographic approach to collect the data based on the participants' perspectives, which is deep, specific and natural. The research data were obtained through interviews with students who were selected by purposive sampling and processed through a developmental research sequence and triangulation of sources. The results showed with the diverse character of students received through by zonation system showed a mismatch between students with school culture encourages the process of adjustment in a rites of passage. The process of rites of passage through student consist of: <i>First</i> , the separation stage, when the students begin to break their old habits in junior high school. <i>Second</i> , the liminal stage, which is the stage when the students begin to be introduced to a new culture and are in an ambiguous situation when the students are not accustomed to the new habits, but they also do not do their past habits. <i>Third</i> , the reintegration stage when the students are able to apply life in accordance with culture and adapt to the school enviroentment. |
| Liminality | |
| Rites of Passage | |
| Student | |
| Zonation System | |
| Submission | 12 Mei 2020 |
| Review | 25 Mei 2020 |
| Revision | 4 Juni 2020 |
| Acceptance | 14 Juni 2020 |
| Copyediting | 15-26 Juni 2020 |
| Publication | 30 Juni 2020 |

Pendahuluan

Sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah yang sudah berjalan sejak tahun 2017 lalu, dimana kebijakan pendidikan ini diharapkan dapat menghapus penilaian masyarakat mengenai adanya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit (Nurlailiyah, 2019). Kebijakan sistem zonasi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat. Dalam Pasal 16 ayat (1 dan 2) sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat yang dimaksud berdasarkan pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB (Kemendikbud, 2018).

Penerapan sistem zonasi di sekolah memiliki dampak yang beragam bagi dunia pendidikan ataupun masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya, telah banyak ditemukan pengaruh dari dilaksanakannya sistem zonasi di Indonesia. Dalam sebuah penelitian, menyebutkan bahwa sistem zonasi diterapkan untuk sekolah – sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dilaksanakan sebagai bagian dari proses penerimaan peserta didik baru, dimana salah satu faktor pendukung peserta didik untuk sekolah ditentukan oleh jarak dari tempat tinggal ke sekolah terkait (Ula & Lestari, 2019). Sistem zonasi diterapkan pada seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau yang biasa dikenal dengan sekolah negeri. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2019, di Jawa Tengah, terdapat 20.192 sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat., dan salah satu sekolah negeri yang menerapkan sistem zonasi adalah SMA Negeri 1 Kartasura yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Penerapan sistem zonasi di sekolah mengundang reaksi yang beragam bagi dunia pendidikan ataupun masyarakat itu sendiri. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa sekolah zonasi merupakan salah satu program yang efektif dalam pemerataan pendidikan, dimana melalui program ini, sekolah dapat bersaing untuk kualitas yang baik dan tidak kalah dengan sekolah yang sudah dianggap favorit (Safarah & Wibowo, 2018). Sementara itu, beberapa penelitian juga menemukan dampak lain dari penerapan sistem zonasi, salah satunya menyebutkan bahwa pemerataan pendidikan akan sulit untuk dicapai karena kebijakan pemerataan yang dilakukan hanya dari segi peserta didik saja, padahal diperlukan juga pemerataan terhadap tenaga pengajar, tenaga administrasi hingga sarana dan prasarana sekolah (Hisbullah & Anam, 2019)

Sistem zonasi sekolah juga dapat ditemukan di belahan dunia lainnya dan memiliki dampak dan tujuan yang berbeda pula. Salah satunya di Amerika, dimana sistem zonasi pada sekolah berdampak pada munculnya kapitalisasi di dunia pendidikan dengan ditemukannya kenaikan harga akses pendidikan terutama di wilayah perumahan elit (Andreyeva & Patrick, 2017). Sementara itu, salah satu negara di Eropa yang juga menerapkan sistem zonasi yaitu Serbia menerapkan sistem zonasi di sekolah dengan tujuan untuk keteraturan lalu lintas, dimana dengan adanya sistem zonasi, keadaan lalu lintas akan semakin normal karena radius antara tempat tinggal dan sekolah terjangkau untuk berjalan kaki (Javremovic, Savic, & Janjic, 2019)

Pada penelitian sebelumnya, ditemukan dampak atas terselenggaranya sistem zonasi di sekolah, termasuk manajemen dan kebijakan pendidikan, bahkan muncul fenomena *cultural lag* yang disebabkan oleh kesenjangan pemahaman terhadap dunia digital dan pelaksanaan PPDB berbasis *online*. Penelitian ini memiliki perbedaan permasalahan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini membahas tentang proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh peserta didik dengan karakter yang beragam dalam hal kemampuan hingga kedisiplinan di lingkungan sekolah yang dianggap unggulan oleh masyarakat, proses penyesuaian diri menjadi fokus masalah dikarenakan pasca penerapan sistem zonasi, setiap sekolah akan menerima peserta didik yang homogen secara domisili namun heterogen dalam hal akademik dan karakternya, sehingga siswa akan dituntut untuk selalu mengimbangi satu sama lain, baik dalam hal akademik maupun lingkungan sosial.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengamati proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh peserta didik dalam menghadapi perbedaan tersebut melalui analisis ritus peralihan, yaitu sebuah fase transisi dalam ilmu antropologi bagi peserta didik yang melakukan penyesuaian diri. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis proses penyesuaian diri peserta didik pasca penerapan sistem zonasi terhadap kultur dan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Kartasura.

Kajian Literatur

Sistem zonasi bagi sekolah ini merupakan sesuatu yang baru dan dianggap berlawanan dengan prestasi sekolah. Dengan penerapan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura, tentunya menghadirkan dinamika baru yang merupakan bagian dari dampak sistem penerimaan tersebut. Salah satu permasalahannya yaitu berkaitan dengan penyesuaian diri pada aspek sosial dan proses pembelajaran peserta didik ketika di lingkungan sekolah. Setelah diterapkannya sistem zonasi sejak PPDB tahun 2018 lalu, peserta didik dianggap lebih heterogen dan suasana belajar di dalam kelas kurang optimal karena mayoritas peserta didik diterima karena radius tempat tinggalnya, bukan karena prestasi yang dimiliki. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik pada sistem zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura masih melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah yang lebih prestatif.

Penyesuaian diri dianggap sebagai sesuatu yang lazim terjadi pada seseorang dengan tujuan masing – masing, dan salah satunya adalah sebagai upaya pertahanan agar seseorang tersebut mampu hidup berdampingan dengan lingkungannya. Menurut Scheinders (1964) penyesuaian diri adalah suatu proses yang meliputi respon mental dan perilaku, dalam hal ini individu akan berusaha mengatasi ketegangan, frustrasi, kebutuhan, dan konflik yang berasal dari dalam dirinya dengan baik dan menghasilkan derajat kesesuaian antara tuntutan yang berasal dari dalam dirinya dengan dunia yang obyektif tempat individu hidup (Kusdiyati, Halimah, & Faisaludin, 2011).

Penyesuaian diri merupakan tahap dari proses perkembangan setiap manusia. Penyesuaian diri juga didefinisikan sebagai individu yang telah belajar bereaksi terhadap dirinya dan lingkungannya dengan cara – cara yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat, serta dapat mengatasi konflik mental, frustrasi, kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengembangkan perilaku simptomatik dan gangguan psikosomatik yang mengganggu tujuan-tujuan moral, sosial, agama dan pekerjaan (Ali & Asrori, 2005). Menurut Pritaningrum dan Hendriani, proses penyesuaian diri peserta didik disekolah didominasi oleh bentuk penyesuaian diri adaptif, dimana peserta didik akan berupaya untuk mengubah tingkah laku agar sesuai dan dapat diterima di kelompoknya (Pratiningrum & Hendriani, 2013). Proses penyesuaian diri juga menempatkan seseorang didalam sebuah proses peralihan dimana individu yang melakukan penyesuaian diri, mereka akan berupaya untuk memasuki lingkungan barunya dan secara bertahap meninggalkan lingkungan dan kebiasaan lamanya. Proses ini juga dikenal sebagai sebuah tahapan ritus peralihan. Pandangan ini dikemukakan oleh seorang antropolog bernama Arnold Van Gennep dan Victor Turner. Ritus peralihan berkaitan dengan proses transformasi warga masyarakat atau kelompok masyarakat kedalam keadaan baru seperti misalnya kehamilan, kelahiran, perkawinan, dan pemakaman, peralihan status ini kemudian diiringi dengan ritus untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan (Turner, 1966).

Menurut Van Gennep, dalam tahap pertumbuhan individu, manusia mengalami perubahan biologi hingga perubahan sosial budaya yang dapat mempengaruhi jiwa dan krisis mental, sehingga untuk menghadapi tahap pertumbuhannya yang baru, maka manusia akan memerlukan sebuah lingkaran yang bisa menciptakan “regenerasi” terhadap semangat kehidupan sosialnya (Koentjaraningrat, 1987). Arnold Van Gennep menyatakan bahwa semua ritus dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu perpisahan atau *separation*, peralihan atau *marge* dan integrasi kembali atau *agregation*. Victor Turner memperluas gagasan Van Gennep tentang prose peralihan atau *marge* menjadi sebuah “fase liminal” ritus peralihan yang lebih umum dan berlaku untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai fenomena sosial. Menurutnya, ritual sekarang dapat dilihat sebagai arena dimana perubahan sosial dapat muncul dan diserap kedalam praktek sosial. Liminal sendiri merupakan bagian dari

konsep ritual, merujuk pada sebuah kondisi yang terdapat pada suatu ritus peralihan atau *"rites of passage"* dimana terdapat disorientasi, ambiguitas, keterbukaan dan ketidakpastian (*indeterminacy*). Dalam ritus peralihan sendiri terjadi untuk menandai sebuah perubahan atau peralihan tempat, keadaan, kedudukan sosial atau status sosial, *personality value* atau identitas pribadi dan usia (Turner, 1966).

Penelitian ini membahas tentang proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh peserta didik di lingkungan sekolah pasca diterapkannya sistem zonasi. Proses penyesuaian diri menjadi sebuah fokus masalah dikarenakan pasca penerapan sistem zonasi, setiap sekolah akan menerima peserta didik yang homogen secara domisili namun heterogen dalam hal kemampuan dan karakternya, sehingga peserta didik akan dituntut untuk selalu mengimbangi satu sama lain, baik dalam hal akademik maupun lingkungan sosial dengan mengaitkan adanya proses penyesuaian diri peserta didik sebagai sebuah ritus peralihan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kartasura. Alasan dipilihnya sekolah tersebut adalah prestasi sekolah yang dibuktikan dengan akreditasi A, dan menjadi salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Sukoharjo. Dengan diterapkannya sistem zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura, hal ini mengancam status unggulan SMA Negeri 1 Kartasura, dimana sekolah ini tidak dapat menerima peserta didik berdasarkan prestasinya, dan berpengaruh kepada pola sekolah dalam mengatur peserta didik yang berasal dari metode seleksi yang berbeda dari sebelumnya. Informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu teknik menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, peneliti menetapkan peserta didik kelas X dan kelas XI dari program jurusan IPA, IPS dan IBB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu Wawancara dengan 24 peserta didik yang terdiri dari kelas X dan kelas XI dan mewakili setiap program jurusannya di setiap angkatan, Observasi terhadap lingkungan pembelajaran dan sosial di SMA Negeri 1 Kartasura serta pencatatan terhadap dokumentasi dan arsip yang mendukung mengenai data peserta didik setelah diterapkannya sistem zonasi. Berdasarkan metode etnografi yang dikemukakan oleh James P Spradley, penelitian ini disusun berdasarkan alur penelitian maju bertahap, dimana peneliti menerapkan langkah-langkah didalamnya yaitu: (1) Menetapkan informan, yang dipilih dari kelas X dan kelas XI (2) Mewawancari informan, sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dan lebih mengenal informan secara pribadi dan latar belakang (3) Mengajukan pertanyaan deskriptif, yaitu pertanyaan mengenai pengalaman informan dalam mengikuti PPDB zonasi dan penyesuaian diri di SMA Negeri 1 Kartasura (4) Analisis wacana etnografis, yaitu tahap validasi data antara wawancara yang sudah dilakukan peneliti (5) Menemukan tema budaya, berupa kebiasaan dan strategi informan untuk melewati proses penyesuaian diri hingga dapat dikatakan memiliki identitas baru sebagai siswa SMA Negeri 1 Kartasura (6) Menyusun hasil penelitian/tulisan etnografi (Spradley, 2006). Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu informan. Kedudukan informan sebagai narasumber dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari informan lainnya. Teknik ini dipilih untuk membangun data yang valid, dimana semakin banyak informan yang menyajikan data positif, maka data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang valid.

Hasil dan Pembahasan

SMA Negeri 1 Kartasura merupakan salah satu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah sekolah dengan status negeri dan menyelenggarakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada tahun 2020, program PPDB zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura sudah berjalan selama dua tahun pelajaran, yaitu pada tahun pelajaran 2018/2019 dan tahun pelajaran 2019/2020. Dalam dua tahun penyelenggaraannya, PPDB zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura memiliki perbedaan pada penyelenggaraan PPDB 2018/2019 dan PPDB 2019/2020. Pada PPDB zonasi 2018/2019 diterapkan berdasarkan tiga kategori yaitu peserta didik dalam zonasi yaitu yang termasuk kedalam zona terdekat

ke sekolah, peserta didik luar zonasi, yaitu peserta didik yang diterima berdasarkan jalur domisili karena alasan khusus, dan peserta didik miskin yang dinyatakan dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sementara itu pada PPDB zonasi 2019/2020 diterakpan zonasi domisili, dimana salah satu aspek yang menentukan diterimanya peserta didik melalui jalur zonasi adalah berdasarkan radius tempat tinggal dengan SMA Negeri 1 Kartasura, sistem zonasi pada tahun ajaran ini diselenggarakan dengan membagi wilayah zonasi domisili calon peserta didik berdasarkan hitungan kilometer (km),

Sistem Zonasi Tahun Pelajaran 2018/2019

Pelaksanaan sistem zonasi tahun pelajaran 2018/2019 di SMA Negeri 1 Kartasura merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018, dimana sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada zona sekolah, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang di terima. Domisili yang dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. SMA Negeri 1 Kartasura juga menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi, dan jalur karena alasan khusus sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Alasan khusus yang dimaksud meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial. Sementara itu, SMA Negeri 1 Kartasura juga melaksanakan program ramah sosial, yaitu menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan Diketahui Camat, atau bukti lain yang diterbitkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Adapun statistik peserta didik yang diterima di SMA Negeri 1 Kartasura yaitu, peserta didik berprestasi sebanyak 18 peserta didik, peserta didik miskin sebanyak 63 peserta didik, peserta didik yang berasal dari luar zona sebanyak 18 peserta didik, dan peserta didik yang diterima karena domisili alasan khusus sebanyak 1 peserta didik.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019, SMA Negeri 1 Kartasura, menyediakan kelas sebanyak 21 (dua puluh satu) terdiri dari jurusan IPA dengan penerimaan 180 peserta didik, jurusan IPS dengan penerimaan 180 peserta didik, serta jurusan Bahasa dengan penerimaan sebanyak 36 peserta didik. Adapun wilayah yang termasuk kedalam zonasi SMA Negeri 1 Kartasura, yaitu Wilayah Kabupaten Sukoharjo, untuk Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Wilayah Kabupaten Karanganyar untuk Kecamatan Colomadu, Wilayah Kabupaten Klaten untuk Kecamatan Delanggu, dan Wilayah Kota Surakarta untuk Kecamatan Laweyan.

Pada periode PPDB tahun pelajaran 2018/2019, berdasarkan proses pengambilan data yang telah dilakukan, peneliti menemukan kendala yang dialami peserta didik baru kaitannya dengan proses pengenalan terhadap lingkungan dan teman-teman di SMA Negeri 1 Kartasura. Kendala yang pertama terjadi mengenai perbedaan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Kartasura dengan SMP asal peserta didik, dimana pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura di rancang secara aktif dan inovatif serta menerapkan konsep *student center learning*. *Student Center Learning (SCL)* merupakan konsep pembelajaran dimana guru dan murid memiliki peran yang sama yaitu sebagai partisipn, dan partisipasn dituntut untuk sama-sama aktif berkomunikasi. *Student center learning* juga menuntut peserta didik untuk aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar (Wulandari, Naryosoc, & Rakhmad, 2013). Perbedaan tersebut dirasakan oleh peserta didik yang berasal dari SMP non unggulan dengan konsep pembelajaran *Teacher Center Learning (TCL)*, yaitu pembelajaran satu arah yang menempatkan guru sebagai sumber pengetahuan, dan mentransfer pengetahuan kepada peserta didik tanpa adanya timbal balik (Wulandari, Naryosoc, & Rakhmad, 2013). Pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura dirancang agar peserta didik dapat berfikir aktif dan inovatif serta mampu memahami materi belajar dengan baik. Ketidaksesuaian mengenai teknik pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura, dirasakan oleh informan AH, yang sebelumnya bersekolah di SMP swasta yayasan dengan metode belajar *teacher center learning*. Informan AH merasakan ketidaksesuaian antara sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk kemudian mengikuti pembelajaran dengan konsep *student center learning* di SMA

Negeri 1 Kartasura. Sistem pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura juga menuntut peserta didik untuk aktif belajar ketika di rumah. Hal ini dirasakan oleh AH, dimana dengan adanya ujian yang dilakukan secara tiba-tiba, membuat AH harus menyesuaikan dengan lebih sering mengulangi materi belajar yang disampaikan guru untuk memperdalam pemahaman.

Selain dalam hal konsep pembelajaran, ketidaksesuaian juga dialami oleh peserta didik tentang penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan, seperti halnya internet yang digunakan sebagai media utama dalam kegiatan diskusi di ruang kelas, dan pembelajaran lainnya. Penggunaan ini dinilai asing oleh informan FM, dimana ketika duduk di bangku SMP, FM tidak pernah menggunakan internet sebagai media belajar, diskusi, bahkan mengerjakan tugas secara online sehingga teknik belajar seperti itu membuat ia harus berusaha untuk mengenal penggunaan internet dalam kegiatan belajar dan mengerjakan tugas dari guru. Selain karena kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan internet, informan BD juga memiliki kendala yang sama mengenai ketidaksesuaian dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi BD yang tidak mencukupi untuk memiliki fasilitas yang menunjang semua proses belajarnya, terutama dalam hal penggunaan teknologi internet dan komputer.

Kendala lain yang dialami peserta didik ketika awal kehidupannya di SMA Negeri 1 Kartasura pada tahun angkatan 2018/2019 adalah mengenai penerapan tata tertib dan kedisiplinan yang berlaku di SMA ini. Peserta didik berinisial AS mengaku bahwa ia kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Kartasura. AS merasa kebiasaan di SMP menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya, dimana penerapan peraturan di SMP tempat sekolah asal AS, berjalan tidak terlalu ketat dan dinilai lebih lunak, adapun setiap pelanggaran hanya akan menghasilkan surat peringatan yang tidak berpengaruh kepada kehidupannya di sekolah. Berbeda dengan SMA Negeri 1 Kartasura yang menerapkan kedisiplinan penuh, seperti konsekuensi ketika terlambat datang, berulah ketika upacara, hingga mengadakan razia dengan waktu secara tiba-tiba dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Hal ini mengantarkan AS menjadi peserta didik yang tidak disiplin dan seringkali mendapatkan teguran yang serius dari pihak sekolah dan bimbingan konseling.

Kedisiplinan juga menjadi salah satu hal baru bagi peserta didik berinisial DY, menurutnya penerapan hidup disiplin di SMA Negeri 1 Kartasura sudah berhasil di terapkan, hal ini dilihat dari cerminan tindakan yang dilakukan oleh kakak kelas mereka, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, tidak menggunakan sampah plastik, tepat waktu masuk kelas, dan paling terlihat ketika akan menuju lapangan untuk berbaris melaksanakan upacara, semuanya bekerja dengan cepat dan rapih. DY melihat hal ini sebagai sebuah kebaruan dalam lingkungannya dimana hal tersebut, jarang sekali ia lihat ketika ia masih duduk di bangku SMP, sehingga motivasi menjadi pelajar yang disiplin dan taat peraturan menjadi target dia untuk mencerminkan peserta didik SMA Negeri 1 Kartasura.

Proses interaksi dan membangun jalinan pertemanan juga dirasa menjadi salah satu kendala bagi kehidupan sosial di sekolah. Peserta didik berinisial HI, mengaku kesulitan dalam menjalin pertemanan di lingkungan SMA. Perbedaan latar belakang ekonomi dan gaya hidup antar peserta didik menjadi permasalahan bagi HI untuk melakukan interaksi dengan teman sekolahnya, HI merasa rendah diri, dan lebih memilih menghindari interaksi dengan teman-temannya tersebut. HI juga mengaku jika dia kesulitan dalam melakukan interaksi dengan banyak orang sehingga HI memilih lebih banyak diam dan dikenal pendiam oleh teman-temannya, HI merasa prosesnya untuk akrab dengan teman sekelasnya membutuhkan waktu yang lama karena alasan tersebut.

Sistem Zonasi Tahun Pelajaran 2019/2020

Pada tahun pelajaran 2019/2020, SMA Negeri 1 Kartasura merujuk kepada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019, dimana sekolah ini membuka pendaftaran calon peserta didik melalui 3 jalur pendaftaran, yaitu melalui jalur prestasi dengan kuota maksimal 5 % (lima persen) dari total peserta didik yang diterima, melalui jalur zonasi dengan kuota minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari total peserta didik yang diterima, serta melalui jalur perpindahan tugas/pekerjaan orang tua dengan kuota maksimal 5 % (lima persen) dari total penerimaan

peserta didik., dan peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar melalui satu jalur saja. Adapun statistik peserta didik yang di terima yaitu, peserta didik berprestasi sebanyak 17 peserta didik, dan peserta didik yang diterima melalui jalur perpindahan tugas/pekerjaan orang tua sebanyak 2 peserta didik.

PPDB tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 1 Kartasura juga menyediakan 21 (dua puluh satu) kelas yang terdiri dari 3 (tiga) jurusan, yaitu jurusan IPS dengan kuota 180 peserta didik, jurusan MIPA dengan kuota 180 peserta didik dan jurusan Bahasa dan Budaya dengan kuota 36 peserta didik. Pembagian wilayah zonasi pada Tahun ajaran 2019/2020 berbeda dengan sebelumnya, dimana sistem zonasi yang digunakan adalah pembagian zona desa/kelurahan yang dihitung berdasarkan satuan kilometer (km) dari SMA Negeri 1 Kartasura. Berikut pembagian wilayah zonasi yang berlaku: Wilayah kecamatan Kartasura, Sukoharjo dengan jarak desa/kelurahan mulai dari 0 km hingga 8,3 km, wilayah kecamatan Gatak, Sukoharjo dengan jarak desa/kelurahan mulai dari 3,4 km hingga 11 km, wilayah kecamatan Baki dengan jarak desa/kelurahan 7,7 km hingga 15 km, wilayah kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dengan jarak desa/kelurahan 7,3 km hingga 8,8 km, wilayah kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan jarak desa/kelurahan 4,6 km hingga 13 km, wilayah kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit (Karangduren, Guwokajen, Kateguhan), Kabupaten Boyolali dengan jarak desa/kelurahan 2 km hingga 6,2 km, serta wilayah kecamatan Wonosari (Wadunggetas, Tegakgondo, Wonosari, Duwet, Sekaran), kecamatan Polanharjo (Sidoharjo) dan kecamatan Delanggu (Gatak), Kabupaten Klaten dengan jarak desa/kelurahan 7 km hingga 8,8 km.

Tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun sebelumnya, peserta didik yang lulus seleksi pada PPDB tahun 2019/2020 juga mengalami kendala dalam hal pengenalan lingkungan sekolah. Dari pengambilan data yang telah dilakukan oleh peneliti, pada tahun 2019/2020 juga terdapat peserta didik yang mengalami kendala pada kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Kartasura. Informan DA mengaku bahwa kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Kartasura berbeda dengan di SMP sebelumnya. Bukan hanya tentang materi yang disampaikan akan tetapi tentang bagaimana materi itu di sampaikan oleh guru. Informan DA juga menghadapi sistem pembelajaran dan teknik mengajar yang baru, yang menuntut siswa untuk aktif belajar, baik di kelas maupun di rumah. Selain DA, Informan NG juga menjadi peserta didik yang merasakan ketidaksesuaian dengan sistem pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura. Menurut NG, pembelajaran berjalan sangat menuntut siswa untuk aktif, salah satunya adalah dengan mengadakan diskusi kelas secara rutin dimana konsep belajar tersebut tidak pernah dijumpai oleh NG ketika masih duduk di bangku SMP.

Ketika DA dan NG menemukan suatu hal baru mengenai sistem belajar di SMA Negeri 1 Kartasura, TA justru menemukan hal yang berbeda. TA merupakan salah satu siswa yang masuk lewat PPDB prestasi, dan berasal dari sekolah yayasan dengan sistem pembelajaran yang baik dan disertai dengan peserta belajar yang sesuai dengan penyelenggaraan pembelajarannya. TA menilai bahwa teman-teman barunya di SMA terlalu santai dalam kegiatan pembelajaran di kelas, hal ini dia lihat karena terlalu seringnya melihat teman-temannya bercanda atau bahkan tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Keadaan seperti ini kemudian menuntut TA untuk melakukan pembiasaan terhadap hal baru yang TA temui tersebut, yang berbeda dengan keadaan yang ia rasakan sebelumnya.

Selain ketidaksesuaian antara peserta didik dengan sistem pembelajaran. Ketidaksesuaian juga terjadi dalam hal pembiasaan dan pendisiplinan peserta didik. Untuk mencapai salah satu tujuan diterapkannya sistem zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura, yaitu menciptakan keefektifan lalu lintas, karena mayoritas domisili peserta didik merupakan radius terdekat dengan sekolah. SMA Negeri 1 Kartasura mengeluarkan kebijakan baru dimana peserta didik mulai angkatan masuk 2019 dilarang membawa kendaraan bermotor untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Hal ini menjadi kenadala bagi EA, yang berasal dari wilayah kabupaten Klaten. EA merasa kesulitan dan belum terbiasa untuk menggunakan kendaraan umum, terutama di pagi hari. Sehingga ketika awal ia masuk SMA, ia tetap selalu membawa kendaraan pribadi, dan dititipkannya di tempat parkir umum di dekat SMA Negeri 1 Kartasura

Sementara itu, penerapan kebijakan aturan, dan nilai-nilai kedisiplinan yang berlaku di SMA

Negeri 1 Kartasura menjadi hal baru bagi MR. Informan MR merasa berjalannya aturan dan tata tertib di SMA lebih ketat dari yang ia alami selama di SMP. MR merasa hal itu merupakan sesuatu yang baru, dimana setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi. Berbeda dengan MR, WA yang merupakan sahabat sekelas MR merasa bahwa WA sudah terbiasa dengan peraturan yang ketat dan disiplin, hal ini dikarenakan WA sudah disiplin dalam menjalankan dan mentaati tata tertib sejak SMP. Hal tersebut kemudian membuat MR merasa perlu melakukan penyesuaian agar terbiasa dengan kebijakan sekolah.

Ketidaksesuaian lain yang dialami peserta didik, dirasakan oleh JP, yaitu seorang peserta didik yang diterima melalui PPDB jalur prestasi dan tergolong sedikit memiliki teman karena latar belakang sekolahnya. JP berasal dari SMP Negeri 5 Surakarta dimana mayoritas temannya tidak melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kartasura. PPDB zonasi yang di dominasi oleh peserta didik yang berasal dari SMP Negeri 1 Kartasura yang merupakan SMP terdekat membuat peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura berasal dari SMP tersebut.. Namun, hal tersebut dirasakan berbeda oleh peserta didik dengan latar belakang seperti JP, dimana ketika JP memasuki lingkungan SMA, JP tidak memiliki teman dekat yang berasal dari sekolah yang sama dengannya. Sehingga membuat JP merasa canggung ketika ia akan melakukan interaksi dengan peserta didik lain yang sudah memiliki teman sebelumnya.

Penyesuaian Diri Peserta Didik

Perubahan sosial atau lingkungan baru akan menuntut seseorang melakukan penyesuaian diri. Hal ini dilakukan sebagai upaya pertahanan agar dapat diterima di lingkungan. Penyesuaian diri akan membuat seseorang berupaya agar dapat bertahan untuk akhirnya bisa masuk kedalam kebaruan. Upaya-upaya tersebut kemudian melahirkan sebuah strategi pertahanan yang menjadi bagian dari proses penyesuaian diri. Begitu juga penyesuaian diri yang dilakukan oleh peserta didik baru pasca diterapkannya sistem zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura. Penyesuaian diri yang dilakukan berkaitan dengan adanya kendala yang dialami peserta didik dalam aspek belajar ataupun interaksi peserta didik di sekolah. Peneliti telah meneliti 26 peserta didik dari 2 (dua) angkatan PPDB zonasi yang berbeda, dan menemukan strategi antar angkatan yang berbeda dalam rangka menyesuaikan diri berkaitan dengan kendala yang mereka hadapi.

Bagi peserta didik angkatan 2018, strategi pertama dilakukan oleh peserta didik terhadap sistem belajar mengajar yang baru, yang tidak ditemuinya ketika peserta didik duduk di bangku SMP. Sistem pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura menuntut siswa untuk aktif dan inovatif, serta menerapkan penggunaan teknologi. AH dan FM adalah peserta didik yang mengalami kendala terhadap kebaruan tersebut, hal ini dikarenakan AH dan FM memiliki latar belakang sekolah dengan sistem pembelajaran yang berlawanan dengan SMA Negeri 1 Kartasura. Dalam hal ini, AH melakukan strategi pembiasaan diri, seperti lebih serius dalam melakukan dan lebih memperhatikan guru ketika menjelaskan pembelajaran di SMA dibandingkan dengan sebelumnya di SMP.

Adapun FM, yang mengalami kendala dalam hal penggunaan teknologi, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang baru selama FM menempuh pendidikan, bagi FM penyesuaian diri dilakukannya tidak terlalu sulit. FM hanya perlu menggunakan internet lebih jauh, dan hal tersebut sangat mudah dipelajari karena tidak sedikit juga teman FM yang memahami internet, sehingga selain mempelajarinya secara mandiri, FM bersikap aktif untuk bertanya kepada temannya, perihal penggunaan internet di dalam pembelajaran. Sementara bagi BD, sangat sulit untuk dapat mengimbangi kapasitas peserta didik lain dalam hal pemahaman dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, BD berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan dan arahan guru dengan memanfaatkan persewaan komputer dengan jaringan internet.

Penyesuaian diri selanjutnya dilakukan oleh peserta didik, kaitannya mengenai penerapan tata tertib dan kedisiplinan yang menjadi hal baru bagi beberapa peserta didik. AS adalah peserta didik yang mengalami kebaruan tersebut sebagai sebuah kendala. Latar belakang SMP AS yang berbeda dengan SMA Negeri 1 Kartasura, membuat AS dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap tata tertib yang berlaku dan kedisiplinan yang diterapkan. AS sering mendapat konsekuensi yang merugikan karena ketidakdisiplinannya, dan hal itu pula yang mendorong

AH untuk melakukan penyesuaian agar terhindar dari kebiasaan buruknya tersebut

Sementara itu, kendala juga dialami oleh peserta didik yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi. HI adalah peserta didik yang masuk melalui jalur zonasi dengan syarat SKTM, dan HI merasa sulit untuk melakukan interaksi dengan beberapa temannya karena perbedaan gaya hidup. HI melakukan penyesuaian diri dengan cara menempatkan diri di lingkungan sosial sekolah, dimana ia lebih sering berinteraksi dengan peserta didik yang biasa, dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki gaya hidup yang dianggap mewah. Adapun interaksi yang dilakukan HI dengan peserta didik tersebut, dilakukannya sebatas kepentingan pembelajaran, seperti diskusi kelas ataupun tugas kelompok. Strategi tersebut membuat HI merasa lebih baik dalam melakukan interaksi dan kehidupan sosial di lingkungan sekolah.

Tidak jauh berbeda dengan peserta didik angkatan sebelumnya, peserta didik sistem zonasi angkatan 2019 juga melakukan penyesuaian terhadap lingkungan akademik dan proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura. DA dan NG merupakan peserta didik yang merasakan kebaruan tersebut, dimana ketika duduk di bangku SMP, baik DA maupun NG jarang sekali melaksanakan diskusi pembelajaran di kelas, karena pembelajaran lebih bersifat *teacher center learning*. Sistem pembelajaran baru yang dihadapi DA dan NG, membuat mereka melakukan penyesuaian untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan tidak tertinggal dari peserta didik lain.

Lain halnya dengan TA, peserta didik yang masuk melalui PPDB jalur prestasi merasa peserta didik lain bersikap santai dalam pembelajaran, hal ini dinilai TA dari seringnya peserta didik dalam bercanda ketika pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, TA melakukan penyesuaian diri dengan cara tetap fokus ketika pembelajaran dan tidak menghiraukan peserta didik yang menggangukannya, disisi lain, TA juga berusaha menangani peserta didik lain dari segi sifat dan pemikirannya untuk kemudian TA menghadapi setiap peserta didik dengan cara yang berbeda, agar tidak muncul ketersinggungan.

Dari segi aturan dan kedisiplinan peserta didik, larangan membawa kendaraan menjadi kendala baru bagi peserta didik. EA merupakan peserta didik SMA Negeri 1 Kartasura dimana tempat tinggalnya tidak terjangkau kendaraan umum. Karena arah tempat kerja yang berbeda, sehingga ayah EA hanya bisa mengantarkannya hingga ke tempat pemberhentian kendaraan umum. Namun hal tersebut tetap membuat EA merasa kesulitan karena ketika pulang sekolah EA selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan membuat pulanginya lebih lambat dan terkadang sudah tidak ada kendaraan umum. Seiring berjalannya waktu, EA menemui peserta didik lain yang membawa kendaraan bermotor, namun di titipkan ti tempat penitipan terdekat. Hal tersebut menjadi sebuah jalan keluar EA untuk menghadapi kendalanya tersebut.

Seperti halnya EA, MR juga menemui hal baru dalam aturan dan kedisiplinan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kartasura. MR merasa bahwa dengan latar belakang sekolahnya yang tidak menerapkan kedisiplinan dengan baik, membuat MR menjadi peserta didik yang belum terbiasa dengan kedisiplinan. MR melakukan pembiasaan dengan lebih sering berinteraksi dengan peserta didik yang lebih disiplin dan patuh terhadap aturan, sehingga ia juga akan terbiasa untuk melakukan kedisiplinan dan patuh terhadap tata tertib.

Kaitannya dengan interaksi antar peserta didik, JP menjadi peserta didik yang terkendala dalam kehidupan sosialnya. Adanya dominasi peserta didik dari SMP terdekat dengan SMA Negeri 1 Kartasura, membuat peserta didik seperti JP merasa kesulitan dalam memulai interaksi dengan peserta didik lain. Dominasi SMP terdekat dalam menyumbang peserta didiknya, membuat peserta didik yang berasal dari SMP tersebut sudah memiliki kelompok interaksi tersendiri, kelompok yang sudah akrab, dekat dan tidak perlu menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosialnya. Sementara itu, JP merupakan peserta didik yang tergolong minoritas, berasal dari SMP yang berbeda, dan tidak memiliki teman akrab ketika pertama kali masuk sebagai siswa SMA. Namun secara perlahan, JP melakukan penyesuaian dengan peserta didik lain melalui interaksi yang ia lakukan secara perlahan.

Penyesuaian Diri Peserta Didik dalam Ritus Peralihan

Segala bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh peserta didik tersebut merupakan sebuah proses peralihan agar peserta didik dapat terbiasa dengan kultur sosial dan pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura. Penyesuaian diri dilakukan atas dasar adanya perbedaan antara sumber daya dan latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik, dengan keadaan lingkungan di SMA Negeri 1 Kartasura.

Arnold Van Gennep, menyebutkan sebuah proses peralihan kedalam tiga tahap yaitu tahap pemisahan (*separation*), tahap peralihan (*liminality*), dan tahap penggabungan (*reintegration*) (Annisa, F., Nurhadi, & Liestyasari, S. I, 2019). Pembahasan tiga tahap dalam ritus peralihan mempengaruhi munculnya teori liminalitas menurut Victor Turner. Dalam bukunya *Les Rites de Passage*, Van Gennep telah mengkonstruksi ritus-ritus, dia melihat dan meneliti ritus-ritus yang berkaitan dengan peralihan warga masyarakat atau kelompok warga masyarakat kedalam keadaan baru (Koentjaraningrat, 1987). Penemuan dari Arnold van Gennep tersebut kemudian dikembangkan oleh Victor Turner, terutama dalam ritus peralihan khususnya tahap liminal. Liminalitas digunakan untuk meneropong permasalahan dan menelaah ritus-ritus yang ada di masyarakat. Van Gennep mendefinisikan *rites de passage* sebagai ritus yang mengiringi setiap perubahan keadaan, tempat, umur, dan status sosial masyarakat (Turner, 1966).

Berikut penjelasan tiga tahap peralihan kebiasaan peserta didik SMA Negeri 1 Kartasura, dengan kerangka teori Arnold Van Gennep memperlihatkan aspek ritus peralihan dalam penyesuaian diri yang dilakukan oleh peserta didik, pasca diterapkannya sistem zonasi.

Tahap Pemisahan (*separation*)

Ketika peserta didik duduk di bangku SMP, mereka adalah peserta didik yang normal dengan aktifitas dan rutinitasnya sebagai pelajar. SMP yang tidak menerapkan sistem zonasi sebelumnya, menempatkan peserta didik di lingkungan yang relatif sama dengan karakter dan cara belajar masing-masing. Kemudian yang dimaksud dengan tahap pemisahan adalah tahap ketika peserta didik memasuki lingkungan baru, dimana ia menemukan hal-hal baru yang akan ia hadapi. Peserta didik mulai melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama mereka dan mulai mempersiapkan diri untuk kebiasaan baru kaitannya dalam melakukan penyesuaian diri yang artinya peserta didik mengalami pemisahan atau *segregation* dengan kebiasaan lamanya tersebut. AS merupakan peserta didik yang merasakan terjadinya tahap pemisahan tersebut, dimana AS sendiri dengan dorongan dari orang tuanya, mulai meninggalkan kebiasaan untuk bangun siang, terlambat sekolah, hingga membolos pelajaran. Hal ini dilakukan AS agar ia bisa melakukan penyesuaian diri dan menyatu dengan lingkungan di SMA Negeri 1 Kartasura.

Selain AS, proses pemisahan juga dialami oleh peserta didik lain yaitu AH. Dimana pada kebiasaan sebelumnya, AH memiliki kebiasaan hanya belajar jika menjelang ujian ataupun ulangan, kemudian, dengan adanya pelaksanaan *pre test* yang diadakan oleh guru secara tiba-tiba, menuntut AH untuk selalu memahami materi pelajaran kapanpun, tidak hanya menjelang ujian saja, sehingga AH mulai meninggalkan kebiasaan belajar hanya dalam satu malam, menjadi selalu mengulang materi pelajaran ketika sebelum tidur. Selain AH, permasalahan dan pemisahan kebiasaan tersebut juga dilakukan oleh DA, yang meninggalkan kebiasaan belajar hanya menjelang ujian, menjadi belajar setiap malam untuk mengingat materi sebelumnya sebagai bekal untuk menghadapi pelajaran di hari berikutnya.

Selain dalam hal melepas kebiasaan yang tidak disiplin dan kurang rajin belajar. Melepaskan kebiasaan untuk dapat membaur dengan lingkungan juga dialami oleh TA, yang melepaskan kebiasaan lamanya dalam melakukan interaksi dengan peserta didik lain, dimana sebelumnya, TA memiliki sikap yang tidak terlalu ramah dalam berteman. TA selalu menilai buruk orang lain yang kurang disiplin, dan tidak serius. Dengan alasan agar dapat membaur di lingkungan SMA Negeri 1 Kartasura, TA kemudian merubah cara berfikirnya, dengan melihat dan memahami karakter peserta didik untuk dapat mengambil sisi positif dari masing-masing peserta didik.

Tahap Liminalitas (*liminality*)

Pada tahap liminalitas ini, para peserta didik dihadapkan pada pengalaman yang bersifat ambigu, hal ini dikarenakan peserta didik mengalami situasi berupa ambang batas atau bisa dikatakan “tidak ada disana, dan tidak ada disini”. Menurut Victor Turner, pada tahap ini bisa juga dikatakan sebagai tahap pembentukan (*formation*), dikarenakan orang tidak menyadari kehidupan secara mendalam akan tetapi secara bersamaan mengalami proses pembentukan tersebut (Turner, 1966).

Ketika memasuki lingkungan SMA Negeri 1 Kartasura, peserta didik menemui kendala berupa ketidaksesuaian antara latar belakang yang mereka miliki dengan lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat baru untuk menuntut ilmu. Seperti pengalaman yang dialami oleh JP, peserta didik yang mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi dengan peserta didik lain, karena JP berasal dari sekolah moniritas yang berbeda dengan peserta didik lain. Dalam menghadapi ketidaksesuaiannya tersebut, JP berinisiatif untuk melakukan pendekatan kepada peserta didik lain untuk mendapatkan perhatian sehingga peserta didik akan tertarik untuk berteman dengannya.

Lain halnya dengan AH, peserta didik yang belum terbiasa dengan kegiatan pembelajaran *student center learning*, pada awalnya AH lebih memilih diam ketika diberi tawaran oleh guru, namun AH akan merasa tersudutkan ketika guru menunjuknya untuk aktif. Sehingga hal tersebut menjadi titik balik AH untuk melakukan perubahan pembiasaan dalam dirinya dari yang hanya aktif belajar ketika menjelang ulangan dan ujian, menjadi aktif belajar setiap hari untuk mengulang materi belajar dan menyiapkan untuk hari selanjutnya.

Peserta didik lainnya, yaitu FM yang merasakan keadaan yang ambigu dimana dengan kendala yang dihadapinya, FM harus memahami cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, sementara hanya sedikit yang FM pelajari ketika SMP. Sehingga, FM harus mempelajari semua fungsi teknologi, informasi dan komunikasi dalam dunia pembelajaran sementara tugas yang diminta guru, harus tetap dikumpulkan. Selain FM, kendala serupa juga dirasakan oleh BD, namun BD mengalami kendala lebih sulit karena fasilitas yang ia miliki juga tidak selengkap FM.

Keadaan yang menempatkan seseorang berada di ambang batas juga dirasakan oleh MR, dimana ketika ia memiliki kendala karena seringnya melanggar peraturan, MR memilih untuk berteman akrab dengan peserta didik yang lebih disiplin untuk mendorong dan memotivasi MR agar menjadi siswa disiplin juga. Secara perlahan MR bersikap patuh meskipun hal tersebut tidak membuat dia menjadi siswa yang disiplin sepenuhnya, namun MR dapat meninggalkan kebiasaan lamanya yang tidak disiplin.

Dengan kendala yang ada, dan tuntutan untuk dapat menyatu dengan lingkungan baru tersebut, maka peserta didik akan mengeluarkan strategi sebagai bentuk proses penyesuaian dirinya. proses tersebut merupakan sebuah situasi yang ambang batas, dimana peserta didik belum bisa menyatu dengan lingkungan dan kultur di SMA Negeri 1 Kartasura, sementara di lingkungan sekolah, ia juga bukan sebagai orang yang berasal dari latar belakangnya, sehingga muncullah sebuah pengalaman yang ambigu.

Tahap penggabungan (*reintegration*)

Tahap ini mencakup simbolis dan tindakan yang mewakili kembalinya subyek ke posisi baru mereka yang relatif stabil dan di definisikan dengan baik di lingkungannya. Pada tahap ini, seseorang dianggap sudah di sempurnakan. Pada tahap ini, peserta didik dengan strategi dan upaya penyesuaian diri yang dilakukan berhasil mengantarkannya kepada sebuah identitas yang ia miliki di sekolah, suatu ciri khas yang mengingatkan orang lain terhadap seseorang. Peserta didik sudah dianggap mampu melewati pengalaman yang ambigu dalam dirinya dan menutupnya dengan sebuah penggabungan antara dirinya dan lingkungan yang baru.

Seperti halnya MR, yang mengalami kendala terhadap tata tertib dan kedisiplinan yang berlaku di SMA Negeri 1 Kartasura, setelah melakukan strategi dalam rangka penyesuaian diri yang ia lakukan, MR merasa sudah dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan

SMA Negeri 1 Kartasura. Begitu juga dengan AS, yang telah menerapkan sikap disiplin dalam kebiasaannya, AH yang mulai terbiasan dengan pelaksanaan ujian secara tiba-tiba, hingga TA yang bisa menerima sikap setiap temannya yang memiliki karakter yang beragam yang justru berlawanan dengan TA.

Secara keseluruhan, dimana peneliti menggali data mengenai penyesuaian diri peserta didik. Peserta didik telah dianggap mampu melewati fase krisisnya, fase yang menempatkannya pada keadaan yang ambigu dan liminal, sehingga peserta didik telah mampu kedalam keadaan *reintegrasi* yaitu penggabungan antara diri peserta didik dengan kultur sekolah baru, sehingga memberikan identitas baru bagi peserta didik yang mencerminkan pelajar yang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kartasura

Simpulan

Perubahan menjadi salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat, dimana dalam setiap prosesnya, penyesuaian diri akan menjadi salah satu cara yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Arnold Van Gennep memandang perubahan dalam masyarakat sebagai *rites of passage* atau sebuah ritus peralihan yang mengantarkan manusia dalam mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan proses perubahan yang dialami peserta didik, dimana untuk dapat menyatu dengan kehidupan baru di SMA, peserta didik harus melalui tahap perubahan dan menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang baru.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: *Pertama*, perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik memberikan hambatan berupa ketidaksesuaian antara latar belakang peserta dengan kultur yang di SMA Negeri 1 Kartasura. Ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan kedisiplinan, cara interaksi dan cara belajar peserta didik. Perbedaan cara berinteraksi terjadi karena adanya peserta didik yang berasal dari SMP dominan dengan radius terdekat dengan SMA Negeri 1 Kartasura dan mengakibatkan mayoritas peserta didik SMP tersebut bersekolah di SMA Negeri 1 Kartasura. Hal ini berlawanan dengan mereka yang bukan berasal dari sekolah dominan, sehingga mengalami kendala dalam mencari teman baru dan berinteraksi secara akrab. Selain itu, penerapan sistem SKTM dalam penerimaan siswa melalui jalur zonasi memberikan dampak terhadap cara berinteraksi siswa tidak mampu yang mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi dengan peserta didik lainnya karena perbedaan gaya hidup. Hambatan dalam hal cara belajar terjadi karena adanya perbedaan prestasi antar peserta didik, dan perbedaan ini semakin terlihat karena mayoritas peserta didik diterima melalui jalur zonasi, dan hal ini semakin menunjukkan ketidaksesuaian antara kebiasaan belajar peserta didik dengan kultur belajar di SMA Negeri 1 Kartasura yang lebih prestatif. Hambatan untuk cara belajar ini juga terjadi pada peserta didik yang berasal dari SMP dengan konsep belajar *teacher center learning* dan kultur belajar yang berlawanan dengan jalannya kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Kartasura. Hambatan yang dialami peserta didik memberikan dampak pada lambatnya proses penyesuaian peserta didik yang harus melewati tahap tertentu agar dapat menyatu dengan lingkungan baru sepenuhnya.

Kedua, dengan adanya hambatan yang terjadi dalam perubahan peserta didik, maka terdapat sebuah proses peralihan yang dilewati peserta didik hingga berhasil dalam melakukan penyesuaian diri. Proses ini disebut Ritus peralihan, yang menempatkan peserta didik pada tiga tahap peralihan sebelum menyatu dengan lingkungan di SMA. Tahap yang pertama disebut tahap pemisahan (*segregation*), dimana ketika memasuki lingkungan baru di SMA, peserta didik menemui hal-hal baru yang akan di jalani, selain itu terjadi pula proses pemisahan antara peserta didik dengan kebiasaan ketika ia masih duduk di bangku SMP. Setelah melewati tahap pemisahan, peserta didik menghadapi tahap liminal (*liminality*), yaitu sebuah keadaan yang menempatkan peserta didik di suatu ambang batas, atau disebutkan juga sebagai tahap yang ambigu dimana pada tahap ini, peserta didik belum bisa menyatu dengan kebudayaan baru di SMA, akan tetapi peserta didik juga sudah terpisah dengan kebiasaan sebelumnya. Tahap yang terakhir disebut dengan tahap penggabungan (*reintegration*) yaitu tahap dimana peserta didik sudah berhasil melakukan penyesuaian diri, yang menempatkan peserta didik pada posisi dan identitas baru di lingkungan yang baru sebagai siswa SMA.

Referensi/Daftar Pustaka

- Ali, M., & Asrori, M. (2005). *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andreyeva, E., & Patrick, C. (2017). Paying for Priority in School Choice: Capitalization Effects of Charter School Admission Zones. *Journal of Urban Economics*, 100, 19–32.
- Annisa, F., Nurhadi, & Liestyasari, S. I. (2019). Ritual Unggahan Pada Komunitas Adat Bonokeling (Studi Kasus Pada Komunitas Adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas menggunakan teori Liminalitas Victor Turner). *Sosialitas (Jurnal Ilmiah Pendidikan Sos-Ant)*.
- Hisbullah, & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112–122.
- Javremovic, S., Savic, D., & Janjic, P. (2019). Human Engineering in School Zones. *Transportation Research Procedia*, 40, 1396–1403.
- Kemendikbud. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Bentuk Lain yang*, Pub. L. No. Nomor 14 Tahun 2018 (2018).
- Koentjaraningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Kusdiyati, S., Halimah, L., & Faisaludin. (2011). Penyesuaian Diri di Lingkungan Sekolah Pada Kelas XI SMA Pasundan 2 Bandung. *Humanitas*, VIII(2), 171–194.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realitia*, 17(1), 13–21.
- Pratiningrum, M., & Hendriani, W. (2013). Penyesuaian Diri Remaja yang Tinggal di Pondok Pesantren Modern Nurul Izzah Gresik Pada Tahun Pertama. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 2(3), 134–143.
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan*, 21(2), 2016–2213.
- Spradley, J. P. (2006). *Metode Etnografi* (2nd ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Turner, V. (1966). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. New York: University of Rochester.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2019). Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit dan Masyarakat. *Reorientasi Profesionalisme Pendidik Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0*, 195–201. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Wulandari, N., Naryoso, A., & Rakhmad, W. N. (2013). Kompetensi Komunikasi Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Student Center Learning di SMA Negeri 9 Semarang. *Jurnal Interaksi Online*, 1(4).



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Halaman 42-51



Segregasi Sosial Mahasiswa Perantau di Yogyakarta

Amelia Susanto Putri
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Anggaunitakiranantika
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

| Kata Kunci | Abstrak |
|--------------------|--|
| Interaksi | Hubungan yang tercipta antara mahasiswa dari Timur Indonesia dengan masyarakat lokal Yogyakarta cenderung tidak berjalan dengan harmonis. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan kebudayaan antar keduanya. Namun, meskipun hubungan dan interaksi yang tercipta cenderung tidak harmonis, masih ada masyarakat yang dapat bersosialisasi dengan baik dengan pendatang, yaitu di daerah Gendeng, Kota Yogyakarta. Hubungan yang harmonis tersebut disebabkan oleh kemampuan dua masyarakat yang berbeda kebudayaan tersebut untuk beradaptasi. Mayoritas mahasiswa dari Indonesia Timur seperti NTT dan Papua memilih untuk hidup berkelompok disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa interaksi antara masyarakat lokal dengan mahasiswa pendatang dari Timur berpengaruh terhadap kehidupan mereka yang rukun dan harmoni. Perbedaan budaya yang ada dalam keduanya tidak akan menimbulkan konflik sejauh terdapat rasa toleransi antar keduanya. Mayoritas mahasiswa dari Timur Indonesia yang memilih untuk hidup berkelompok disebabkan oleh adanya apatisme dan cultural shock serta adanya stereotip dari masyarakat lokal. Stereotipe tersebut muncul sebagai akibat dari kuatnya framing yang dilakukan baik oleh lingkungan maupun media yang kemudian mempengaruhi pola pikir masyarakat. |
| Kebudayaan | |
| Mahasiswa Perantai | |
| Segregasi | |
| Yogyakarta | |
| Diterima | 31 Mei 2020 |
| Review | 7 Juni 2020 |
| Revisi | 14 Juni 2020 |
| Penerimaan | 15 Juni 2020 |
| Copyedit | 15-26 Juni 2020 |
| Publikasi | 30 Juni 2020 |



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Pages 42-51



Migrant Student Social Segregation in Yogyakarta

Amelia Susanto Putri

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Anggaunitakiranantika

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

| Keywords | Abstract |
|---|--|
| Culture Interaction Overseas Student Segregation Yogyakarta | Relationships created between students from Eastern Indonesia and the Yogyakarta local communities tend to unharmony. This is caused by cultural differences between of them. However, even though the relationships and interactions that are created tend to be out of harmony, there's an area that people are still socialize well with migrants, namely in the Gendeng area, Yogyakarta. The harmonious relationship is caused by the ability between two community do adaption from different cultures. Mostly students from Eastern Indonesia such as NTT and Papua choose to live in groups due to several internal and external factors. This research uses a qualitative method using a literature study approach. In this study, it was gathered that the interaction between local people and migrant students from the East affected their harmony and harmony in life. Cultural differences that exist in both will not cause conflict as long as there is a sense of tolerance between them. The majority of students from Eastern Indonesia who choose to live in groups are caused by apathy and cultural shock and stereotypes from the local community. The stereotype arises as a result of the strong framing carried out both by the environment and the media which then affects people's mindsets. |
| Submission | 31 Mei 2020 |
| Review | 7 Juni 2020 |
| Revision | 14 Juni 2020 |
| Acceptance | 15 Juni 2020 |
| Copyediting | 15-26 Juni 2020 |
| Publication | 30 Juni 2020 |

Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan di Pulau Jawa dapat dikatakan lebih maju dibandingkan dengan daerah Indonesia lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti misalnya keadaan geografis maupun kemudahan akses masyarakat (Suputera, n.d.). Kemajuan pendidikan di Pulau Jawa dapat dilihat dari adanya fasilitas yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pendidikan, serta ketersediaan bangunan yang layak pakai. Kondisi ini tentu berbeda dengan wilayah – wilayah lain di Indonesia yang sebagian besar belum memiliki pelayanan pendidikan yang baik dari segi fasilitas maupun media pendidikan. Perbedaan kondisi inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan dalam dunia pendidikan. Hal ini menjadi latar belakang yang menyebabkan sebagian besar mahasiswa dari luar Pulau Jawa memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Pulau Jawa. Adanya anggapan bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan di Pulau Jawa lebih memadai dan unggul dibandingkan dengan daerah lainnya menjadi alasan mahasiswa luar pulau Jawa datang ke Jawa (Rahma, 2017). Selain itu, banyaknya mahasiswa yang melakukan migrasi untuk melanjutkan pendidikan juga dilandasi oleh faktor penarik yang berupa popularitas jurusan yang dipilih untuk melanjutkan pendidikan, pertimbangan biaya yang terjangkau dan lokasi kampus yang memadai dan dapat dijangkau dari tempat tinggal asal para mahasiswa. Sedangkan faktor pendorong yang menyebabkan mahasiswa memilih untuk merantau dalam melanjutkan studi adalah tidak adanya universitas yang bermutu di daerah asal, sulitnya lapangan pekerjaan bagi lulusan SMA dan berkurangnya teman sebaya yang ada di daerah asal (Anggaunitakiranantika, W, 2010).

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan pendidikan yang diminati oleh banyak perantau baik dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan adanya Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang diyakini memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta yang menyebutkan adanya 11 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 107 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Yogyakarta. (*Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*, 2019). Selain dikenal sebagai kota pelajar dan pendidikan, Yogyakarta juga dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya serta adat istiadat yang kental. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya yang masih memperhatikan nilai – nilai serta norma yang berlaku dalam kebudayaan Jawa dalam kehidupan sehari- harinya. Aturan – aturan serta kepercayaan Jawa masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Yogyakarta.

Di sisi lain, mahasiswa dari luar Jawa khususnya dari daerah Timur Indonesia yang datang ke Yogyakarta tentunya memiliki budaya serta nilai – nilai yang berbeda dengan masyarakat lokal Yogyakarta. Sedangkan mahasiswa pendatang dari daerah timur Indonesia juga memerlukan adanya interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam prosesnya, kontak sosial antara mahasiswa timur dengan masyarakat lokal seringkali menyebabkan adanya gesekan – gesekan yang dipengaruhi oleh adanya nilai – nilai kebudayaan serta kebiasaan yang berbeda. Kondisi ini juga diperparah oleh adanya pandangan tertentu dari masyarakat kepada mahasiswa Timur Indonesia yang didasarkan dengan nilai budayanya sendiri. Hal ini terjadi seiring dikarenakan kuatnya primordialisme di masyarakat yang kemudian membentuk masyarakat yang cenderung memandang rendah budaya lain dan menganggap budayanya lebih unggul. Akibatnya, banyak dari mahasiswa Timur Indonesia yang bersatu dengan mahasiswa lainnya dari daerah yang sama untuk hidup bersama dan berkelompok. Mahasiswa pendatang tersebut dapat hidup dengan lingkungan yang nyaman dan dengan orang – orang yang memiliki kebudayaan yang sama. Hal tersebut dapat mengurangi tekanan sosial yang diterimanya dari kelompok dominan. Selain itu, adanya perbedaan budaya tersebut memaksa mahasiswa timur Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup.

Sebelumnya telah ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai segregasi di Yogyakarta, yaitu skripsi karya Dinda Juwita Rahma yang berjudul “Culture Shock Pada Mahasiswa Papua di Yogyakarta Ditinjau dari Dukungan Sosial”. Penelitian ini menjelaskan bahwa mahasiswa dari Papua yang ada di Yogyakarta mengalami culture shock yang disebabkan oleh adanya perbedaan kebudayaan mereka dengan budaya masyarakat Yogyakarta. Hal tersebut memaksa

mahasiswa Papua untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Selain itu terdapat pula tesis karya Fransiskus Awe (2019) yang berjudul “Entitas di Perkotaan : Konflik Mahasiswa Nusa Tenggara Timur dan Warga Tambakbayan, Babarsari, Yogyakarta” yang memperoleh hasil bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya stereotip dan framing yang diberikan oleh media maupun pengalaman perjumpaan warga dengan mahasiswa NTT. Selain itu, pola hidup mahasiswa dinilai tidak sesuai dengan kultur masyarakat setempat. Adanya kekerasan parsial yang dilakukan oleh segelintir mahasiswa memperburuk hubungan yang tercipta. Mahasiswa juga dinilai tidak mampu untuk mengaplikasikan filosofi hidup yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu topik bahasan yang berbeda dari tema segregasi sosial yang diangkat serta pembahasan yang dilakukan lebih komprehensif dan tidak hanya memandang permasalahan dari satu sudut pandang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam membahas mengenai permasalahan segregasi sosial dan dapat dijadikan rujukan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pendekatan yang digunakan ialah Studi kepustakaan dimana peneliti berusaha mengkaji suatu kelompok atau komunitas yang memiliki kebudayaan tertentu berdasarkan pada pencarian data sekunder dari berbagai sumber dan literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti mengenai permasalahan segregasi sosial di Yogyakarta yang melibatkan penduduk lokal dan mahasiswa timur Indonesia. Daerah tersebut layak untuk digunakan sebagai tempat penelitian karena terdapat berbagai masyarakat dari beragam etnis, maupun latar belakang daerah asal. Di Yogyakarta juga terdapat berbagai kampus yang menjadi daya tarik masyarakat dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu. Adanya mahasiswa pendatang tersebut kemudian menuntut mereka untuk hidup berdampingan dengan masyarakat lokal, tidak terkecuali dengan mahasiswa asal timur Indonesia. Langkah – langkah pengolahan data yang dilakukan yaitu :

1. Reduksi data

Proses ini dilakukan dengan memilah data untuk kemudian dipusatkan sesuai dengan pokok bahasan. Kemudian data – data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori – kategori dan aspek permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian data

Proses ini meliputi penyusunan data yang telah dipilah dan dikelompokkan menjadi susunan atau uraian data dari hasil kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini, penyajian data dimaksudkan untuk mendeskripsikan dinamika terkait permasalahan segregasi sosial di Yogyakarta.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus dalam proses penelitian seiring dengan perolehan data di lapangan. Penarikan kesimpulan diperoleh setelah serangkaian proses reduksi data dan penyajian data, dan kemudian dilakukan analisis makna dan arah yang muncul dari data yang diperoleh.

Prosedur atau strategi yang dapat dilakukan untuk memperoleh keabsahan data, diantaranya yaitu melakukan triangulasi data, negative or discrepant information, peer debriefing, dan external auditor.

Hasil dan Pembahasan

Interaksi Mahasiswa Timur Indonesia dengan Masyarakat Lokal di Yogyakarta

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam kehidupan sehari-hari diperlukan interaksi antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Interaksi ini biasanya diimplementasikan dengan cara kehidupan berkelompok antara individu satu dengan individu lainnya. Faktor yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok antara lain dikarenakan oleh dorongan kepentingan individu, seperti dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, hidup bersama, serta untuk mempertahankan keturunan. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan sosialnya disebut dengan interaksi sosial. Gillin menjabarkan bahwa interaksi sosial merupakan suatu hubungan dinamis antara individu maupun kelompok. Secara psikologi, interaksi sosial dipengaruhi oleh sikap manusia. Soetarno menjelaskan, bahwa sikap dipengaruhi oleh pandangan atau perasaan seseorang yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek. Menurut La Pierre, sikap merupakan pola perilaku terstruktur yang digunakan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. (Rahayu Gunintasari).

Interaksi sosial memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan bersama, yang didalamnya terdapat komunikasi dan kontak sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Astrid S. Susanto berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antar individu yang terjadi secara ajek sehingga menghasilkan struktur sosial. Hasil dari interaksi sosial sangat dipengaruhi oleh sikap dan respon dari individu yang terlibat dalam interaksi (digilib.uinsby.ac.id).

Pola interaksi yang tercipta antara mahasiswa pendatang dari Timur dan masyarakat lokal dapat dilihat dalam masyarakat Gendeng. Mereka memiliki pola interaksi yang baik dan harmonis (Yunus, 2017). Pola interaksi tersebut terjadi seiring dengan usaha yang dilakukan oleh mahasiswa pendatang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sebab, tradisi dan budaya yang dimiliki oleh mahasiswa pendatang tersebut dengan masyarakat lokal sangat berbeda. Sehingga saat mereka berbaur dengan masyarakat lokal maka mahasiswa pendatang tersebut memiliki tanggungjawab sosial yang sama. Oleh karena itu mahasiswa pendatang dituntut untuk bisa menghadapi dan berbaur dengan masyarakat lainnya. Meskipun interaksi yang tercipta harmonis, terdapat hambatan interaksi antara masyarakat Gendeng dengan mahasiswa NTT yang terjadi akibat miss komunikasi. Adanya pola interaksi yang tidak harmonis yang sampai berakibat kepada konflik dan bentrok kebanyakan dilatarbelakangi oleh miss komunikasi yang diakibatkan oleh perbedaan budaya antara masyarakat sekitar dan mahasiswa Timur (Rahma, 2017). Ketidaksiapan dan kurangnya pemahaman adanya perbedaan budaya dan kebiasaan antara masyarakat lokal dan mahasiswa dari Timur menyebabkan adanya perbedaan pandangan pada suatu realitas dan tindakan yang dilakukan. Fenomena tersebut kemudian akan menyebabkan adanya segregasi sosial yang akan berdampak terhadap interaksi sosial antara mahasiswa Timur dengan masyarakat. Selain itu, kondisi mahasiswa Timur yang sulit beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan warga sekitar juga menjadi pemicu dari munculnya konflik antara mahasiswa Timur dengan masyarakat sekitar.

Di lain sisi, framing, media, dan stereotip masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap munculnya segregasi. Akibat lainnya yang dimbulkan adalah penolakan masyarakat lokal terhadap mahasiswa Timur. seperti yang terjadi pada warga Tambakbayan, Babaksari Yogyakarta. Faktor yang melandasi penolakan warga Tambakbayan terhadap mahasiswa NTT untuk tinggal di wilayah mereka adalah pandangan, framing, serta stereotip masyarakat yang menganggap mahasiswa NTT adalah mahasiswa yang identik dengan kekerasan yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat yang menjunjung tinggi sopan santun, kerukunan, kedamaian, dan harmoni (Awe, 2019). Adanya framing yang cukup kuat tersebut kemudian berpengaruh terhadap pola pikir dan pandangan yang diarahkan oleh masyarakat kepada mahasiswa Timur. Masyarakat cenderung lebih memercayai pemberitaan mengenai sifat – sifat negatif mahasiswa Timur yang berseberangan dengan budaya masyarakat lokal Yogyakarta.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan segelintir mahasiswa Timur yang membuat kerusuhan dan berperilaku menyimpang. Perilaku yang menyimpang tersebut kemudian memperkuat stereotip buruk masyarakat lokal terhadap mahasiswa Timur.

Faktor – faktor yang Mendorong Mahasiswa Asal Daerah Timur Indonesia untuk Hidup Secara Berkelompok.

Mahasiswa timur Indonesia yang hidup secara berkelompok didorong oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun eksternal. Pada faktor internal yang menyebabkan mahasiswa timur hidup secara berkelompok ialah *culture shock* atau gegar budaya (Rahma, 2017). Hal ini dikarenakan adanya bentuk kultur atau kebudayaan yang berbeda dari lingkungan mereka berasal sehingga mereka merasakan perasaan tidak nyaman dan tidak betah untuk hidup dengan keadaan yang sangat berbeda dari lingkungan awal mereka. penyebab dari *culture shock* ini sendiri ialah munculnya perasaan kaku ataupun tegang pada saat mereka menapaki lingkungan baru dengan kondusivitas yang berbeda. Selain itu juga muncul rasa minder, malu dan tidak percaya diri dengan keadaan lingkungan baru. terlahir juga etnosentrisme pada mahasiswa timur sebagai bias dari *culture shock* ini sendiri. hingga akhirnya ini juga menjadikan faktor mengapa para mahasiswa timur mengalami *culture shock*.

Selain *culture shock*, terdapat juga apatisisme mahasiswa timur sebagai perantau yang menghambat mereka untuk melakukan interaksi dan sosialisasi secara aktif dengan penduduk setempat. Bentuk apatisisme mereka akhirnya akan menjadikan susahnya untuk menjalin interaksi bahkan membentuk integrasi dengan masyarakat setempat. Kehidupan mahasiswa timur yang apatis ini didasari dengan rasa malas bahkan rasa acuh tak acuh dengan keadaan lingkungan sosial mereka yang baru. keputusan untuk menjadi apatis nantinya akan mempengaruhi keleluasaan mereka dalam melakukan dan menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya (Mahyuddin, 2018).

Faktor internal tersebut sebenarnya berkaitan juga dengan faktor eksternal yang menyebabkan mahasiswa timur memutuskan untuk bermukim secara berkelompok. Salah satu faktor eksternal ialah stereotipe yang melekat pada mahasiswa timur yang telah tertanam pada masyarakat setempat. Fransiskus Awe dalam penelitiannya menyebutkan bahwa stereotipe masyarakat terhadap para perantau menyebabkan masyarakat setempat dengan mahasiswa timur sebagai perantau seringkali menjadikan kontravensi dan berujung pada konflik (Awe, 2019). Stereotipe yang tercipta tak jauh dari sinisme etnis dan bentuk fisik yang akhirnya mengakar dengan pola karakter yang juga terbentuk dari bias stereotipe itu sendiri.

Selain stereotipe yang telah mengakar terdapat juga sikap diskriminatif yang diterima oleh mahasiswa timur yang tinggal di daerah perantauan. Dalam persoalan ini, bentuk dari diskriminatif yang diterima oleh mahasiswa timur ialah diskriminasi atas ras mahasiswa timur yang mana memiliki perbedaan dalam ciri fisik dengan masyarakat setempat. Beragam ujaran yang menyudutkan seperti kata-kata yang tergolong rasis menjadikan mereka akhirnya memutuskan untuk memilih tinggal secara berkelompok dengan para mahasiswa perantau lainnya yang berasal dari Indonesia Timur. Selain ujaran yang bersifat menyudutkan, terdapat juga bentuk diskriminasi lain seperti penolakan mahasiswa timur dalam tinggal di indekos yang terdapat di beberapa tempat. Penolakan-penolakan para pemilik kost terhadap mahasiswa timur dikarenakan para mahasiswa berasal dari Indonesia Timur (Sidik, 2016). Alasan yang sangat tidak rasional inilah yang kemudian harus ditelan oleh mahasiswa Timur dan menjadikan mereka mencari lagi tempat untuk ditinggali.

Pandangan Masyarakat Lokal kepada Mahasiswa Perantau

Sebagian besar masyarakat asli Yogyakarta memandang negatif etnis pendatang khususnya yang berasal dari daerah Indonesia Timur. Salah satu yang mendasari pandangan tersebut yaitu peristiwa perusakan kantor pos polisi di Kotabaru Yogyakarta yang dianggap dilakukan oleh sekelompok orang asal Papua (Kumoro, 2017). Tidak hanya itu, peristiwa yang dikenal dengan julukan “Lapas Cebongan” juga banyak menyita perhatian publik. Dimana terjadinya peristiwa pembantaian secara sadis terhadap empat orang tersangka kasus pembunuhan

asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilakukan oleh Kopassus di Lapas Cebongan pada tanggal 23 Maret 2013. Mirisnya, peristiwa tersebut malah mendapat dukungan penuh dari berbagai kelompok masyarakat Yogyakarta. Sebagian masyarakat Yogyakarta beranggapan bahwa keberadaan “orang timur” yang merantau didaerahnya merupakan sumber keributan yang mengganggu masyarakat sekitar. Bahkan pada saat itu banyak terpampang spanduk-spanduk diberbagai sudut kota yang menyatakan ketidaksukaannya terhadap keberadaan perantau dari daerah Indonesia Timur. Spanduk-spanduk tersebut diantaranya bertuliskan “basmi preman”, “I love Kopassus”, “seribu preman mati kami tak rugi”, sampai bertuliskan “premanisme bukan sifat asli orang Yogya, pergi atau kita usir!”.

Dari beberapa peristiwa tersebut menunjukkan adanya sentimen kedaerahan mampu memunculkan stereotip tertentu. Beberapa kerusuhan yang sudah terjadi secara tidak langsung membawa label negatif terhadap pendatang dari daerah Indonesia Timur atau yang disebut sebagai “orang timur” tersebut secara keseluruhan. Meskipun kerusuhan yang terjadi tidak sepenuhnya terjadi akibat tindakan “orang timur”, melainkan kerusuhan tersebut bisa saja hanya dilakukan oleh beberapa oknum tertentu. Akan tetapi, hal tersebut membawa pengaruh terhadap sikap masyarakat Yogyakarta (masyarakat asal) kepada pendatang dari daerah Timur Indonesia secara keseluruhan.

Di lain sisi, kegiatan positif yang dilakukan oleh perantau asal daerah Timur Indonesia seperti pertunjukan tari tradisional asli Papua yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2014 di alun-alun selatan Yogyakarta tidak serta merta merubah pandangan masyarakat Yogyakarta terhadap “orang timur” tersebut (Kumoro, 2017). Tindakan positif tersebut terkalahkan dengan adanya berbagai kerusuhan yang sering terjadi sehingga cukup sulit untuk merubah pandangan negatif yang sudah lama melekat pada para perantau asal daerah Timur Indonesia. Selain itu, interaksi sosial yang cenderung tertutup memungkinkan para pendatang “orang timur” mendapatkan stigma negatif yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dimana keberadaan oknum-oknum yang memicu kerusuhan turut memperburuk keadaan sehingga dengan begitu masyarakat Yogyakarta melabeli negatif para pendatang tersebut secara keseluruhan. Sedangkan kegiatan positif seperti pertunjukan tari Yospan seperti yang telah dilakukan oleh mahasiswa asal Sorong di alun-alun selatan tidak menjadi pertimbangan dalam penilaian terhadap para perantau asal daerah Timur Indonesia.

Di lain peristiwa, di daerah Tambakbayan, Babarsari, Yogyakarta terdapat bukti nyata sikap sinis masyarakat terhadap para perantau asal daerah Timur Indonesia (Awe, 2019). Diketahui sejak tahun 2012 terdapat penolakan terhadap mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) baik secara langsung maupun melalui perantara iklan tempat kos dan kontrakan. Dimana secara umum diberlakukan penyeleksian terhadap calon penghuni kos dan kontrakan berdasarkan beberapa identitas etnis melalui ciri fisik secara biologis seperti warna kulit, bentuk rambut, dan cara berkomunikasi. Belakangan diketahui bahwa penolakan tersebut disebabkan oleh pandangan stereotip, prasangka, dan framing negatif yang berkaitan dengan perilaku mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bertentangan dengan norma yang berlaku di lingkungan Tambakbayan.

Namun, berbagai upaya penolakan tersebut tidak sepenuhnya bersifat generik. Sebagian warga Tambakbayan memiliki pandangan tersendiri dalam menyikapi keberadaan para perantau asal daerah Timur Indonesia tersebut. Dalam interaksi sosialnya masih terdapat kedekatan emosional, rasa kekeluargaan, ikatan perkawinan, kepentingan ekonomi, maupun kesamaan identitas agama yang menyatukan mereka. Oleh sebab itu, tidak semua warga bersikap menolak kehadiran perantau asal Nusa Tenggara Timur (NTT), juga terdapat sebagian warga yang bersikap terbuka atas kehadiran mereka di wilayah Tambakbayan. Itu semua bergantung pada stigma dan pola pikir masing-masing warga dalam menghadapi kehadiran perantau asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dan upaya untuk bersikap terbuka dalam interaksi sosialnya.

Teori Konflik dalam Segregasi Sosial Mahasiswa Perantau di Yogyakarta

Dalam kehidupan, masyarakat membutuhkan interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial yang terjadi ditentukan oleh adanya tujuan dan

kepentingan dari masing – masing. Interaksi sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat yang homogen, dan lebih sulit terjadi pada masyarakat yang heterogen. Salah satu contoh interaksi sosial dan hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang heterogen adalah pada masyarakat lokal Yogyakarta dengan mahasiswa pendatang dari daerah Timur Indonesia. Mahasiswa Timur Indonesia datang ke Yogyakarta disebabkan oleh adanya anggapan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Pulau Jawa lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Mahasiswa pendatang tersebut perlu untuk beradaptasi dengan masyarakat mayoritas (lokal) Yogyakarta yang memiliki kebudayaan berbeda dengan mereka. Perbedaan budaya ini memicu munculnya konflik. Menurut Teori Konflik yang dikemukakan oleh Dahrendrof, terjadinya konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri individual dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, adat istiadat, keyakinan, kepandaian, pengetahuan dan lain sebagainya. Konsep ini dapat menggambarkan dan sesuai dengan kondisi masyarakat lokal Yogyakarta dan mahasiswa Timur. Perbedaan budaya dan kebiasaan menyebabkan adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang dianggap benar dan salah. Kuatnya framing yang dilakukan oleh media dan lainnya turut mempengaruhi stereotip masyarakat terhadap mahasiswa Timur dan dapat memperkeruh hubungan antara dua masyarakat. Dalam prosesnya, masyarakat akan mempermasalahkan mengenai jenis kulit yang berbeda, kebiasaan mahasiswa yang berbeda dengan kultur masyarakat mayoritas, dan lain sebagainya. (<http://digilib.uinsby.ac.id/>, diakses pada 30 Mei 2020 pukul 10:30 WIB)

Dalam perspektif Teori Konflik Karl Marx, dikenal tentang masyarakat mayoritas dan minoritas. Masyarakat mayoritas cenderung memiliki kekuatan untuk berusaha menguasai masyarakat minoritas. Hal ini dapat dilihat dari adanya perilaku diskriminatif dari kelompok mayoritas yang dilakukan agar kelompok minoritas menjadi tidak berdaya dan tidak bisa menghalangi atau mengganggu adat istiadat dan kepentingan yang dimiliki. Perilaku diskriminatif tersebut kemudian menyebabkan mahasiswa pendatang memilih untuk hidup secara berkelompok dengan masyarakat yang berasal dari daerah yang sama atau dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama dengan mereka. Pilihan mahasiswa pendatang untuk hidup secara berkelompok ini merupakan salah satu dampak lain dari adanya konflik sosial. Hubungan yang terjalin di dalam internal kelompok mahasiswa pendatang dari Timur Indonesia semakin menguat yang disebabkan adanya kondisi, perasaan, dan musuh bersama dari luar. (sumber: <http://digilib.uinsby.ac.id/>, diakses pada 30 Mei 2020 pukul: 11.00 WIB)

Masyarakat minoritas juga memiliki kemungkinan untuk melakukan pemberontakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kerusuhan yang dilakukan oleh segelintir mahasiswa Timur. Aksi ini tentu saja tidak dibenarkan dan dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat lokal maupun secara aturan umum. Namun di sisi lain, banyaknya tekanan dan framing – framing yang mereka terima menyebabkan mahasiswa pendatang melakukan aksi kerusuhan. Kerusuhan yang dilakukan oleh mahasiswa pendatang tersebut bisa saja merupan sebuah ekspresi dalam menggambarkan kondisi mereka dan sebagai bentuk pemberontakan atas ketidakadilan dan diskriminasi yang mereka terima dari masyarakat mayoritas.

Masyarakat yang baik menurut Teori Konflik adalah masyarakat yang hidup dalam situasi konfliktual. Konflik dianggap sebagai kekuatan sosial utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ke tahap – tahap yang lebih sempurna. Meskipun konflik dapat menimbulkan kerusakan, namun di sisi lain konflik juga dapat menghadirkan konsensus baru dalam mengatur kehidupan masyarakat. hal tersebut dapat dilihat dari sikap sebagian warga Tambakbayan yang memiliki pandangan tersendiri dalam menyikapi keberadaan mahasiswa pendatang. Dalam prosesnya, masih terdapat kedekatan emosional, rasa kekeluargaan, ikatan perkawinan, kepentingan ekonomi, maupun kesamaan identitas agama yang menyatukan mereka. Oleh sebab itu, tidak semua warga bersikap menolak kehadiran perantau asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut dapat terjadi apabila masyarakat memiliki sikap terbuka atas kehadiran mahasiswa pendatang di wilayah Tambakbayan.

Meskipun interaksi yang tercipta harmonis, masih terdapat hambatan interaksi antara

masyarakat Gendeng dengan mahasiswa NTT yang terjadi akibat miss komunikasi. Miss komunikasi tersebut dapat menyebabkan munculnya konflik. Namun, adanya sikap terbuka yang dimiliki oleh kedua masyarakat tersebut kemudian dapat memberikan pola pikir baru bagi masyarakat lokal bahwa dengan adanya konflik dan perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang baik dan buruk dapat diselesaikan dengan membentuk suatu konsensus baru yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua masyarakat. Pada dasarnya menurut Teori Konflik, tidak ada satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota maupun dengan kelompok masyarakat yang lain. Sebab, kehidupan masyarakat selalu mengalami dinamika seiring dengan adanya perubahan sosial dalam kehidupan.

Simpulan

Pola interaksi yang tercipta antara mahasiswa pendatang dari Timur Indonesia dengan masyarakat lokal Yogyakarta cenderung tidak berjalan dengan harmonis. Hal tersebut dikarenakan adanya kebudayaan yang berbeda sehingga mempengaruhi tingkah laku dalam kesehariannya. Budaya yang berbeda tersebut juga menyebabkan pandangan mengenai apa yang benar dan apa yang salah pun juga berbeda. Namun, meskipun hubungan dan interaksi yang tercipta cenderung tidak harmonis, masih ada masyarakat yang dapat bersosialisasi dengan baik dengan pendatang, yaitu di daerah Gendeng, Yogyakarta. Hubungan yang harmonis tersebut disebabkan oleh kemampuan 2 masyarakat yang berbeda kebudayaan tersebut untuk saling menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memiliki kesadaran akan tanggungjawab sosial. Adanya stereotip dari masyarakat lokal serta adanya apatisme dan cultural shock dari mahasiswa pendatang menjadi faktor segregasi sosial mayoritas Mahasiswa Timur Indonesia.

Referensi/Daftar Pustaka

- (t.thn.). Diambil kembali dari <http://digilip.uinsby.ac.id/15663/Bab%201.pdf>
- Anggaunitakiranantika, W. (2010). *MIGRAN MAHASISWA KE KOTA MALANG*.
- Awe, F. (2019). *Entitas di Perkotaan: Konlik Mahasiswa Nusa Tenggara Timur dan Warga tambakbayan, Babarsari, Yogyakarta*.
- Creswell, J. W. (2016). *RESEARCH DESIGN (1 st ed.)*. Pustaka Belajar.
- Djam'an, S. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ginintasaki, R. (t.thn.). Diambil kembali dari http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU_GININTASAsI/INTERAKSI_SOSIAL.pdf
- Ibrahim, R. N. (t.thn.). *Kekerasan Simbolik Dalam Relasi antar Etnis (Studi Mahasiswa Etnis Papua Dalam Pergaulan antar Etnis pada Lingkup Kampus Surabaya)*. *Jurnal Sosial Humaniora*.
- Kumoro, N. B. (2017). *"Batas yang Tertutup dan yang Terurai" Studi Kasus Batas Etnis mahasiswa dari papua dan kalimantan Barat di Yogyakarta*. Kentja Press.
- Mahyuddin. (2018). *Dinamika Multikulturalisme Mahasiswa Papua di Yogyakarta*.
- Paturusi, S. A. (2016). *Segregsi Ruang Sosial Antara Pendatang Dengan Penduduk Asli Pada Permukiman Perkotaan di Denpasar*. *Jurnal Kajian Bali*.
- (2019). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. Diambil kembali dari <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2019/08/16/fe0f0460b0cdd1bcd76a4314/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2019.html>

- Rahma, D. J. (2017). Culture shock Pada Mahasiswa Papua di Yogyakarta Ditinjau dari Dukungan Sosial.
- Ritzer, G. (2014). *SOSIOLOGI ILMU BERPARADIGMA GANDA (11 th ed.)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Saputra, I. D. (t.thn.). *Perbedaan Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur*. Dipetik april 24, 2020, dari https://www.academia.edu/10466407/Perbedaan_Pelaksanaan_Pendidikan_di_Indonesia_Bagian_Barat_dan_Bagian_Timur
- Sidik, S. K. (2016). Diskriminasi Mahasiswa Papua di Yogyakarta Tahun 2016.
- Susan, N. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Kencana.
- Wakano, A. (2017). Solidaritas Mahasiswa Dalam Meminimalisir Problematika Multikultural. Diambil kembali dari https://www.academia.edu/35427582/SOLIDARITAS_MAHASISWA_DALAM_MEMINIMALISIR_PROBLEMATIKA_MULTIKULTURAL
- Wijanarko, E. d. (2013). Studi fenomenologi Pengalaman Penyesuaian Diri Mahasiswa Papua di Surabaya. *jurnal psikologi teori dan terapan* .
- Yunus, J. (2017). interaksi Sosial Masyarakat lokal yogyakarta dengan Mahasiswa Pendetang Nusa Tenggara Timur di kelurahan Baciro Kecamatan gondokusuman, RW 20 dan Rt 85 yogyakarta.



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Halaman 52-65



Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas untuk Muslim Milenial di Era Digital

Mila Nabila Zahara

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Dadan Wildan

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Siti Komariah

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

| Kata Kunci | Abstrak |
|-------------------------|--|
| Hijrah | Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi paradigma gerakan hijrah yang terjadi pada generasi muslim milenial di era digital melalui <i>platform</i> media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian fenomenologi yang dilakukan pada gerakan pemuda hijrah yang dikenal dengan nama Shift. Partisipan dalam penelitian ini adalah pelaku hijrah, pendiri gerakan hijrah, juga keluarga dari pelaku hijrah. Penelitian ini dikaji melalui konsep gerakan sosial sebagai salah satu perilaku kolektif, yang menjadikan gerakan hijrah pada generasi milenial menjadi fenomena baru dalam gerakan Islam di Indonesia yang menarik untuk dikaji. Temuan penelitian mencerminkan bahwa gerakan hijrah terjadi secara komunal melahirkan sebuah gerakan sosial berbasis keagamaan. Gerakan muslim milenial telah membangun identitas baru sebagai umat beragama yang taat pada aturan islam. Gerakan hijrah memiliki maksud menjadikan anak muda dekat dengan Al-Quran, shalat tepat waktu, giat mencari ilmu agama dan menebarkan syiar Islam melalui <i>platform</i> media sosial. Dalam aktivitasnya, anggota Shift terdiri dari berbagai anak muda dengan beragam golongan, seperti komunitas motor, skuter, skateboarder di sekitar Kota Bandung. Terlepas dari identitasnya sebagai pemuda pada umumnya, dengan keikutsertaan dalam gerakan hijrah ini adanya konstruksi identitas dan pembingkaiian kultural mereka menjadi pemuda gaul namun taat dalam beragama. |
| Gerakan Sosial | |
| Konstruksi Identitas | |
| <i>Cultural Framing</i> | |
| <i>Social Media</i> | |
| Diterima | 17 Mei 2020 |
| Review | 24 Mei 2020 |
| Revisi | 7 Juni 2020 |
| Penerimaan | 14 Juni 2020 |
| Copyedit | 15-26 Juni 2020 |
| Publikasi | 30 Juni 2020 |



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Pages 52-65



Hijrah Movement: Millennial Muslim Identity Seeking in the Digital Era

Mila Nabila Zahara

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Dadan Wildan

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

Siti Komariah

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia

| Keywords | Abstract |
|-----------------------|--|
| Hijrah | This article aims to explore the hijrah movement paradigm among Muslim millennials in the digital era through social media platforms. Using a phenomenology method implemented to the hijrah movement of the youth known as Shift. The participants are those involved in the movement, the founder, and the family of the involved. This research studies the movement using the concept of social movement as a collective action, making the movement a new phenomenon of Indonesian Islam movement that is noteworthy. The findings indicate that the movement happens as a communal movement, giving birth of a religion-based social movement. This shaped a new identity as religious youth bound to the teachings of Islam. The movement itself aims to enable the youth get closer to Al-Quran, do their prayers on time, dedicate themselves to seeking religion knowledge, and spread the teachings of Islam through social media platforms. In their activities, Shift members comprise of youth from various backgrounds: motorcycle community, scooter community, skateboarding community, among all, mostly in Bandung. Apart from their common identity as youth, by taking part in the movement, they experience the construction of identity and cultural framing that illuminates them as “sociable youth” yet religiously devoted. |
| Social Movement | |
| Identity Construction | |
| Cultural Framing | |
| Social Media | |
| Submission | 17 Mei 2020 |
| Review | 24 Mei 2020 |
| Revision | 7 Juni 2020 |
| Acceptance | 14 Juni 2020 |
| Copyediting | 15-26 Juni 2020 |
| Publication | 30 Juni 2020 |

Pendahuluan

Dinamika masyarakat yang berkembang saat ini memunculkan karakter masyarakat dengan visi multikultural dan multireligius, sehingga adakalanya dianggap mengancam identitas lokal. Ancaman ini berupa krisis identitas dan kehilangan orientasi nilai-nilai moral, etika dan spiritual. Masyarakat akan merasa kehilangan identitas diri yang disebabkan dinamika masyarakat yang cenderung cepat sehingga berdampak kepada aspek kehidupan baik aspek moral, norma, etika, spiritual, hingga tata kehidupan lainnya (Rahmawati, 2018). Keresahan masyarakat akan dinamika masyarakat yang dapat mengancam krisis identitas, melahirkan peluang berkembangnya gerakan sosial yang semakin luas dan terbuka. Kemunculan gerakan sosial baru (*new social movement*) menjadi satu wacana yang berkembang dalam masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Hadirnya gerakan sosial baru ini, berkembang sesuai kecenderungan orientasi pembangunan dan modernisasi yang sedang berlangsung dalam suatu negara yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan krisis identitas ini. Pendekatan gerakan sosial baru, menjadi bentuk pengetahuan yang sebelumnya diilhami dari keprihatinan akan krisis identitas yang terjadi di masyarakat (Porta & Pavan, 2017).

Gerakan sosial baru keagamaan menjadi salah satu upaya mengatasi permasalahan krisis identitas dalam aspek religiustitas individu dalam kehidupannya. Di Indonesia, belakangan muncul suatu gerakan yang diinisiasi oleh sekelompok muslim milineal yang bertransformasi dengan melakukan perubahan dari aspek keagamaan. Gerakan keagamaan berupa hijrah menjadi salah satu bentuk transformasi agama yang diimplementasikan dalam perubahan perilaku agama dalam wadah aktivitas kelompok (Rochimah, 2018). Gerakan keagamaan berkembang dalam wujud gerakan hijrah yang diinisiasi para generasi milenial. Fenomena gerakan hijrah, cukup populer di kalangan generasi muda yang lekat dengan migrasi dari gaya hidup non-Islam ke Islam (Lanti, Ebih, & Dermawan, 2019). Peranan dan posisi aktor milineal dalam gerakan hijrah secara kolektif telah membangun identitas baru sebagai sebagai umat beragama yang taat pada aturan islam.

Sebagai sebuah fenomena gerakan sosial, hijrah menjadi bentuk tindakan kolektif yang memberikan kesadaran terhadap pentingnya agama dalam kehidupan manusia (Saputra, Pujati, & Simanihuruk, 2020). Pasalnya, hijrah pada dasarnya menjadi ritus personal yang mulai bergeser menjadi gerakan yang dilakukan secara komunal. Gerakan hijrah menjadi salah satu gerakan dakwah populer yang berkembang menjadi sebuah tren sosial yang diikuti secara komunal (Addini, 2019). Jika melirik sejarah, perkembangan hijrah sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, diantaranya sahabat Umar bin Khattab yang mulanya dikenal sebagai seorang preman penentang Islam paling keras yang kemudian hijrah berbalik menjadi pembela Islam paling gigih. Peristiwa hijrah sudah terlihat saat Nabi Muhammad SAW membangun sosiokultural islami di Madinah dengan melakukan Muakhot (mempersaudarakan) kaum muhajirin dengan kaum anshar (Ibrahim, 2016; Fajriani & Sugandi, 2019).

Masifnya gerakan hijrah sebagai fenomena gerakan sosial baru sebagai salah satu gerakan Islam menjadi bentuk realitas sosial yang berdinamika di masyarakat. Realitas sosial ini terjadi di masyarakat baik secara global maupun nasional, menunjukkan bahwa banyak gerakan sosial mengatasnamakan hijrah. Gambaran gerakan sosial berbasis Islam ini sudah menjadi isu yang sejak dahulu dibahas. Milton-Edwards (1992) dalam penelitiannya mengungkapkan salah satu fenomena gerakan sosial Islam yang menyita perhatian dunia adalah pada Desember 1987 yang mana terjadi pemberontakan di Palestina dengan pasukan Israel. Sejak pemberontakan penyalahgunaan hak-hak agama oleh pasukan israel, pemerintah mengintensifkan dan memajukan seruan jihad sebagai makna dari hijrah oleh gerakan Islam di Palestina. Selain itu, gerakan sosial juga terjadi di Amerika Serikat yaitu gerakan *World Hijab Day*. Raihanah (2017) dalam bukunya mengungkapkan bahwa, setiap tanggal 1 Februari diperingati sebagai *World Hijab Day*, yang gerakan ini diinisiasi oleh Nazma Khan. Gerakan ini terbentuk disebabkan karena adanya anggapan yang memposisikan jilbab sebagai narasi Islamphobia, yang menjadikan adanya perlakuan diskriminatif. Maka dari itu, gerakan ini dianggap sebagai gerakan protes yang bertujuan untuk solidaritas bagi para perempuan Muslim agar mengenakan hijab di seluruh dunia.

Di dalam negeri isu gerakan sosial berbasis keagamaan sudah banyak terjadi, Pramesuari

(2020) dalam penelitiannya mengungkapkan mengenai Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP). Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang diinisiasi oleh La Ode Munafar, merupakan salah satu gerakan yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pacaran dan menentang praktek perzinahan, karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Adanya gerakan sosial ini menganggap pacaran dapat merusak generasi bangsa terutama kaum muda-mudinya, sehingga dalam Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran lebih mengajak untuk menerapkan pergaulan antar sesama manusia dengan menggunakan konsep Islam. Selain itu, gerakan sosial berbasis keagamaan yang terjadi di Indonesia dan mendapat perhatian yang sangat besar adalah Gerakan 212. Susilowati, Yunus, & Sholeh (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa, gerakan 212 dianggap sebagai suatu gerakan sosial baru yang memiliki identitas *religious* atau *moral force* yang terjadi secara damai. Bentuk aksi dalam gerakan 212 menjadi salah satu bentuk adanya bela negara dan bela *tauhid* yang menghadirkan semua elemen umat Muslim di Indonesia tanpa memandang status, kelompok, organisasi, partai atau ras. Adanya gerakan 212 ini menjadikan identitas Islam terlihat sebagai orang yang cinta damai dan tetap menjaga etika dalam menyampaikan aspirasi. Beragam fenomena diatas, jelas tidak mengindahkan makna hijrah yang sebenarnya. Antara selebrasi dan dehiyrahisasi ditengah geliat kesadaran Muslim untuk melaksanakan hijrah. Meski demikian, di Indonesia adanya gerakan hijrah dengan makna sebenarnya tetap menjadi gelombang kebangkitan Islam dalam nuansa baru karena terjadi secara masif, meluasnya pengaruh gerakan hijrah dan dapat menghimpun banyak pengikut di masyarakat.

Gerakan keagamaan berupa hijrah menjadi salah satu bentuk transformasi agama yang diimplementasikan dalam perubahan perilaku agama dalam wadah aktivitas kelompok (Rochimah, 2018). Kehadiran gerakan hijrah secara tidak langsung menjadi agensi yang dianggap efektif sebagai transformasi dengan menjadikan aspek agama sebagai wadah perubahan. Gerakan keagamaan memiliki agensi yang kuat, yang mana Marx mengungkapkan bahwa agama menjadi candu atau inspirasi, sehingga peran agama sangat kuat dalam menciptakan perubahan dalam masyarakat (Morris, 2019). Fenomena gerakan hijrah, cukup populer di kalangan generasi muda yang lekat dengan migrasi dari gaya hidup non-Islam ke Islam (Lanti, Ebih, & Dermawan, 2019). Peranan dan posisi aktor milineal dalam gerakan hijrah secara kolektif telah membangun identitas baru sebagai sebagai umat beragama yang taat pada aturan islam.

Generasi muslim milenial merupakan elemen masyarakat yang membentuk pola-pola dalam fenomena hijrah. Makna hijrah bagi generasi muslim milenial, berangkat dari adanya kesadaran kolektif tentang identitas diri yang merupakan bagian dari Islam, sehingga timbul kesadaran untuk berkontribusi untuk mengamalkan agamanya (Saputra, Pujiati, & Simanihuruk, 2020). James, Elizabeth, & Hope (2015) dalam bukunya menjabarkan hasil riset berupa survei pandangan generasi Muslim milenial mengenai peran agama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari negara-negara yang dijadikan sampel penelitian menyatakan bahwa generasi Muslim milenial meyakini kebenaran agama Islam yang dapat berperan penting dalam segala aspek kehidupan, salah satunya mengenai masa depan sebuah negara. Penelitian dilakukan oleh Fajriani & Sugandi (2019) yang mengungkapkan bahwa faktor pendorong generasi milenial melakukan hijrah karena merasa kekosongan jiwa yang menimbulkan kejenuhan, mereka lebih berfikir kritis dan mudah mengakses informasi keagamaan. Hal tersebut menimbulkan para generasi muslim milenial ini, lebih terbuka untuk mengubah gaya hidup ketimuran sebagai gaya hidup baru yang sesuai dengan ajaran agama. Secara tidak langsung perubahan gaya hidup yang cenderung religius akan membentuk bingkai kultural yang mendukung perkembangan gerakan hijrah di kalangan generasi muslim milenial. Istilah hijrah mengarahkan individu pada sebuah proses dimana ia berusaha untuk menjadi muslim yang lebih taat (Sunesti, Hasan, & Azca, 2018). Maka dari itu, hijrah bagi para generasi muslim milenial dapat dianggap sebagai media dalam menciptakan identitas religius yang dibingkai dalam konstruksi gerakan dakwah.

Berkembangnya fenomena hijrah menurut Widhana (2019) dalam artikel beritanya di Tirto.id mengungkapkan bahwa terdapat beberapa alasan begitu masifnya gerakan hijrah terjadi yaitu (1) Popularitas buku ragam paham Islam (Salafi, Tarbawi, Tahriri, dll); (2) Kajian keislaman berbasis kampus, masjid, dan jemaah tablig; (3) Akses internet dan media sosial mengenai literatur Islam populer; (4) Kemunculan Ustadz dan Selebriti; (5) Kemunculan komunitas-

komunitas hijrah; (6) Topik ceramah yang ringan yang membahas pergaulan anak muda; dan (7) Aktivitas nondakwah (Fotografi, Desain, Marketing, dll) yang dikaitkan keislaman. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fajriani & Sugandi (2019), yang mengungkapkan bahwa faktor pendorong generasi Muslim milenial melakukan hijrah karena merasa kekosongan jiwa yang menimbulkan kejenuhan, mereka lebih berfikir kritis dan mudah mengakses informasi keagamaan. Hal tersebut menimbulkan para generasi Muslim milenial ini, lebih terbuka untuk mengubah gaya hidup ketimuran sebagai gaya hidup baru yang sesuai dengan ajaran agama. Secara tidak langsung perubahan gaya hidup yang cenderung religius akan membentuk bingkai kultural yang mendukung perkembangan gerakan hijrah di kalangan generasi Muslim milenial. Istilah hijrah mengarahkan individu pada sebuah proses dimana ia berusaha untuk menjadi Muslim yang lebih taat (Sunesti, Hasan, & Azca, 2018).

Fenomena hijrah juga menjangkau segmen yang lebih luas dengan banyaknya kajian musyawarah atau tabligh akbar, yang dihadiri *public figure* Indonesia dan ustadz populer untuk mengajak orang lain untuk mengikuti teladan mereka. Dengan menggaet para *public figure* Indonesia dan ustadz populer, gerakan hijrah menjadi magnet yang kuat dalam mengenalkan fenomena hijrah melalui berdakwah yang dikemas secara menarik dan kekinian (Amna, 2019). Beberapa tokoh agama dan *public figure* sadar bahwa dengan perkembangan teknologi menjadikan lebih mudah untuk meng*influence* para generasi muslim milenial untuk turut serta dalam gerakan hijrah ini. Para generasi milenial yang sangat menjadikan gadget sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesehariannya, dimanfaatkan oleh ustadz populer untuk menyampaikan materi dakwah disampaikan dengan cara yang mudah dicerna, sangat disenangi oleh anak muda, sehingga adanya ketertarikan dalam mendalami agama (Fatoni & Rais, 2018).

Kehadiran Ustadz dan Selebriti yang melakukan gerakan hijrah menjadi media kampanye sosial berupa hijrah. Kampanye gerakan sosial memanfaatkan berbagai sumber daya dengan memikirkan bagaimana gerakan sosial dipandang sebagai perspektif kesadaran dan perilaku kolektif yang terus berkembang (Corrigall-Brown, 2016).

Adanya interaksi sosial yang terus menerus berpotensi menciptakan kesadaran kolektif, seperti mendengar khutbah, tausiah, dan diskusi-diskusi dalam setiap pengajian rutin yang mereka lakukan. Gerakan sosial menjadi salah satu wadah kolektif sebagai upaya tercapainya sebuah tujuan baik dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu demi kepentingan masyarakat. Aktivitas gerakan sosial menjadi tindakan kolektif yang dianggap sebagai agen perubahan sosial dengan cara menata ulang kehidupan masyarakat sesuai apa yang dikehendaki (Millward & Takhar, 2019). Implementasi gerakan sosial dicapai dengan mencoba untuk mengorganisir dan memobilisasi secara efektif berkenaan dengan apa yang akan dirubah. Dengan kata lain, gerakan sosial sebagai upaya kolektif terhadap sebuah struktur sosial gerakan sosial menjadi bagian dalam rangka mengaktualisasikan perubahan berupa kesadaran sosial yang ditransmisikan secara nyata dalam simbol-simbol gerakan (Nas, 2016; Manski, 2018). Maka dari itu, hijrah menjadi media dalam menciptakan identitas atau simbol keagamaan, berbentuk perilaku kolektif berbasis agama yang dilakukan oleh para generasi Muslim milenial dengan memanfaatkan konstruksi gerakan dakwah yang sesuai zaman.

Media sosial berperan penting dalam penyebaran gagasan hijrah, terutama bagi generasi muslim milenial yang dapat mengakomodasi fungsi, peran, dan kegiatan terkait ritual keagamaan (Zulhazmi & Hastuti, 2018). Kehadiran media sosial ini akan lebih memudahkan bagi generasi muslim milenial dalam pencarian jati diri identitasnya melalui panutannya dalam melakukan hijrah. Strategi penyebaran agama melalui media sosial ini, dimanfaatkan untuk menyasar generasi milenial yang hidup di era digital. Media sosial menjadi *platform* populer dalam memobilisasi pesan-pesan Islam kepada generasi milenial (Hew, 2018). Strategi komunikasi ala kaum milenial terbukti mampu membawa dampak, dengan banyaknya anak muda yang memutuskan untuk berhijrah dengan mengubah gaya hidup, baik dari aspek keimanan maupun penampilan. Media sosial dapat memudahkan dalam penyebaran gerakan hijrah ini dengan memposting segala konten Islam, yang menjadikan Muslim lainnya tergerak menjadi insan yang religius (Pramiyanti, 2019).

Gaya komunikasi yang disampaikan dalam media sosial, dapat merubah persepsi masyarakat

akan makna hijrah. Fenomena menarik gerakan hijrah disampaikan oleh Mahanani & Putri (2019), terdapat komunitas perempuan yang menjadikan media sosial sebagai wadah dalam melakukan gerakan hijrahnya. Para anggota perempuan dengan kerudung cadar, niqab, dan syar'i memposting foto *selfie* di instagram dengan hastag #cadarsquad. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena gerakan hijrah mencoba mengajak para Muslim khususnya kalangan generasi milenial untuk menyelesaikan perintah dan menghindari larangan Allah dengan benar berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Dari adanya gerakan hijrah yang ditampilkan di media sosial, membuktikan bahwa gerakan hijrah dapat mengubah persepsi mengenai makna aurat yang banyak distigmakan radikal. Gerakan hijrah dengan keterbukaan informasi, penggunaan nilai-nilai keislaman dapat menghasilkan *value* yang menarik dan menjadikan gerakan hijrah dapat terimplementasi dengan baik (Addini, 2019).

Artikel ini akan menelaah perilaku kolektif pada gerakan hijrah yang dilakukan generasi muslim millennial, pada komunitas pemuda hijrah (*Shift*) di Bandung yang diimplementasikan melalui media sosial. Ceramah yang disampaikan oleh sebagian besar para Ustadz penggiat *Shift* seperti Ustadz Hanan Attaki disebarkan di media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Video yang di unggah melalui *platform* Youtube selalu ramai ditonton oleh mereka yang sedang mendalami ilmu agama melalui internet. Tidak jarang pula banyak kaum muda yang tengah mengalami krisis kepercayaan, menjadikan *channel* Youtube gerakan Pemuda Hijrah sebagai sarana untuk *menchanger* diri menjadi pribadi yang kembali menerapkan unsur-unsur keislaman dalam keseharian. Media sosial dianggap menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan gerakan hijrah pada masyarakat modern saat ini (Haramain, et al., 2020). Sebagian testimoni dari mereka beranggapan setelah menonton kajian tersebut merasa diri lebih tenang, lebih giat untuk beribadah, merubah perilaku, menolong sesama (dalam kegiatan *charity*) agar kembali hidup sesuai dengan kaidah keislaman.

Konstruksi nilai kajian keislaman yang diikuti oleh generasi muslim milenial dapat mengkonstruksikan identitas dengan transformasi dari nilai-nilai moralitas kesalehan menuju "simbolisasi islami". Generasi muslim milenial yang dapat memaknai gerakan hijrah, juga nantinya akan menunjukkan sejauh mana mereka memiliki identitas sebagai muslim yang taat (Khan, 2019). Masyarakat yang tergabung dalam gerakan sosial baru ini memaknai hijrah sebagai suatu gerakan kolektif kebangsaan. Selain membenahi diri secara internal, generasi muslim milenial juga harus menjadikan hijrah sebagai semangat untuk turut berkontribusi memajukan negara.

Metodologi

Fenomena hijrah sebagai gerakan sosial baru bagi generasi muslim milenial melalui kajian kesialaman di media sosial diteliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena dengan masalah yang akan diteliti berupa fenomena sosial. Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena hijrah yang dialami oleh generasi muslim milenial misalnya berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang secara holistik di deksripsikan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggali makna yang dialami oleh individu atau sekelompok orang yang melakukan hijrah. Menurut Denzin & Lincoln (2009), kecenderungan dipilihnya penelitian ini didasarkan pada masalah hijrah banyak dialami dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi sebuah pengalaman nyata. Fenomena hijrah yang kini banyak dialami oleh generasi muslim milenial yang berupaya melakukan transformasi diri menjadi pribadi yang lebih taat terhadap agama melalui konstruksi identitas.

Hijrah menjadi suatu gerakan sosial baru karena mampu merubah seorang generasi milenial yang mulanya jarang melakukan ritus keagamaan bertransformasi secara massal menjadi generasi milenial yang taat agama. Pelaksanaan hijrah memberikan kesan untuk menggerakkan setiap muslim agar selalu ada dinamika dalam hidupnya (Ibrahim, 2016). Untuk menggali makna mengenai fenomena gerakan pemuda Islam yang mengkampanyekan hijrah yang beberapa tahun belakangan tengah berkembang di Indonesia, penelitian ini menggunakan studi fenomomenologi. Metode ini dianggap paling tepat karena dapat membangun pemahaman dari realitas yang tampak dan melihat suatu fenomena melalui orang yang mengalaminya.

Partisipan dalam penelitian ini adalah pengurus komunitas *shift*, 6 orang pelaku hijrah Ikhwan, 6 orang Akhwat yang tergabung dalam anggota komunitas *Shift* serta anggota keluarga dari pelaku hijrah sebagai informan pangkal untuk memperoleh data mengenai perubahan yang terjadi dari pelaku hijrah sebagai pengikut komunitas. Informan pokok dipilih berdasarkan keanggotaannya dalam komunitas *shift*, aktif mengikuti kajian dan kegiatan sosial komunitas, serta menunjukkan perubahan yang ditunjukkan dalam bentuk penampilan maupun perilaku seperti perubahan dalam berpakaian (memakai hijab *syari* untuk akhwat dan memakai celana cingkrang untuk ikhwan) dan rutin *sharing* ilmu keagamaan dan pengalaman hijrahnya di media sosial. Dalam aktivitasnya, anggota *Shift* terdiri dari berbagai anak muda dengan beragam golongan, seperti komunitas motor, skuter, skateboarder di sekitar Kota Bandung. Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana setiap informan untuk berbagi bercerita tentang bagaimana pengalamannya mengikuti kajian (baik online maupun offline) maupun tergabung dalam kepengurusan gerakan pemuda hijrah. Selanjutnya, peneliti hanya menjadi pendengar dari pengalaman yang disampaikan oleh partisipan dan peneliti menangkap makna dari pengalaman informan tersebut yang membuat dirinya melakukan hijrah. Maka dari itu, terlepas dari identitasnya sebagai pemuda pada umumnya, dengan keikutsertaan dalam gerakan hijrah ini adanya konstruksi identitas menjadi pemuda gaul namun taat dalam beragama.

Temuan dan Pembahasan

Gerakan Hijrah: Paradigma Gerakan Sosial Baru Generasi Muslim Milenial

Sejarah gerakan hijrah pada mulanya dianggap sebagai proses perpindahan dari Mekah ke Madinah. Proses hijrah tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi melibatkan dan mengajak semua ummat Islam yang semakin hari semakin ditekan oleh penguasa di Mekah saat itu. Banyak catatan penting yang dapat dijadikan sebagai sebuah renungan dalam peristiwa penting perjalanan Islam. Pertama, hijrah merupakan perjalanan batin, yang seyogyanya setiap manusia yang berhijrah dapat memaknai hijrah dengan makna masing-masing. Hijrah adalah suatu perjalanan rohani, dalam meninggalkan keburukan demi kehidupan yang lebih baik, dimana setiap manusia dapat memaknainya secara berbeda sesuai dengan keadaan rohani yang ia rasakan (Setiawan et al, 2017).

Kedua, hijrah merupakan pengalaman tentang pembebasan, baik secara historis maupun spiritual. Perbedaan pengalaman itu pula yang membuat manusia memiliki makna tersendiri pada hijrah. Hijrah adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik, hijrah pun tidak diartikan secara sempit melalui gaya penampilan seseorang, melainkan memiliki definisi yang sangat luas dan beragam dimana pemaknaan hijrah dapat berbeda-beda pada setiap manusia yang melaksanakannya tergantung pada pengalaman, tujuan hidup, alasan, situasi, dan kondisi seseorang (Ramadhan, 2007). Ketiga, niat dalam hijrah lebih luas adalah visinya berupa niat yang matang. Hijrah tentu tidak dapat dilakukan secara fokus dan optimal, karena yang menjadi niat seseorang dalam melakukan hijrah akan didapatkan oleh mereka yang hijrah.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab al-Aiman wa an-Nudzur, Nabi mengatakan:

“Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi tiap orang apa yang diniatinya. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi”. (HR. Bukhari, hadits No. 6689).

Dengan mengikuti apa yang disabdakan Nabi, penting untuk menentukan niat sebelum melakukan hijrah. Maka, di sini sesungguhnya urgensi dari hijrah, adalah tentang bagaimana hijrah tidak hanya semata-mata sebagai sebuah aktifitas dalam rangka strategi dan pengorbanan, namun jauh di balik itu, niat menjadi faktor utama. Persepsi ini menyatakan

bahwa pada zaman Nabi, pelaksanaan perintah dan tugas agama adalah tujuan utama hijrah (Uberman & Shay, 2016; Fajriani & Sugandi, 2019)

Fenomena hijrah menjadi fenomena sosial yang menandai adanya fase krisis dalam diri manusia, khususnya di kalangan kaum muda. Dalam fase tersebut, seseorang memerlukan jawaban yang kemudian bertransformasi melakukan perubahan, dalam hal ini ia merubah sesuatu yang ada pada dirinya dari aspek keagamaan. Konsep hijrah paling populer menjadi perjalanan spiritual menuju kesalehan sejati (Duraesa & Ahyar, 2019). Maka dari itu, hijrah dianggap sebagai salah satu proses untuk mentransformasikan perubahan religiusitas seseorang. Transformasi hijrah secara makanyah dideskripsikan sebagai upaya berpindah dari nilai yang kurang baik menuju nilai yang lebih baik, dari kebatilan menuju kebenaran (Yunus, 2019).

Masifnya gerakan hijrah pada generasi muda hari ini merupakan fenomena baru yang berkembang baru-baru ini sebagai gerakan keagamaan di Indonesia. Paradigma gerakan hijrah ini, pada dasarnya dimaknai sebagai sebuah ritus yang sifatnya personal sudah mulai bergeser menjadi gerakan yang dilakukan secara komunal (Addini, 2019). Hijrah menjadi sebuah *trend* perubahan sosial bagi generasi milenial, sehingga menjadi sebuah gerakan atau loncatan besar manusia, dalam menumbuhkan semangat reformasi dalam konteks sosial-kemasyarakatan yang beragama. Euforia hijrah menjadi gambaran bahwa hadirnya gerakan sosial ini dapat menjadi aspek perubahan sosial dengan menjadikan simbol agama sebagai sesuatu yang menarik bagi kalangan generasi muslim milenial (Anisa, 2018). Penyebaran gerakan hijrah ini secara luas menjadi gerakan yang banyak dilakukan oleh generasi muda, didukung dengan kemudahan teknologi informasi di era digital, sehingga penyebaran hijrah lebih meluas.

Gerakan hijrah yang terjadi pada para pengikut komunitas pemuda hijrah (*Shift*) di Bandung, pada awalnya didirikan pada tahun 2015. Komunitas *Shift* atau Pemuda Hijrah, di Masjid Al-Lathief Bandung ini menyasar kaum muda sebagai ladang dakwah. Gerakan muslim milenial tersebut memiliki tujuan menjadikan anak muda dekat dengan Al-Quran, shalat tepat waktu, giat mencari ilmu agama dan menebarkan syiar Islam. Agama menjadi sistem keyakinan yang dapat melahirkan tindakan kolektif berupa gerakan sosial sebagai cara untuk mengajak individu untuk mentransformasikan dirinya menjadi pribadi yang religius (Lofland, 1985). Dalam aktivitasnya, pengiat *Shift* akan menjamah anak muda dengan beragam golongan, mereka ikut bersama dengan komunitas motor, skuter, skateboarder di sekitar Kota Bandung. Meskipun terdiri dari berbagai kalangan, para generasi muda yang tergabung dalam *Shift* ini tetap mempertahankan identitasnya sebagai skateboarder, seniman, hingga tampilannya yang gondrong maupun bertato. Namun, hal menariknya saat adzan berkumandang, mereka bergeser mengambil air wudhu untuk kemudian shalat. Tentu hal ini memberikan paradigma baru bahwa dengan adanya gerakan hijrah menjadi sebuah gerakan sosial yang menarik perhatian semua kalangan generasi muslim milenial.

Secara karakteristik, generasi muslim milenial adalah generasi muda muslim yang terikat oleh cara memandang dunia bahwa keimanan dan modernitas bisa berjalan beriringan. Generasi muslim milenial dipandang sebagai pionir muslim muda modern saat ini. Generasi M adalah mereka yang bangga dengan kepercayaan mereka, bersifat antusias, dinamis, aktif, kreatif, namun demanding. Keberadaan mereka ini akan mengubah budaya dengan cara yang "lembut". Selain itu, ide bahwa sains mengakar kuat pada era keemasan peradaban Islam adalah salah satu faktor yang mendorong mereka untuk mendapatkan kembali posisi mereka di kehidupan modern dan menawarkan pandangan dan bukti bahwa tidak hanya agama bisa berjalan beriringan dengan modernitas, melainkan agama juga mampu menginspirasi modernitas. Perkembangan gerakan hijrah di kalangan generasi muslim milenial, memiliki konsep diri tentang bagaimana menjadi individu yang toleran, pluralis, serta dapat menghargai perbedaan dan keberagaman yang melahirkan peluang besar dalam perkembangan dakwah Islam moderat di Indonesia (Zulhazmi & Hastuti, 2018).

Gerakan hijrah yang dilakukan oleh *Shift* mencoba menghadirkan bentuk gerakan dengan kemasan berbeda dari kebanyakan gerakan muslim lainnya. Seperti kita ketahui, bahwa kajian sangat erat kaitannya dengan generasi ibu-ibu maupun bapak-bapak, namun *Shift* mencoba mengemas gerakannya yang sesuai dengan gaya para generasi milenial. Salah satu buktinya adalah penggunaan pakaian ketika menghadiri kajian yang dikemas dengan lebih santai,

menggunakan pakaian biasa sehari-hari. Selain itu, para ustadz yang menjadi narasumber pun tidak memakai jubah yang panjang sehingga membuat kajian menjadi kaku. Generasi muslim milenial membentuk pola-pola baru dalam memaknai fenomena hijrah. Maka dari itu, dorongan gerakan hijrah pada generasi muslim milenial dianggap sebagai perasaan kekosongan jiwa yang menimbulkan kejenuhan, mereka lebih berfikir kritis dan mudah mengakses informasi keagamaan (Fajriani & Sugandi, 2019). Beberapa kelompok muslim milenial lebih terbuka untuk mengubah gaya hidup ketimuran sebagai gaya hidup baru yang sesuai dengan ajaran agama.

Konstruksi Identitas dan Pembingkai Kultural Melalui Konsep Hijrah Pada Media Sosial

Gerakan hijrah menjadi gerakan sosial baru yang saat ini berkembang di kalangan generasi muslim milenial. Tidak dipungkiri dengan kehadiran media sosial menjadi salah satu hal yang menarik minat generasi muslim milenial untuk terjun ke dalam gerakan hijrah. Gerakan hijrah dengan kajian keislaman pada media sosial ini menyebarkan sirkulasi informasi mengenai studi agama Islam secara cepat dan luas. Penyebaran gerakan hijrah di media sosial menjadikan konstruksi sosial yang berlangsung sangat cepat dan sebarannya merata. Setiap gerakan sosial yang disebar dengan memanfaatkan unsur teknologi, salah satunya media sosial dapat dengan mudah mendistribusikan informasi dan memobilisasi gerakan dengan berkecepatan tinggi (Merrill, Keightley, & Daphi, 2019).

Pembelajaran mengenai unsur-unsur dalam agama Islam yang menyakut kehidupan sehari-hari ini tidak hanya dilakukan secara tatap muka dalam sebuah pengajian oleh seorang ustadz, namun juga sudah mulai merambah ke era digital. Implementasi dari gerakan hijrah ini mencoba menyebarkan gerakannya melalui *platform* media sosial, Youtube, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya, baik berupa video, maupun tulisan. Kajian berupa ceramah yang disampaikan oleh sebegini besar ustadz-ustadz penggiat *Shift* seperti Ustadz Hanan Attaki disebar di media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Video yang di unggah melalui *platform* Youtube selalu ramai ditonton oleh mereka yang sedang mendalami ilmu agama melalui internet.

Tidak jarang pula, banyak generasi milenial yang tengah mengalami krisis kepercayaan, menjadikan konten Youtube gerakan pemuda hijrah sebagai sarana untuk merefleksikan diri menjadi pribadi yang kembali menerapkan unsur-unsur keislaman dalam keseharian. Sebagian testimoni dari mereka beranggapan setelah menonton kajian tersebut merasa diri lebih tenang, lebih giat untuk beribadah, merubah perilaku, menolong sesama (dalam kegiatan *charity*) agar kembali hidup sesuai dengan kaidah keislaman. Media sosial memainkan peranan dalam menyebarkan aspek positif berupa gerakan sosial sebagai bagian dari “aktivisme *online*” (Merrill, Keightley, & Daphi, 2020). Konsep aktivisme *online* dalam gerakan hijrah menjadikan timbulnya partisipasi untuk turut serta dalam gerakan sosial yang difasilitasi oleh media digital. Penyebaran gerakan hijrah dengan memanfaatkan media sosial ternyata terbukti ampuh dalam mengajak khalayak untuk dapat mengikuti langkah yang sama (Addini, 2019).

Ketertarikan generasi muda terhadap gerakan hijrah dibuktikan dengan banyaknya generasi muda yang tertarik untuk mengikuti akun sosial media komunitas *Shift*. Pada media instagram @shiftmedia, telah tercapai pengikut sebanyak 2 juta *followers*. Menariknya dalam setiap unggahan yang dilakukan oleh komunitas *Shift* selalu diikuti dengan tagar #hijrah. Hal ini menjadi salah satu cara agar banyak orang mencari tagar tersebut, yang secara tidak langsung gerakan ini akan terlaksana secara luas dan merata. Tidak hanya itu, di Youtube pun komunitas *Shift* yaitu *Shiftmedia* mendapat perhatian yang lebih luas dengan pengikut sebanyak 427 *subscriber*. Secara tidak langsung, ilustrasi dari kedua media sosial komunitas *Shift* tersebut menunjukkan bahwa gerakan hijrah dapat dikatakan sebagai bagian dari gerakan sosial keagamaan yang berlangsung secara masif. Melalui berbagai media sosial tersebut, gerakan sosial lebih mudah untuk mempengaruhi banyak orang, terutama kaum muda yang dikenal sebagai generasi milenial (Taufik & Taufik, 2019).

Segmentasi gerakan hijrah bagi generasi muslim milenial menjadi bentuk pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah menggunakan materi-materi dakwah sesuai dengan

kebutuhan generasi muda. Dakwah pada media sosial menjadi bentuk kreativitas pembuat konten dakwah dapat memperkenalkan dakwah ringan melalui kutipan yang bertujuan untuk menjangkau hati dan pikiran para pengikut (Muntazori & Sunarto, 2020). Pada komunitas *Shift*, dengan mudahnya materi dakwah diunggah dalam media sosial baik berupa tulisan maupun video yang memotivasi generasi muslim milenial untuk mengikuti ajakan berhijrah. Generasi muda yang cenderung menjadikan media sosial sebagai konsep diskursus agama dengan kemudahan melakukan klik berita berlabel Islam, pengajian online, termasuk menjadi pengikut setia akun-akun berlabel ustadz atau ulama gaul tidak dapat lagi terelakkan (Anisa, 2018).

Wacana pada gerakan hijrah terimplementasi pada media sosial sebagai seperangkat pesan komunikasi yang menarik dan efisien, berupa konstruksi identitas dan pembingkai kultural tentang makna hijrah. Konstruksi tersebut dicapai dengan adanya perubahan paradigma yang berpikir tentang bagaimana ritual keagamaan bukan lagi dinilai sebagai segmen masyarakat generasi ibu-ibu maupun bapak-bapak. Respon positif dari gerakan hijrah di kalangan generasi muslim milenial mampu membangun persepsi publik, khususnya generasi milenial, tentang Tuhan dengan cara sederhana (Prasanti & Indriani, 2019). Maka dari itu, tujuan dari adanya gerakan hijrah ini menjadikan generasi muda sebagai objek dakwah.

Konstruksi gerakan sosial baru yang berorientasi pada konsep identitas, meletakkan posisi pribadi sebagai kebersamaan yang bebas, manusia yang bebas dalam mengubah identitas dan mencari makna baru bagi identitasnya yang melahirkan perilaku ekspresi kesalehan. Makna pada gerakan hijrah menjadi wadah untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama, sebagai pembentukan identitas diri setiap anggota itu sendiri, sehingga hijrah adalah penguatan dan penegasan identitas bagi mereka (Prasanti & Indriani, 2019). Peran dan posisi aktor kolektif secara sadar membangun identitas baru dalam melaksanakan hijrah.

Makna simbol dalam mengidentifikasi identitas diri dari aktor gerakan hijrah ini menjadikan pengalaman individu dalam memahami makna hijrah serta bagaimana simbol tersebut tertanam dalam identitas dirinya. Para aktor berperan sebagai muslim yang sesuai ajaran Islam dan posisi aktor menempatkan dirinya sebagai makhluk yang taat pada agama Islam. Identitas individu yang cenderung menjadikan tindakan kolektif dalam sebuah gerakan akan mengidentifikasi dirinya sebagai sumber strategis maupun alat motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai harapan dan tujuan gerakan yang dilakukan (Haenfler, 2019). Identitas pelaku hijrah sebelum berhijrah merupakan individu yang jauh dari pribadi yang religius. Masifnya fenomena hijrah di kalangan muslim milenial menjadi penguat identitas generasi muslim milenial.

Berkembangnya gerakan hijrah tentu mengarahkan pada bagaimana setiap elemen dalam aspek gerakan dapat mereproduksi makna religius. Aktor gerakan hijrah akan memahami diri mereka sebagai individu yang religius karena keterlibatannya dalam gerakan hijrah. Sebagai model gerakan sosial baru, gerakan hijrah mengemas konsep keagamaan dalam setiap gerakannya. Konsep pembingkai kultural menjadi bentuk kerangka penafsiran yang memungkinkan orang untuk menempatkan, memahami, mengidentifikasi dan menamai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sekitar mereka maupun dunia secara keseluruhan (Goffman, 1974).

Pembingkai kultural pada gerakan hijrah dapat menciptakan aktivitas yang mampu memobilisasi, menginspirasi, dan melegitimasi aksi gerakan dalam bentuk menjadikan para aktornya menemukan makna religiusitasnya. Maka, kampanye gerakan sosial dapat menggerakkan dan memobilisasi sekelompok orang untuk turut serta dalam gerakan tersebut (Saputra, Pujiati, & Simanihuruk, 2020). Gerakan hijrah telah menjadi pola gerakan sosial yang dilakukan generasi muslim milenial dengan pengemasan ideologi keagamaan dalam gerakan sosial yang dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pembingkai kultural berkaitan erat dengan diskursus bagaimana suatu gerakan hijrah melalui media sosial dapat memproduksi makna yang kemudian diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat. Dari adanya gerakan hijrah yang diwadahi melalui media sosial ini, bagi para generasi muslim milenial akan lebih mudah untuk mengatur mereka bagaimana bertindak dan berperilaku karena sudah memahami apa yang dibenarkan dan tidak dalam agama (Riadi & Drajat, 2019).

Maka dari itu, pembingkaiian kultural dalam konsep gerakan hijrah ini terlegitimasi dalam bentuk oleh pemaknaan yang sama dengan individu lain, dan bagaimana individu tersebut tersebut secara sukarela menerima identitas dan pemaknaan yang diberikan yang kemudian menjadi pemaknaan universal.

Simpulan

Gerakan sosial baru memiliki model yang berfokus pada bagaimana gerakan sosial dalam bentuk konsep budaya yang mencakup kepercayaan, nilai, dan identitas. Pada gerakan hijrah yang diinisiasi oleh komunitas *Shift*, mencoba mengajak generasi muslim milenial untuk turut serta mendukung gerakan sosial tersebut. Pada gerakan hijrah ini, para generasi muslim milenial diajak untuk dekat dengan Al-Quran, shalat tepat waktu, giat mencari ilmu agama dan menebarkan syiar Islam. Maka komunitas *Shift*, menjadikan media sosial sebagai wadah yang mendukung berkembangnya gerakan sosial berlandaskan keagamaan. Gerakan hijrah tersebut berhasil menarik perhatian para generasi muslim milenial dengan banyaknya pengikut yang tergabung dalam akun media sosial komunitas *Shift*.

Konten yang ditampilkan komunitas *Shift* dengan menjadikan konten berbasis keagamaan dalam bentuk teks maupun video terimplementasi dengan baik. Maka dari itu, pengembangan gerakan hijrah melalui media sosial ini memunculkan wacana tentang konstruksi identitas dan pembingkaiian kultural mengenai makna hijrah. Identitas para aktor gerakan sosial ini mengubah cara pandang mengenai makna religiusitas, yang mana para generasi muslim milenial tetap menjadi pribadi diri mereka sendiri. Namun, identitas aktor gerakan hijrah ini mengubah pola pikir tentang memaknai religiusitas dan tentang bagaimana mereka menjadi insan yang agamis. Pembingkaiian kultural juga terjadi pada gerakan hijrah ini, yang mana para aktor gerakan sosial tergerak untuk mengkampanyekan dan memobilisasi setiap tindakan yang diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat. Ideologi dan pemaknaan keagamaan menjadi aspek penting dalam pembingkaiian kultural dalam gerakan hijrah, yang menjadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku tentang apa yang dibenarkan dan tidak dalam agama.

Referensi/Daftar Pustaka

- Addini, A. (2019). Fenomena Gerakan Hijrah di Kalangan Pemuda Muslim Sebagai Mode Sosial. *Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 109–118.
- Amna, A. (2019). Hijrah Artis sebagai Komodifikasi Agama. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 331–350. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1531>
- Anisa, F. (2018). Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan Populism. *Maarif Institute*, 13(2), 38–54.
- Corrigall-Brown, C. (2016). Funding for Social Movements. *Sociology Compass*, 10(4), 330–339. <https://doi.org/10.1111/soc4.12362>
- Denzin, N. K & Lincoln, Y.S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Duraesa, M. A., & Ahyar, M. (2019). Reproliferation of Islamist Movement in Surakarta: Trajectory and Strategy in The Post Democratization Indonesia. *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 4(2), 201–224. <https://doi.org/10.22515/dinika.v4i2.1637>
- Fajriani, S. W., & Sugandi, Y. S. (2019). Hijrah Islami Milenial Berdasarkan Paradigma Berorientasi Identitas. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 76–88. <https://doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21643>
- Fatoni, U., & Rais, A. N. (2018). Pengelolaan Kesan Da'i dalam Kegiatan Dakwah di Pemuda Hijrah. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 12(2), 211–222. <https://doi.org/10.24090/komunika.v12i2.1342>

- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on The Organization of Experience*. New York: Harper & Row.
- Haenfler, R. (2019). Changing The World One Virgin at a Time: Abstinence Pledgers, Lifestyle Movements, and Social Change. *Social Movement Studies*, 18(4), 425–443. <https://doi.org/10.1080/14742837.2019.1590691>
- Haramain, M., Nurhikmah, N., Juddah, A., & Rustan, A. (2020). Contestation of Islamic Radicalism in Online Media: A Study with Foucault's Theory on Power Relation. *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Islamic Studies*, 1–8. <https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2019.2291698>
- Hew, W. W. (2018). The Art of Dakwah: Social Media, Visual Persuasion and The Islamist Propagation of Felix Siau. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 61–79. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416757>
- Ibrahim, B. (2016). Memaknai Momentum Hijrah. *STUDIA DIDKATIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(2), 65–74.
- James, Elizabeth, & Hope, S. 2015. *Muslim Millennial Attitudes on Religion & Religious Leadership*. Uni Emirat Arab: Zogby Research Services, LLC.
- Khan, M. A. M. (2019). Islam as Identity: After a Century of Islamic Revivalism. In: Islam and Good Governance. In *Islam and Good Governance*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-54832-0>
- Lanti, I. G., Ebih, A., & Dermawan, W. (2019). Examining The Growth of Islamic Conservatism in Indonesia : The Case of West Java. *RSIS Working Paper*, (322), 1–27. Retrieved from https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/49497/WP322_V2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mahanani, P. A. R., & Putri, R. C. (2019). Representation and Negotiation of Women Syar'i Hijab Shaff Hijrah Community Through Instagram. *The 10th IGSSCI (International Graduate Students and Scholars' Conference in Indonesia) NEW Page 297 MEDIA AND THE CHANGING SOCIAL LANDSCAPE OF CONTEMPORARY SOCIETIES: How Are New Media Reshaping the Whole Aspects of Life of Contemporary Societies?*, 297–309. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i20.4943>
- Manski, B. (2018). Methodological Approaches to Movement Waves and the Making of History. In *The Palgrave Handbook of Social Movements, Revolution, and Social Transformation* (pp. 35–63). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-92354-3>
- Merrill, S., Keightley, E., & Daphi, P. (2019). Introduction: The Digital Memory Work Practices of Social Movements. In *The Palgrave Handbook of Social Movements, Revolution, and Social Transformation* (pp. 373–397). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-92354-3>
- Merrill, S., Keightley, E., & Daphi, P. (2020). *Social Movements, Cultural Memory and Digital Media: Mobilising Mediated Remembrance*. Retrieved from <https://books.google.be/books?id=1a9GyQEACAAJ>
- Millward, P., & Takhar, S. (2019). Social Movements, Collective Action and Activism. *Sociology*, 1–12. <https://doi.org/10.1177/0038038518817287>
- Milton-Edwards, B. (1992). The Concept of Jihad and The Palestinian Islamic Movement: A Comparison of Ideas and Techniques. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 19(1), 48–53. <https://doi.org/10.1080/13530199208705548>.
- Morris, A. (2019). Social movement theory: Lessons from The Sociology of W. E. B. Du Bois. *Mobilization*, 24(2), 125–136. <https://doi.org/10.17813/1086-671X-24-2-125>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muntazori, A. F., & Sunarto, B. (2020). A Representation of Hijrah in Visual Da'wah Media on Instagram. *IICACS : International and Interdisciplinary Conference on Arts Creation and Studies*, 174–184.
- Nas, A. (2016). Advertising Resistance? The Analysis of New Social Movements as Brand Communities. *International Journal of Humanities and Social Science*, 6(6), hlm. 136 – 143.
- Porta, D. della, & Pavan, E. (2017). Repertoires of Knowledge Practices: Social Movements in Times of Crisis. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 1–35. <https://doi.org/10.1108/00907320910934959>.
- Pramesuari, Astrid (2020) *Strategi komunikasi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran sebagai upaya menegakkan ajaran agama Islam dalam menentang perzinahan= Communication Strategy of Indonesia Tanpa Pacaran*. (Skripsi). Universitas Pelita Harapan.
- Pramiyanti, A. (2019). *Being Me on Instagram: How Indonesian Hijabers Reframed The Nexus of Piety and Modernity*. Queensland University of Technology.
- Prasanti, D., & Indriani, S. S. (2019). Konstruksi Makna Hijrah Bagi Anggota Komunitas Let'S Hijrah Dalam Media Sosial Line. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(1), 106–119. <https://doi.org/10.31332/ai.v14i1.1253>
- Riadi, B., & Drajat, D. (2019). Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212. *Holistik: Journal For Islamic Social Sciences*, 3(1), 10–18. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Raihanah, M. M. (2017). 'World Hijab Day': Positioning the Hijabi in Cyberspace. In *Seen and Unseen: Visual Cultures of Imperialism* (pp. 97-117). Brill.
- Rahmawati. (2018). Peran Akhlak Tasawuf Dalam Masyarakat Modern. *Al-Munzir*, 8(2), 229–246.
- Ramadhan, T. (2007). *Muhammad Rasul Zaman Kita*. Jakarta: Serambi.
- Rochimah, I. (2018). The Contribution of Social Support and Religious History on Religious Conversion: A Quantitative Study in South Tangerang. *Proceedings of the International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslim Societies (ICDDIMS 2017)*, 153, 67–72. <https://doi.org/10.2991/icddims-17.2018.15>
- Saputra, S., Pujiati, & Simanihuruk, M. (2020). Pengemasan Ideologi Dalam Gerakan Hijrah (Studi Kasus Gerakan Komunitas Sahabat Hijrahkuu di Medan). *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 4(1), 287–300.
- Setiawan, E., et al. (2017). Makna Hijrah pada Mahasiswa Fikom Unisba di Komunitas ('followers') Akun 'LINE@DakwahIslam'. *MediaTor*, 10(1), 97-108.
- Sunesti, Y., Hasan, N., & Azca, M. N. (2018). Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(2), 173–198. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.173-197>
- Susilowati, I., Yunus, N. R., & Sholeh, M. (2019). Politics of Identity on Great 212's Reunion. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 4(1), 58–79. <https://doi.org/10.21111/DAULIYAH.V4I1.2933>.
- Taufik, H. M., & Taufik, A. (2019). Hijrah and Pop Culture: Hijab and Other Muslim Fashions Among Students in Lombok, West Nusa Tenggara. *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, 8(2), 97–116.
- Uberman, M., & Shay, S. (2016). Hijrah According to the Islamic State : An Analysis of Dabiq. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 8(9), 16–20.

- Widhana, D. H. (2019). *Tren Hijrah Anak Muda: Menjadi Muslim Saja Tidak Cukup*. [Online]. Diakses dari: <https://tirto.id/tren-hijrah-anak-muda-menjadi-muslim-saja-tidak-cukup-ds9k>.
- Yunus, A. H. (2019). Hijrah: Pemaknaan dan Alasan Mentransformasikan Diri Secara Spiritual di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Emik*, 2(1), 89–104.
- Zulhazmi, A. Z., & Hastuti, D. A. S. (2018). Da'Wa, Muslim Millennials and Social Media. *Lentera*, 2(2), 121–138. <https://doi.org/10.21093/lentera.v2i2.1235>



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Halaman 66-74



Hubungan antara Negara dan Masyarakat Sipil: Kajian Teoretis

Abdou Barrow

Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

| Kata Kunci | Abstrak |
|-------------------|---|
| Masyarakat sipil | Hubungan antara negara dengan masyarakat sipil telah menjadi perhatian besar dalam bidang ilmu sosial khususnya dalam kajian ilmu Sosiologi dan ilmu Politik. Ada beberapa ahli yang mencoba mengkaji hubungan ini. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji pendekatan teoretis Marxis, Elit, dan Neo-Konsensualis tentang hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam konteks kontemporer. Penelitian ini didasari pada studi literatur tentang perspektif konflik dalam Sosiologi. Teori-teori ini sangat terkenal saat membicarakan hubungan negara dengan masyarakat sipil. Marxis menganggap hubungan keduanya sebagai konflik; artinya, masyarakat sipil dominan menggunakan negara sebagai instrumen untuk mengeksploitas kelas ekonomi bawah. Elit menganggap hubungan ini berbeda dengan Marxis dan Liberal, karena bagi mereka, negara dijalankan oleh individu-individu tertentu dengan mengorbankan massa. Pandangan Neo-Konsensualis berbeda jauh dari keduanya, karena Parsons menganggap beberapa prospek dunia sosial yang membangun masyarakat: nilai dan norma. Bagi Bellah, agama dianggap sebagai mekanisme untuk mengakulturalikan sejenis doktrin untuk dijalankan oleh negara dan warga negara. Hasil dari kajian teoretis ini menunjukkan bahwa kelompok elit berbeda pandangan dengan Marxist dan Liberal; orang-orang ini adalah kelompok minoritas yang memiliki pengaruh secara ekonomi, sosial dan lainnya. Namun, secara sederhana, mereka memiliki potensi untuk membuat suatu hal terjadi. Kelompok minoritas ini disebut kelompok elit; orang-orang yang mereka kuasai disebut kelompok berkuasa. |
| Demokrasi | |
| Elit | |
| Marxis | |
| Neo-Konsensualis | |
| Negara | |
| Diterima | |
| Review | 10 Juni 2020 |
| Revisi | 14 Juni 2020 |
| Penerimaan | 14 Juni 2020 |
| Copyedit | 15-26 Juni 2020 |
| Publikasi | 30 Juni 2020 |



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 1, Januari-Juni 2020
Pages 66-74



Relationship between State and Civil Society: Theoretical Review

Abdou Barrow

Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

| Keywords | Abstract |
|--------------------|---|
| Civil Society | <p>Relationship between state and civil society has been of great interest in the field of social sciences especially in the field of sociology and political science. There have been several theorist that tries to look into this relationship. The aim of this paper is to review the theoretical approaches of Marxist, Elites, and Neo- Consensualist on the relations between state and civil society in nowadays societies. Research are based on literature studies, on conflict perspectives in sociology. These theories are very prominent when talking about state-civil society relationship in sociology. Marxist looks the relationship between the two as conflictual, meaning dominant civil society use the state as an instrument in exploiting the weak economic class. Elites argue the relationship differently from that of Marxist and liberals, as for them, state is run by few individuals at the expense of the mass. In the eye of Neo-Consensualist is entirely a different story, as that of Parson view certain prospect in the social world of constituting the society that is; norms, and values. As for Bellah he sought religion as a mechanism in the spirit of acculturating a kind of doctrine in a sense that, state and citizens go bye. Result for this theoretical views is elites show the relationship different from the Marxist and liberals, as for them the state is run by few individuals at the expense of the mass. This people are a minority group that has influence through economically, socially and the like but in short they have potentials in making things happen. This minority group the called them the elite as the mas they called the ruled.</p> |
| Democracy | |
| Elites | |
| Marxist | |
| Neo-Consensualist | |
| State | |
| Submission | 6 Juni 2020 |
| Review | 10 Juni 2020 |
| Revision | 14 Juni 2020 |
| Acceptance | 14 Juni 2020 |
| Copyediting | 15-26 Juni 2020 |
| Publication | 30 Juni 2020 |

Introduction

The idea of modern day democracy is intertwined with civil society, that is any state that have democracy and good governance is believed to have strong civil society that hold the state accountable on the duties they are expected to discharge. The state civil society relations are believed to be cordial if there is what many civil society's sought from the state which are: transparency and rights of citizens to be protected at all time by the state. The concept of civil society was discussed by various scholars being in the field of sociology as well as political science. "The idea of civil society entered in political theory when theorist began to insist that a social community is capable of organizing itself independently of the direction of state power" (Dash. S.P, 2001). Therefore civil society is the sphere where the rational self-determining individual get enter voluntarily into social relationship with each other. This social relationship is based on equality, trust, respect, solidarity, networks and obeying the norms (Dash. S.,P, 2001). Another definition on the concept from (Chambers and Kopstein, 2006) as an "un-coerced associational life distinct from the family and institutions of the state".

"Civil society is a sphere apart from the state. It is a sphere in which individuals come together and form groups, pursue common enterprises, share interests, communicate over important and sometimes not so important matters. Churches, bowling leagues, service associations, chess clubs, and public interest groups are part of civil society. Legislatures, the army, police, government administration, and courts are not (Kymlicka,W, 2002). In thinking of civil society as a part of the state three features do stand out: the voluntary nature of participation; the plural quality of activities, and the negative character of civil society's boundaries. Civil society is not just characterized by membership; it is characterized by voluntary membership" (Chambers and Kopstein, 2006).

Various theoretical explanation has been done on the issue of state-civil society relations. This paper intend to discuss some theoretical insight on the issue in which I would limit the argument on the theories of Marxist, Elites, and Neo-Consensualist in regard to the relationship of the state and civil society. Sociologically these theorist has different perspective on how state and civil societies should relate in running the affairs of the country. This discussions are well argued in the field of sociology of politics as argued by Talcott Parson one of sociological theorist. Marxism is another paradigm in sociology who argued that state and civil society relations is based on conflict, according to Marx state is just a servant to the dominant interest of the civil society, though state maybe view differently for some as a common entity for all parties while some may argue otherwise. Marx argue that only with the development of capitalism can civil society evolve fully. Looking at the historical stage the differences between the equal citizenship of the state and the inequalities between social classes become severe. When this happen state will clearly contradict itself in ensuring that class struggle between the bourgeoisie and proletariat is certain to happen. If that power struggle is resolved in the interest of the proletariat, then state will become no longer needed and civil society will become well. The relationship between the two for Marx is at the benefits of the one social group over others, civil society uses the state as a tool or instrument at the expense of the economically weak people.

The aim of the paper was to look into the relationship between state and civil society, which has been of a great interest in the field of social sciences especially in the field of sociology and political science. There has been various theorist that tries to look into this relationship. The aim of this paper is to look at this relations using the approach of Marxist, Elites, and Neo- Consensualist. These theories are very prominent when talking about state-civil society relationship in sociology. Elites argued otherwise as to them in any society irrespective of time and place the affairs are run by the few at the expense of the mass, the same spirit was used in the spectrum of civil society and state relations as well. They look at the few group of people in the society that has influence, power, or reputation that give them advantage over the mass. Those group of people rule over the mass with the use of those influence and power they have. In the eye of Neo-Consensualist is entirely a different story, as that of Parson view certain prospect in the social world of constituting the society that is; norms, and values. He believe the norms and value of the societies determine the entire faith and people needs to

conform to those norms and values. For him conflict and inequality is abstract in the society meaning that is not present. As for Bellah he sought religion as a mechanism in the spirit of acculturating a kind of doctrine in a sense of certain that state and citizens go by. In his famous work the civil religion where he use the speech of John F Kennedy as reference in the case of America.

Method

This article is based on literature studies, which take perspectives on content analysis and study library on some literature pointed on marxist, elites and non-concensualist in social sciences. Further, an author selecting and separating literature, based on international journals, books, articles and reports. analysis on this articles was made by classify and collecting the best views based on the issue.

Sociologically, it is comparative analysis on literature studies which compared marxist, elites theories and non-concensualist review on a state and civil society. Then, the linkage of each points are described and engaged to result the discussion section and conclusions.

Marxist

Marxism is a society-base theory which look at people in a particular society of being unequal, Marx argued that inequalities of civil societies shape the essentials of the state. The development of the industrial capitalism and the behavior of the state is seen as the stirring wheel to the social change. Individual's life and the political actions are determine by the relationship he or she have with the capitalist mode of production in other word bourgeoisie, which shows him as a member of a class rather than a citizen of a state. As Marx argued capitalism to be an evil practice which is an exploitative approach with a vast margin of inequality whereby some members of the society tend to gain while others stand to lose.

For Marx state is just a servant to the dominant interest of the civil society, though state maybe view differently for some as a common entity for all parties while some may argue otherwise. Marx argue that only with the development of capitalism can civil society evolve fully. Looking at the historical stage the differences between the equal citizenship of the state and the inequalities between social classes become severe. When this happen state will clearly contradict itself in ensuring that class struggle between the bourgeoisie and proletariat is certain to happen. If that power struggle is resolved in the interest of the proletariat, then state will become no longer needed and civil society will become well.

“Marxists clearly reject the major propositions of the liberal theories about the State. They believe that irrespective of how “liberal” or “democratic” a state claims to be, it is mainly an instrument for the domination, oppression and exploitation of the economically weak class (i.e., the class of the poor and non-owners of the means of production) by the powerful and dominant class (i.e., the class of the rich and owners of means of production). Briefly put, the state is principally a tool for the establishment and maintenance of the hegemony of the rich and the powerful over the poor. Indeed, “in an antagonistic class society the State is a political instrument, a machine for maintaining the rule of one class over another” (Obo, U. B., & Coker, M. A, 2014).

A State tending to its own dissolution, to be replaced by forms of free association - one might equally say that the philosophy which obsessed Marx, Lenin and Gramsci ought to be a “non-philosophy” – that is, one which ceases to be produced in the form of a philosophy, whose function of theoretical hegemony will disappear in order to make way for new forms of philosophical existence. And just as the free association of workers ought, according to Marx, to replace the State so as to play a totally different role from that of the State (not one of violence and repression), so it can be said that the new forms of philosophical existence linked to the future of these free associations will cease to have as their essential function the constitution of the dominant ideology, with all the compromises and exploitation that

accompany it, in order to promote the liberation and free exercise of social practices and human ideas (Althusser, Louis and Balibar, Étienne, 1975).

Althusser insisted on a distinction between philosophy, science and political practice and on a certain conception of philosophy as under-labourer of revolutionary practice and theory that made it impossible to fully endorse something like Gramsci's philosophy of praxis as a theoretical laboratory producing new forms of theoretical and political thinking at the intersection of philosophy, science and politics (Frosini, F, 2017).

Furthermore, Althusser extracted from *The Prince* a forward glance situated in a Marxist periodisation of history, glancing towards absolute monarchy in the transition from feudalism to capitalism. But it is a tribute to the theoretical power of *The Prince* that it speaks of the promises, costs, contradictions and evasions of modern liberal secular society, combining both utopian and dystopian registers. Althusser's interrogation of Machiavelli also helps to assist us in understanding and appreciating the strong futuristic dimensions in the Florentine's texts, and suggests a reading of those texts which can bring out the prescience of both Machiavelli's reflections on the emergence of modernity, and his hard-headed recognition of the costs of that process. (Geoghegan, V, 2017).

The relationship between the two for Marx is at the benefits of the one social group over others, civil society uses the state as a tool or instrument at the expense of the economically weak people. That means people with the economic influence control the state and make it work the way it desire them. Marx argue that that could only change when equality is introduces and the class system shall be get rid of and he believe that if the class is no more so as the state. Marx's argument is entirely base on the economic inequality between the civil society makes the state to stand in a funny situation in the state becomes an instrument for the lucky few at the expensive of the less fortunate once economically.

Nonetheless there has been some Marxist theorist who look into the relation of state-civil society other than Marx that is Antonio Gramsci. Gramsci did step on from the arguments made by Marx and Lenin. He made all the Marxist assumptions about the origins of class and the role of class struggle and consciousness in social change. He also look into the Marx's notion of bourgeoisie (hegemony). In his theory of hegemony highlights the importance of ideological manipulation by the ruling class over the working. Gramsci's hegemony is a kind of communicative power that refers to an ideological justification for the inequities of capitalism. According to him hegemony operates through institutions as media, such as the church and political parties. He see the use of hegemony as well as material class struggles, as being central in the overthrow of capitalism. He stressed the role of intellectuals in shaping alternation egalitarian hegemonic project to the dominant ideology of capitalism, with its emphasis upon selfish exploitation of the many by the few.

Elite's theory

Elite theory vary with the notion of Marxism and liberalism in the sense that elites approach looks power and influence in the society at a different lens as to the former. Elites sought the society into two separate class as the Marxist but not necessarily at the economical aspect only, elites look at the few group of people in the society that has influence, power, or reputation that give them advantage over the mass. Those group of people rule over the mass with the use of those influence and power they have.

"Elite theory is deep-rooted in classical sociology, especially that of Weber (2005 [1922]), Pareto (1935), Mosca (1939) and Michel (2009 [1915]). These authors are usually labeled as 'classical elitists'. Beyond its strong roots in classical sociology, elite theory developed into a vibrant theoretical field, intersecting other theories, such as rational choice theory and political culture theory. Most elite theory reviews (e.g. de Hollanda, 2011; Khan, 2012) focus on the work of classical elitists, considered to be the founding fathers of the elitist school. Classical authors are important references as Lopez briefly reviewed their works in his paper as well, yet he intended to privilege contemporary elite theory and research, highlighting empirical

findings and current research challenges” (López, 2013). The elites feels that Marxist and liberal prescription to state-civil society relationship is a threat of authoritarian socialism, due to this elite strongly rejects their prescription. Mosca argues that those who hold exercise state power are always a minority group, and below them includes the mass who never participate in the real terms in government and are subject to the will of the elite; they call them the ruled. Michel goes even further than Mosca in arguing the inevitability of the elite rule as the iron law of oligarchy. From this point they reject the notion of democracy is something they argue to impossible, because Michel believe that democracy cannot exist without organization and for him who says organizations says oligarchy (Michel, 1984: 364)

Due to the inevitability of the elite rule Mosca & Pareto dismiss the notion of popular sovereignty. Mosca even went further arguing that the democratic elections that are held are manipulated by the elite with their powers and influences or any or instrument relevant in making people to do what they want. As to elite the two share common view but to the masses Mosca and Pareto have different view, as Pareto believes that the psychological and personal attributes suitable for government. On the other hand Mosca denies this claims that elites are morally or intellectually superior, and sees organizational skills as a key to elite rule.

Neo-Consensualist theory

Before commencing the theoretical arguments of neo-Consensualist I would briefly explain what consensualism is all about first then look into Neo-Consensualist such as Talcott Parson, Martin Lipset, Robert Bellah, and Putnam. **CONSENSUALISM** is an approach in the field of social sciences that argue that humans are born neither good nor evil. They are animals whose mind and behavior are largely shaped by their environment. When raised in a loving family and in a free and healthy society, they will be self-regulating, rational, productive, and ethical. Each human naturally strives to improve his and his children’s lives. All human improvement, material and psychological, requires the freedom of each human to pursue his happiness within a system of voluntary, mutually-beneficial social and economic intercourse. Coercion or violence is the antithesis of all human values. Therefore, government, if it exists, should do nothing but define ownership and prevent the use of force by humans against other humans.

Talcott Parson: Parson is one of the social theorist who took on from the arguments of Durkheim and Weber rather than Marx’s. From Weber he adopted the role of ideas and culture in the creation of society, while from Durkheim he adopted the notion of social integrity and factors that strengthen those integrities in the societies. Parson view certain prospect in the social world of constituting the society that is; norms, and values. He believe the norms and value of the societies determine the entire faith and people needs to conform to those norms and values. For him conflict and inequality is abstract in the society meaning that is not present.

Parson saw politics as not an instrument that oppress one group of people over others; nor is it the use of state power against citizen and external enemies. However he saw power as a capacity of social system to mobilize resources to attain collective goal. Parson’s view differ with that of elites and Marxist as they both see imbalance in the use of power between the state and society. For him, power is not use on personal gains as much as oppressing one group of people over others instead power is use at the interest of the masses. Talcott argued that conflict and inequality is not present in his view of the social world, while Marx argues otherwise on the case of inequality and conflict in the world.

Robert Bellah: Robert is another sociological scholar whose studies are mainly associated with the sociological study of religion, but as he work on the traditions of Durkheim and Tocqueville and also a student of Parson, what he said about sociology has a bearing on a view of politics, Bellah’s arguments on the world is a distinctive way of talking about the bearing of civil society, or the civil order, on the character of politics. One of Bellah’s contribution to sociology over the period of times was his thesis of civil religion. He adopt an idea of Durkheim, Bellah has argued that politics in America has become what he calls a civil religion.

Durkheim originally suggested that there is no society that may not have something that they may see as a collective sentiment that fuses the people of that society together (Bellah, R. N., & Tipton, S. M. (Eds.), 2006).

Bellah look at the political system of America at that time and argues that the politics in America not as the conventional politics but as way of life or religion to American citizens. Because he sought the root of American civil religion from some political figures example John F Kennedy at his presidential inauguration 1961. He stated that Kennedy mention the word God three times in his same speech. Though American constitution has made it clear in the effort of separating churches from politics, but Bellah insist that this has not clearly been the case (Bellah, R.N, 2018). Religion has been as very vital thing in the lives of average Americans at that time until now is seen as the case. American has a phrase that is common and unique to every American no matter your background “god save America” Bellah believes that religious values that were inculcated into citizens has created a room for citizens accepting diversity and equality.

Seymour Martin Lipset: Lipset has been a great social scientist who is one of the principle founders of the field of political sociology. Like Tocqueville, Lipset’s main intellectual passion has been the study of democracy in America or the political system of America. He was influence by the writings of Marx and Weber, but the sensibility and passion of Tocqueville seem to shine through his thoughts and writings most clearly. His analysis on the unions in New York with his collaboration with various scholars like James Coleman and others led those asking questions about unions in NY, the questions ask at that was t5rying to compare the democratic system of those unions and they ask why is it that ITU is more democratic than other unions. His “analysis in Union democracy represents an important illustration of the way that civil institutions of a society_ or in this instance, an organizations provide the means and foundation for politics, democratic politics in particular” (Ansori,M, 2009).

Through this single case studies (international typographic union) help to show how important that single case is to sociological study of the world of politics. This study has laid a foundation in the study of state and civil society relationship. In summary I would say organizations can help shaping a political democratic nation is those institutions are economically influential enough.

Robert Putnam draws from de Tocqueville to argue that civil society – citizen participation in formal organizations -- influences the success of democracy. In his study of Italy (1993), he observes that regions with higher levels of associational activity also have greater social capital and thus, he claims, more successful regional governments. He draws from Coleman (1988) to argue that membership in groups creates “social capital,” or “networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit” (Putnam 1995:67). In this very influential 1995 piece Putnam uses the metaphor of “bowling alone” to express his concern that a decline of formal associational activity (such as bowling in leagues) erodes social capital and may thus be undermining democracy in the United States” (Booth, J. A., & Richard, P. B, 1998:792).

Contemporary Central America provides an ideal setting in which to explore the links among civil society, the formation of political and social capital, and levels of democracy. The region experienced dramatic economic growth that began in the 1960s, faltered with the oil price shock of the mid 1970s, and ended catastrophically in the late 1970s with the civil wars and depression of the 1980s.

Conclusion

There has been various theorist that tries to look into this relationship, which are very prominent when talking about state-civil society relationship in sociology. Example Marxist theory is one of the major paradigm in sociology called the conflict theory which was developed by Karl Marx as elites is more of political science and political sociology. Marxist looks the relationship between the two as conflictual meaning dominant civil society use the state as an

instrument in exploiting the weak economical class. As for Marx state cannot be neutral and serve the interest of everyone as it is as source of depression to the working class through the economic advantages. Elites show the relationship different from the Marxist and liberals, as for them the state is run by few individuals at the expense of the mass. This people are a minority group that has influence through economically, socially and the like but in short they have potentials in making things happen. This minority group the called them the elite as the mas they called the ruled.

References

- Althusser, L., and E. Balibar. (1975) *Reading Capital*. Translated by B. Brewster. London: New Left Books.
- Ansori, M. (2009). Consumerism and the emergence of a new middle class in globalizing Indonesia. *A Graduate Student Journal of Southeast Asian Studies* 9 (1):87-97.
- Bellah, Robert N. 2018. "Civil Religion in America Author (s): Robert N . Bellah Source : Daedalus , Vol . 96 , No . 1 , *Religion in America (Winter , 1967)*, Pp . 1-21 Published by : The MIT Press on Behalf of American Academy of Arts & Sciences Stable URL: // <https://Www.Jstor.Org/Stable/20027022> Civil Religion in America."
- Bellah, R. N., & Tipton, S. M. (Eds.). (2006). *The Robert Bellah Reader*. USA: Duke University Press.
- Booth, J. A., & Richard, P. B. (1998). Civil society, political capital, and democratization in Central America. *The Journal of Politics*, 60(3), 780-800.
- Chambers, S., & Kopstein, J. (2006). Civil society and the state. *The Oxford handbook of political theory*, Eds: Dryzek, J.S, Honig, B and Phillips, A pp. 363-381 , New York: Oxford University Press Inc
- Dash, S. P. (2001). The State, Civil Society and Democracy: A Note. *The Indian Journal of Political Science*, Vol 62 No 2, pp. 241-252.
- Frosini, Fabio (2017) Cosmopolitanism, Nationalism and Hegemony: Antonio Gramsci's Prison Notebooks and the European Crisis, *International Critical Thought*, 7:2, 190-204, DOI: 10.1080/21598282.2017.1316679
- Gane, N. (2005). Max Weber as Social Theorist: 'Class, Status, Party.' *European Journal of Social Theory*, 8(2), 211–226. <https://doi.org/10.1177/1368431005051764>
- Geoghegan, Vincent (2017) Althusser, Machiavelli and the "Theoretical Utopia", *International Critical Thought*, 7:2, 219-232, DOI: 10.1080/21598282.2017.1316678
- Khadiagala, G. M., & Lyons, T. (Eds.). (2001). *African foreign policies: Power and process*. USA: Lynne Rienner Publishers.
- Kymlicka, W (2002). *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, New York: Oxford University Press Inc
- López, M. (2013). Elite theory. *Sociopedia. isa*, 1-12. Retrieved 02 Feb, 2020 from: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53215484/elitetheory.pdf?1495347580=&response-content>
- Michels, R. (1984). *Partai politik: kecenderungan oligarkis dalam birokrasi*, Jakarta: Rajawali Press
- Morató, AR (2012). The analysis of cultural policy in a sociological perspective. Introductory keys to the study of the Spanish case. *RIPS: Journal of Political and Sociological Research* , 11 (3).pp. 102-119

Abdou Barrow

Putnam, R. D. (1995). Tuning in, tuning out: the strange disappearance of social capital in America. *PS: Political Science & Politics*, 28(4), 664+.

Obo, U. B., & Coker, M. A. (2014). The Marxist theory of the state: An introductory guide. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(4), pp. 527- 533

Artikel Terbitan

Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Limas di Sumatera Selatan

Reta Luciani, Elly Malihah

Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah)

Siti Fathimah, Ferdinand Kerebungu

Pembentukan Keterampilan Sosial di Rumah Pemberdayaan Aulia Qolbu Cilegon

Rizki Setiawan, Eti Komalasari

Penyesuaian Diri Peserta Didik pasca Penerapan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura

Nana Tri Sutisna, Nurhadi

Segregasi Sosial Mahasiswa Perantau di Yogyakarta

Amelia Susanto Putri, Anggaunitakiranantika

Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas untuk Muslim Milenial di Era Digital

Mila Nabila Zahara, Dadan Wildan, Siti Komariah

Hubungan antara Negara dan Masyarakat Sipil: Kajian Teoretis

Abdou Barrow

